



**KONTRIBUSI DAN MANFAAT PASAR DESA
(STUDI KASUS TIGA PASAR DESA DI KECAMATAN
PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI)**

*The Contribution And Benefits Of Village Market
(Case Study In Three Village Markets In Purwoharjo Subdistrict
Banyuwangi District)*

SKRIPSI

Oleh
Lilis Al Quriani
NIM 130910201009

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**KONTRIBUSI DAN MANFAAT PASAR DESA
(STUDI KASUS TIGA PASAR DESA DI KECAMATAN
PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI)**

*The Contribution And Benefits Of Village Market
(Case Study In Three Village Markets In Purwoharjo Subdistrict
Banyuwangi District)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Lilis Al Quriani
NIM 130910201009

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASJEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Nahari dan Almarhumah Ibunda Rupiah yang tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, semangat serta nasehat yang selalu menyertai setiap langkahku;
2. Kakakku Liya Wati dan Adikku Bagus Ahmad Dhani yang tersayang, terima kasih atas doa, semangat, dukungan serta nasehatnya;
3. Guru-guruku mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan;
4. Almater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya”
(QS. Al Baqarah:286)

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR. Turmudzi)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lilis Al Quriani

NIM : 130910201009

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa (Studi Kasus Tiga Pasar Desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2018

Yang menyatakan,

Lilis Al Quriani

NIM 130910201009

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KONTRIBUSI DAN MANFAAT PASAR DESA
(STUDI KASUS TIGA PASAR DESA DI KECAMATAN
PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh
Lilis Al Quriani
NIM 130910201009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Drs. Supranoto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota

: Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa (Studi Kasus Tiga Pasar Desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)” karya Lilis Al Quriani telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim penguji

Ketua,

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si

NIP. 196102131988021001

Anggota I,

Drs. Boedijono, M.Si

NIP. 196103311989021001

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

NIP. 195607261989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa (Studi Kasus Tiga Pasar Desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi); Lilis Al Quriani, 130910201009; 2018; 108 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, menyebutkan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan di kelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pasar Desa adalah salah satu aset yang dimiliki oleh desa, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 76 ayat (1) yang membahas tentang aset desa. Aset desa yang dimiliki desa akan di kelola dan hasilnya dapat menjadi pemasukan keuangan desa, keuangan desa yang berasal dari aset desa disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasar desa yang merupakan aset desa tersebut juga dimiliki oleh ketiga pasar desa yang berada di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Ketiga pasar desa tersebut berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan di Desa Grajagan. Ketiga desa juga sudah memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan pasar desanya, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pasar desa telah ditentukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga desa yaitu Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan Desa Grajagan yang berada di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?”. Tujuan dari penelitian ini adalah terdeskripsikannya kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa yang berada di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini yaitu dapat berguna baik bagi akademisi, pemerintah, maupun masyarakat.

Desa memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri baik di bidang pemerintahan maupun di bidang lainnya. Berdasarkan kewenangan yang di miliki desa dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 18 yang mana desa memiliki kewenangan dalam memberdayakan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat berarti desa dapat menetapkan melalui Peraturan Desa dalam mendirikan, menetapkan, mengurus dan mengelola pasar desa agar masyarakat desa lebih sejahtera. Kewenangan tersebut juga menjadikan desa lebih aktif lagi mengelola aset yang dimiliki, dan aset yang sangat besar yang dimiliki desa adalah tanah kas desa. Tanah kas desa tersebut juga dimanfaatkan dengan berbagai macam bentuk salah satunya dibangun menjadi pasar desa. Pasar desa merupakan pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007. Oleh karena itu, keberadaan pasar desapun sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa, karena kedua elemen ini saling berkaitan dalam mengelola dan mengembangkan pasar desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa yang berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Desain penelitiannya adalah studi kasus tipe-4 yaitu desain multikasus terjal. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang telah ditentukan, setelah memperoleh data kemudian di olah dan di analisis sebagai hasil dari penelitian. Selain informan kunci juga terdapat informan lainnya atau tambahan agar data yang di hasilkan mengalami kejenuhan. Selain itu, data juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi baik dari lapangan maupun dari instansi. Tahap menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi dan perpanjangan keikut-sertaan. Selain itu dilakukan analisis data dalam pengumpulan data dengan mereduksi data, kemudian menyajikan data, dan menarik kesimpulan/verifikasi data. Kemudian data disajikan baik dalam bentuk narasi, tabel maupun gambar.

Hasil dari penelitian ini adalah di Pasar Desa Purwoharjo terkait kontribusi yang diberikan pada nominalnya bersifat fluktuatif, namun pada prosentasenya terus mengalami kenaikan. Selain itu pasar desa tersebut juga sangat bermanfaat

bagi masyarakat dalam desa maupun luar desa yang berjualan di pasar tersebut. Untuk pasar Desa Karetan terkait kontribusinya baik pada nominal ataupun prosentasenya bersifat fluktuatif. Sedangkan keberadaan pasar desa tersebut bagi masyarakat desa setempat hanya digunakan sebagai tempat mereka berbelanja selebihnya dimanfaatkan oleh masyarakat luar Desa Karetan. Untuk pasar Desa Grajagan terkait kontribusi nominalnya mengalami kenaikan, namun prosentasenya bersifat fluktuatif. Sedangkan manfaat keberadaan pasar desa tersebut tidak hanya masyarakat desa yang memanfaatkan dengan baik, tetapi juga para pedagang yang berasal dari desa lain juga ikut memanfaatkan keberadaan pasar tersebut dengan baik juga. Meskipun begitu, dari ke tiga pasar desa tersebut semuanya bermanfaat dengan mendatangkan penjual maupun pembeli dari luar yang dapat menambah pendapatan pasar desa pada masing-masing desa tersebut. Kontribusi pasar desa terhadap pendapatan asli desa di masing-masing desa berada di urutan ketiga setelah hasil dari sewa tanah kas desa dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong yang merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan asli desa.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa (Studi Kasus Tiga Pasar Desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
5. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat di sempurnakan;
7. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
8. Ayahanda Nahari dan Almarhumah Ibunda Rupiah serta Kakakku Liya Wati dan Adikku Bagus Ahmad Dhani beserta keluarga besar yang telah memberiku doa, semangat, motivasi, dukungan serta keluh kesah penulis;

9. Kakak ipar I Made Sukerta dan Sepupu Defa Azril Pradnyana yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi;
10. Keluarga besar Ngateni dan Keluarga besar Sumarto, terima kasih atas doa, dan motivasinya;
11. Kepada Pemerintah Desa Purwohajo, Desa Karetan dan Desa Grajagan beserta jajaran perangkat desa dan para pedagang serta pembeli yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi kelancaran peneliti dalam memperoleh data saat penelitian;
12. Sahabatku mbak Keiyiki Novita Dewi, Nur Laila Ulva, Ike Marantika yang banyak sekali memberikan semangat, doa, dukungan, nasehat, serta bantuan selama ini;
13. Keluarga besar kos Kandank 17 yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat;
14. Teman-teman Hanik, Afida, Gita, Nimas, Ninin, Aulia, dan keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2013 yang menjadi teman diskusi, memberikan semangat;
15. Seluruh teman-teman UKMF LIMAS yang telah memberi ruang dan kesempatan untuk berproses;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
GLOSARIUM	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Otonomi Desa	14
2.1.1 Desa	14
2.1.2 Otonomi Desa	16
2.2 Keuangan Desa	21
2.3 Pasar Desa	27
2.4 Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa	36
2.5 Penelitian Terdahulu	40
2.6 Kerangka Berfikir	42
BAB 3. METODE PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3 Situasi Sosial	45
3.3.1 Tempat	45
3.3.2 Pelaku	45
3.3.3 Aktivitas	45
3.4 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian	46
3.4.1 Fokus Penelitian	47
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian	47
3.4.3 Sumber Data	49
3.4.4 Teknik dan Alat Perolehan Data	50
3.4.5 Menguji Keabsahan Data	54

3.4.6 Teknik Analisis Data	55
3.5 Teknik Penyajian Data	57
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Deskripsi Lokasi	58
4.1.1 Kabupaten Banyuwangi	58
4.1.1.1 Letak dan Keadaan Geografis	58
4.1.1.2 Pemerintahan	60
4.1.1.3 Kondisi Penduduk	60
4.1.1.4 Kondisi Ekonomi	61
4.1.2 Kecamatan Purwoharjo	62
4.1.2.1 Letak dan Keadaan Geografis	62
4.1.2.2 Keadaan Penduduk	64
4.1.2.3 Keadaan Ekonomi	65
4.1.3 Desa Purwoharjo	66
4.1.3.1 Letak dan Keadaan Geografis	66
4.1.3.2 Keadaan Penduduk	67
4.1.3.3 Pemerintahan Desa	67
4.1.3.4 Pasar Desa Purwoharjo	69
4.1.4 Desa Karetan	71
4.1.4.1 Letak dan Keadaan Geografis	71
4.1.4.2 Keadaan Penduduk	72
4.1.4.3 Pemerintahan Desa	72
4.1.4.4 Pasar Desa Karetan	74
4.1.5 Desa Grajagan	76
4.1.5.1 Letak dan Keadaan Geografis	76
4.1.5.2 Keadaan Penduduk	77
4.1.5.3 Pemerintahan Desa	77
4.1.5.4 Pasar Desa Grajagan	79
4.2 Penyajian Data	81
4.2.1 Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa Purwoharjo	87
4.2.1.1 Kontribusi Pasar Desa kepada Pemerintahan Desa Purwoharjo	87
4.2.1.2 Manfaat Pasar Desa pada Masyarakat Desa Purwoharjo	90
4.2.2 Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa Karetan	95
4.2.2.1 Kontribusi Pasar Desa kepada Pemerintahan Desa Karetan	95
4.2.2.2 Manfaat Pasar Desa kepada Masyarakat Desa Karetan	97
4.2.3 Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa Grajagan	100
4.2.3.1 Kontribusi Pasar Desa kepada Pemerintahan Desa Grajagan	100
4.2.3.2 Manfaat Pasar Desa kepada Masyarakat Desa Grajagan	103
BAB 5. PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106

5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kategori pasar berdasarkan status tanah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016	6
Tabel 1.2 Pengelompokan pasar berdasarkan banyaknya bangunan di dalam pasar di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016	7
Tabel 1.3 Kontribusi retribusi pasar desa pada PADesa tahun 2012–2016 .	8
Tabel 1.4 Desa yang memiliki pasar desa di Kecamatan Purwoharjo	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1 Luas wilayah Kecamatan Purwoharjo	63
Tabel 4.2 Jumlah dusun, RW dan RT di Kecamatan Purwoharjo	64
Tabel 4.3 Jumlah penduduk di Kecamatan Purwoharjo tahun 2015	65
Tabel 4.4 Luas wilayah Desa Purwoharjo menurut penggunaannya	66
Tabel 4.5 Jumlah dusun, RW dan RT di Desa Purwoharjo	67
Tabel 4.6 Luas wilayah Desa Karetan menurut penggunaannya	71
Tabel 4.7 Jumlah dusun, RW dan RT di Desa Karetan	72
Tabel 4.8 Luas wilayah Desa Grajagan menurut penggunaannya	76
Tabel 4.9 Jumlah dusun, RW dan RT di Desa Grajagan	77
Tabel 4.10 Kontribusi pasar desa pada Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Purwoharjo tahun 2012–2016 (ribuan)	88
Tabel 4.11 Pegawai dan pengguna fasilitas pasar Desa Purwoharjo	91
Tabel 4.12 Kontribusi pasar desa pada Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Karetan tahun 2012–2016 (ribuan)	96
Tabel 4.13 Pegawai dan pengguna fasilitas pasar Desa Karetan	98
Tabel 4.14 Kontribusi pasar desa pada Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Grajagan tahun 2012–2016 (ribuan)	101
Tabel 4.15 Pegawai dan pengguna fasilitas pasar Desa Grajagan	103

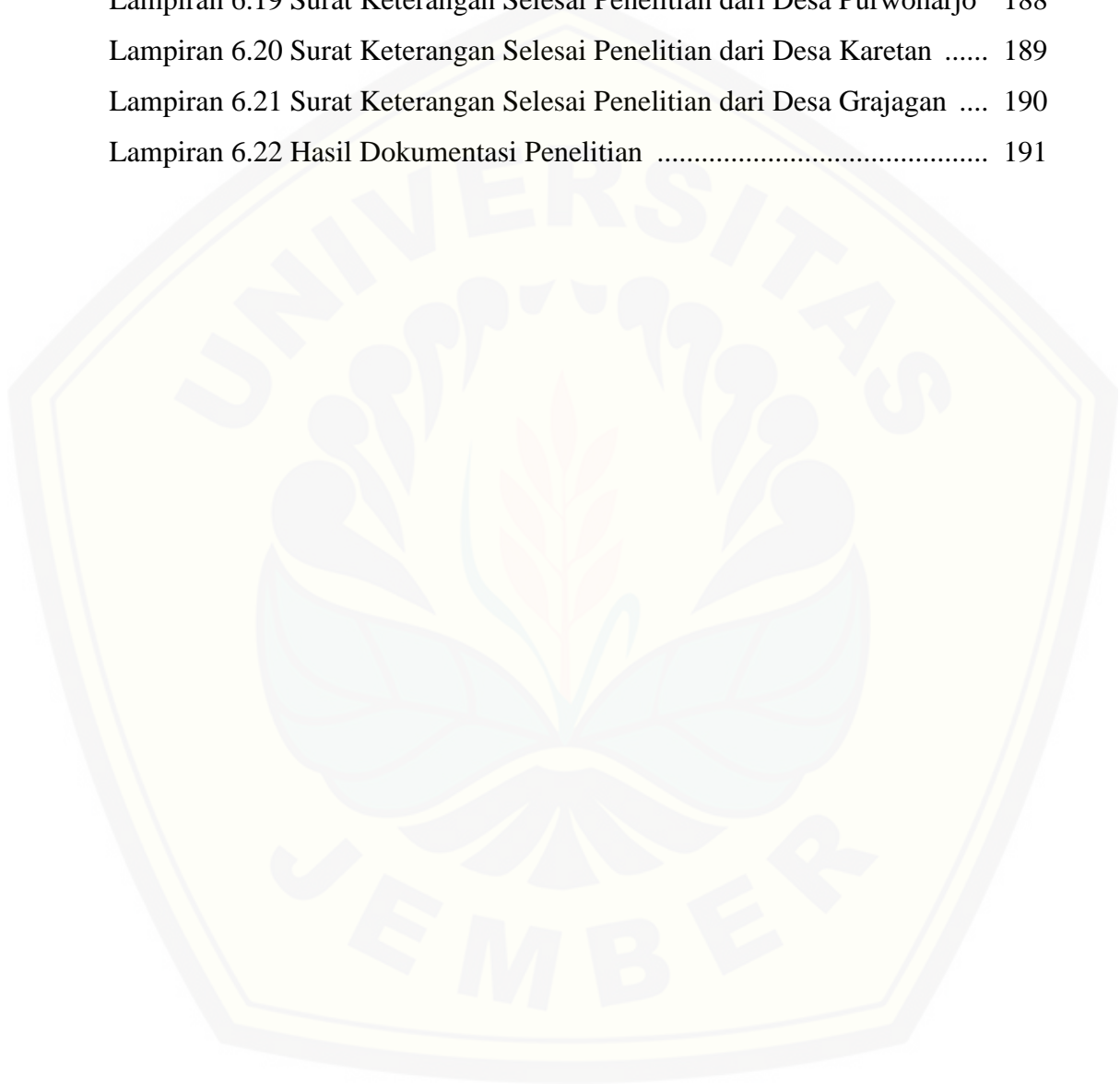
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi	60
Gambar 4.2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi	69
Gambar 4.3 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi	74
Gambar 4.4 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi	79
Gambar 4.5 Denah pasar Desa Purwoharjo	82
Gambar 4.6 Denah pasar Desa Karetan	84
Gambar 4.7 Denah pasar Desa Grajagan	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	114
Lampiran 6.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa	115
Lampiran 6.3 Peraturan Desa Purwoharjo tentang Pengelolaan Pasar Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharo Kabupaten Banyuwangi	116
Lampiran 6.4 Peraturan Desa Karetan tentang Pasar Desa Karetan Kecamatan Purwoharo Kabupaten Banyuwangi	117
Lampiran 6.5 Peraturan Desa Grajagan tentang Pengelolaan Pasar Curahjati Desa Grajagan Kecamatan Purwoharo Kabupaten Banyuwangi ...	118
Lampiran 6.6 Profil Pasar Desa Purwoharjo	119
Lampiran 6.7 Profil Pasar Desa Karetan	126
Lampiran 6.8 Profil Pasar Desa Grajagan	133
Lampiran 6.9 Peraturan Desa Purwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwoharjo Tahun 2015	140
Lampiran 6.10 Peraturan Desa Purwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwoharjo Tahun 2016	145
Lampiran 6.11 Peraturan Desa Karetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun 2015	150
Lampiran 6.12 Peraturan Desa Karetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karetan Tahun 2016	156
Lampiran 6.13 Peraturan Desa Grajagan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grajagan Tahun 2015	162
Lampiran 6.14 Peraturan Desa Grajagan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwoharjo Tahun 2016	168
Lampiran 6.15 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember	174
Lampiran 6.16 Surat Rekomensi dari Bangkesbangpol Kabupaten Banyuwangi	176

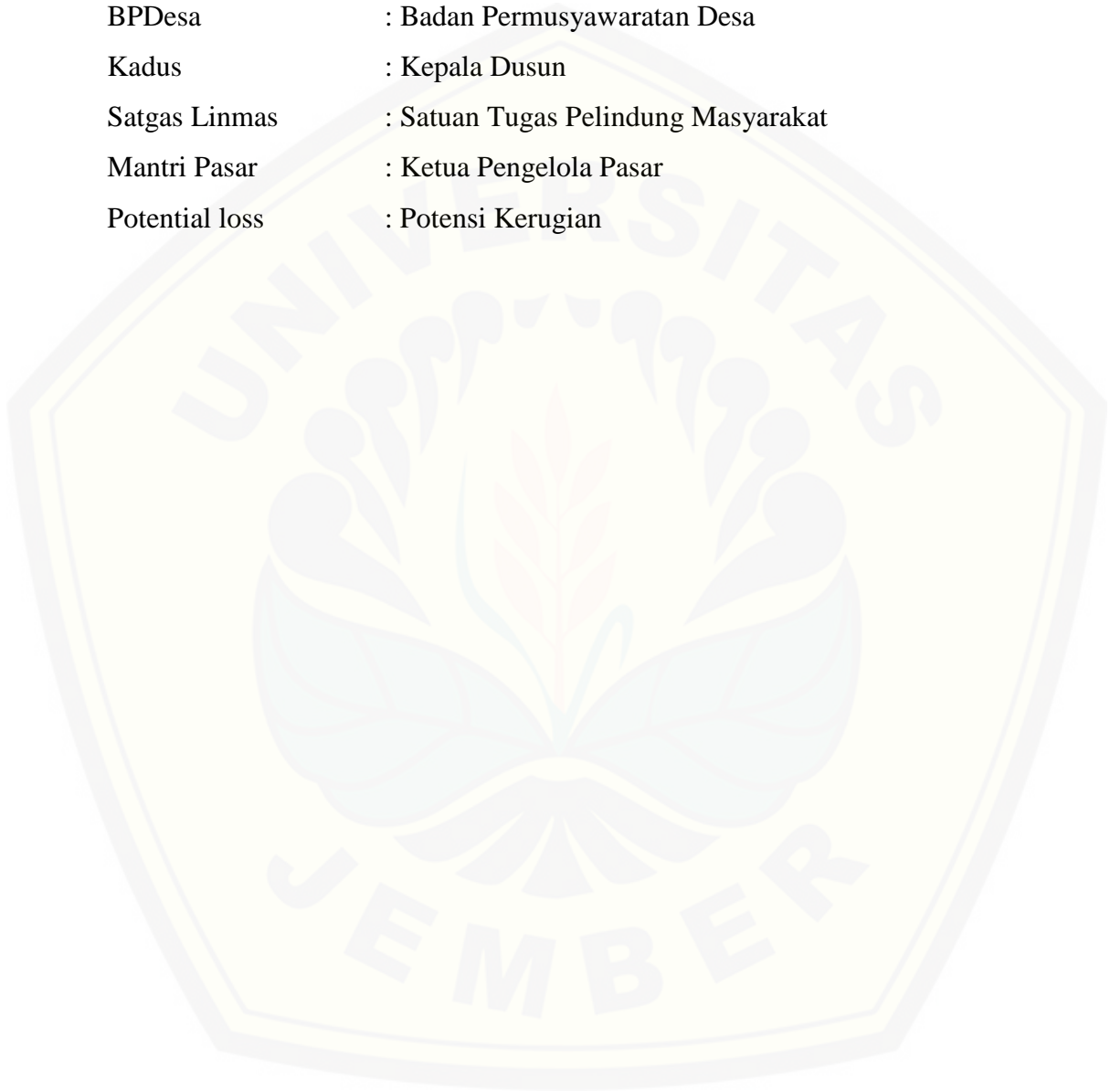
Lampiran 6.17 Inventarisasi Pasar Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016	177
Lampiran 6.18 Pedoman Wawancara	182
Lampiran 6.19 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Purwoharjo	188
Lampiran 6.20 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Karetan	189
Lampiran 6.21 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Grajagan	190
Lampiran 6.22 Hasil Dokumentasi Penelitian	191



GLOSARIUM

PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMDES	: Pemerintah Desa
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
TPS	: Tempat Pembuangan Sampah
PADesa	: Pendapatan Asli Desa
PJ	: Penanggung Jabatan
Kasi	: Kepala Seksi
BPD	: Badan Permusyawaratan Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
UU	: Undang-undang
Permendagri	: Peraturan Menteri dalam Negeri
RPJMDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
HO	: Ijin Gangguan
DAS	: Daerah Aliran Sungai
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Saerah
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
SE'06	: Sensus Ekonomi tahun 2006
Km	: Kilometer
M	: Meter
Km ²	: Kilometer Persegi
Ha	: Hekto Are
Mm	: Milimeter
M ²	: Meter Persegi

Rp	: Rupiah
°	: Derajat
KK	: Kepala Keluarga
Kaur	: Kepala Urusan
BPDesa	: Badan Permusyawaratan Desa
Kadus	: Kepala Dusun
Satgas Linmas	: Satuan Tugas Pelindung Masyarakat
Mantri Pasar	: Ketua Pengelola Pasar
Potential loss	: Potensi Kerugian



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini tentang kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Tiga pasar desa yang menjadi tempat penelitian adalah di tiga desa Kecamatan Purwoharjo yaitu Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan. Kontribusi pasar desa yang dimaksudkan yaitu kontribusi pasar desa kepada pemerintah desa yang berkaitan dengan pendapatan asli desa, sedangkan manfaat pasar desa berkaitan dengan manfaat atau kegunaan dari pasar desa kepada pengguna pasar desa tersebut baik masyarakat desa setempat khususnya maupun luar desa pada umumnya baik yang berdagang maupun yang berbelanja di pasar desa tersebut.

Kedudukan desa yang dulunya menjadi objek pembangunan saat ini berganti posisi menjadi subjek pembangunan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah;

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan untuk menunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan desa maka desa mempunyai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan tersebut. Penyelenggaraan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang didalamnya terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh desa juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18, disebutkan bahwa

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Berangkat dari kewenangan desa yang menyebutkan adanya kewenangan desa dalam memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dapat dijadikan suatu landasan bahwa kewenangan tersebut dapat menetapkan kewenangan berskala desa melalui peraturan bupati maupun peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa dengan memasukkan, pendirian, penetapan, pengurusan, dan pengelolaan aset desa. Salah satu aset desa yang dimaksudkan adalah pasar desa, dan aset desa merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli desa.

Berbicara mengenai pendapatan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 Ayat 1 disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari; a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan asli desa salah satunya berasal dari hasil aset desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 76 Ayat 1, desa memiliki aset desa yang berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Aset desa merupakan kekayaan atau harta benda milik desa yang digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Kekayaan yang dimiliki pada setiap desa berbeda-beda, dan tidak semua desa mempunyai kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki desa pada

umumnya selain tanah desa adalah pasar desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pasar desa yang berkaitan dengan kontribusi dan manfaat pasar desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa. Kontribusi pasar desa kepada pemerintah desa berkaitan dengan pendapatan asli desa karena pasar desa merupakan salah satu aset yang dimiliki desa dan hasil dari pengelolaan aset tersebut dapat menambah pendapatan desa, sedangkan manfaat pasar desa bagi masyarakat desa dapat berupa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka terutama kebutuhan pangan, selain itu mereka juga dapat melakukan jual-beli di dalam pasar dengan memasarkan hasil pertaniannya, dan mereka juga dapat bekerja di pasar tersebut sehingga mereka dapat menambah penghasilan atau pendapatannya.

Menurut Sumarsono (2013:3), pasar adalah tempat atau keadaan di mana para pembeli dan penjual membeli dan menjual barang, jasa atau sumber daya dan berinteraksi didalamnya sehingga dapat menyebabkan pembentukan harga pasar. Pasar terdiri dari pasar barang, jasa dan sumber daya yang mengadakan transaksi jual-beli dalam perekonomian. Sedangkan menurut Supartomo (1986:4), pasar adalah pertemuan antara penjual yang menawarkan barangnya dengan pembeli yang meminta barang (tidak harus dalam bentuk “fisik”). Pasar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa juga dijelaskan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang lebih condong berada di sekitar pemukiman masyarakat desa, yang transaksi jual belinya masih menggunakan transaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli secara langsung, sedangkan pasar modern para penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum pada barangnya (barcode).

Pasar tradisional dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis berdasarkan pengelolaannya, yaitu pasar daerah dan pasar desa. Pasar daerah adalah pasar

yang dikelola oleh pemerintahan daerah, sedangkan pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa. Pasar desa dibangun dan diprakarsai oleh kepentingan masyarakat desa yang dapat digunakan sebagai tempat penyedia berbagai macam kebutuhan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak perlu berbelanja ke kota.

Pasar juga dibedakan menjadi beberapa jenis menurut waktunya, yakni pasar harian yaitu pasar yang tiap harinya terdapat penjual yang berdagangan berbagai jenis dagangannya; pasar mingguan yaitu pasar yang hanya melakukan kegiatannya setiap seminggu sekali; pasar bulanan yaitu pasar yang hanya melakukan kegiatannya sebulan sekali; pasar tahunan yaitu pasar yang diselenggarakan tiap setahun sekali; dan pasar kontemporer yaitu pasar yang hanya terjadi pada waktu tertentu dan dapat terjadi dalam waktu yang tak menentu juga.

Suatu pasar baik besar maupun kecil terdapat suatu siklus pasar, yang mana terdapat pasaran raya dan pasaran pada hari-hari biasa. Siklus pasar ini terjadi baik di pasar daerah maupun pasar desa, akan tetapi untuk pasar daerah yang sudah besar atau masuk dalam klas I dan II biasanya pasarnya beroperasi setiap hari dengan jumlah pedagang yang cukup banyak. Walaupun begitu pasar desa juga ada yang seperti itu, yang beroperasi setiap hari namun ada satu atau dua hari dalam seminggu menjadi pasar raya dengan jumlah pedagang yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa, namun ada juga pasar yang hanya beroperasi satu hari dalam seminggu. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan keberadaan pasar dapat memberikan dampak yang langsung maupun tidak langsung baik itu bagi pemerintahan desa maupun bagi masyarakat. Yang mana bagi pemerintah desa pasar tersebut dapat berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) salah satunya pada pendapatan asli desa (PADesa), dan adanya pasar itu dapat dimanfaatkan dan digunakan juga oleh masyarakatnya.

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Sedangkan kontribusi dalam Kamus Bahasa Inggris (2008), yaitu *contribute*, *contribution* maknanya

adalah keikutsertaan, keterlibatan, maupun sumbangan. Kontribusi juga dapat diartikan suatu bantuan yang dapat berupa uang, pemikiran, tenaga, ataupun lainnya yang sekiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan. Pengertian kontribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bagian dari aspek atau komponen tertentu yang berkaitan terhadap suatu hal. Aspek atau komponen tertentu yang dimaksud adalah pasar desa, sehingga pasar desa adalah bagian dari sumber pendapatan asli desa yang dapat menambah atau meningkatkan pendapatan asli desa di suatu desa. Kontribusi tersebut dapat diberikan sesuai dengan porsi atau kemampuan kontributornya yang dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Kontribusi pada pasar desa digunakan untuk mengetahui sejauh mana pasar desa terlibat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli desa. Sedangkan manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), berarti guna; faedah. Dapat diartikan bahwa manfaat pasar desa merupakan adanya pasar desa tersebut berguna bagi masyarakat desa. Masyarakat desa dapat dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mereka juga dapat menjual hasil pertaniannya serta bekerja di pasar sehingga keberadaan pasar desa tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kabupaten Banyuwangi mempunyai 24 Kecamatan dan 189 Desa/ 28 Kelurahan. Terdapat 85 pasar desa dan 21 pasar daerah se-Kabupaten Banyuwangi. Jumlah desa dengan pasar desa memang tidak seimbang, namun ada beberapa desa yang mempunyai pasar lebih dari satu. Pasar desa yang terdata juga tidak semuanya status tanah yang digunakan berstatus milik desa, status tanah tersebut ada yang milik pemerintah desa, milik pemerintah daerah, perorangan, dan hibah. Berikut ini tabel 4 (empat) kategori status tanah kepemilikan pasar desa tersebut.

Tabel 1.1 Kategori pasar berdasarkan status tanah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

Kategori Status Tanah			Jumlah Pasar	Keterangan
Status Tanah Pasar	Milik Pemerintah Desa		68	Pasar desa dengan status milik PEMDES terdapat di 21 Kecamatan dengan persebaran yang cukup baik, meskipun tidak tersebar di semua desa yang ada di semua kecamatan.
Status Tanah Pasar	Milik Pemerintah Daerah		9	Pasar desa yang status tanahnya milik PEMDA yaitu di Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, Desa Jajag Kecamatan Gambiran, Desa Kebaman Kecamatan Srono, 3 Desa yang berada di Kecamatan Genteng ada 4 pasar, dan di Kel. Kalipuro Kecamatan Kalipuro.
Status Tanah Pasar	Perorangan		7	Pasar desa yang status tanahnya perorangan yaitu di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo, Desa Cluring Kecamatan Cluring, Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran, Desa Songgon Kecamatan Songgon, Desa Kelir Kecamatan Kalipuro, Desa Tegalsari dan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari.
Status Tanah Pasar	Hibah		3	Pasar desa yang status tanahnya hibah antara lain di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo, lalu di Desa Songgon dan Desa Sumberarum Kecamatan Songgon.
Tidak Memiliki Status Tanah			5	Pasar desa yang tidak memiliki status tanahnya antara lain di Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo, Desa Sraten dan Desa Benculuk Kecamatan Cluring, Desa Kalibaru wetan Kecamatan Kalibaru, dan Desa Balak dan Desa Bayu Kecamatan Songgon.

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 (diolah)

Tabel 1.1 menjelaskan terkait status tanah pasar yang digunakan. Dapat diketahui juga bahwa dari 24 Kecamatan terdapat 21 Kecamatan yang mempunyai pasar desa, selain itu terdapat 5 pasar yang belum mempunyai status kepemilikan tanahnya. Berkaitan dengan status tanahnya juga tidak sedikit dari pasar desa tersebut memiliki status kepemilikan ganda, seperti status tanah milik Desa dan status tanah perorangan di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo, Desa Songgon Kecamatan Songgon yang status tanahnya milik perorangan dan hibah, Desa

Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo yang status tanahnya milik PEMDES dan juga milik PEMDA serta desa yang lain yang juga terjadi hal serupa.

Pasar desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi tidak semuanya memiliki bangunan yang banyak dan juga memiliki fasilitas lengkap di dalamnya. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki bangunan dengan jumlah yang paling banyak, datanya akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Pengelompokan pasar berdasarkan banyaknya bangunan di dalam pasar di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

Nama Kecamatan	Jumlah Bangunan Pasar	Keterangan
Wongsorejo	701	Bangunan pasar yang paling banyak di Desa Bajulmati sebanyak 701. Di kecamatan ini terdapat 2 pasar desa.
Muncar	636	Bangunan pasar di Desa Sumberberas sebanyak 601. Terdapat 6 pasar desa pada Kecamatan Muncar.
Purwoharjo	391	Bangunan pasar di Desa Purwoharjo sebanyak 279. Di kecamatan ini terdapat 6 pasar desa.
Kalipuro	262	Bangunan pasar di Desa Ketapang sebanyak 111. Di kecamatan ini terdapat 5 pasar desa.
Tegalsari	223	Bangunan pasar di Desa Karangdoro sebanyak 154. Di kecamatan ini terdapat 4 pasar desa.

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 (diolah)

Tabel di atas merupakan pengelompokan pasar desa yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah bangunan yang paling banyak. Selain dalam tabel tersebut, pasar desa yang memiliki bangunan yang dapat dikategorikan banyak diantaranya pasar desa di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Cluring, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Srono, Kecamatan Glagah, Kecamatan Genteng, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Licin, dan Kecamatan Siliragung. Bangunan pasar tersebut bukan hanya jumlahnya saja yang besar, namun kelengkapan dan kelayakan bangunannya juga terdapat perbedaan. Bangunan yang dimaksudkan adalah banyaknya jumlah los permanen, semi permanen, dan bangunan los sederhana serta kelengkapan bangunannya seperti adanya kantor pasar, tempat parkir, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), dan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah).

Bangunan yang banyak dan layak memungkinkan dapat mempengaruhi besar kecilnya kontribusi yang diberikan kepada pemerintah desa maupun masyarakat desanya, namun selain kelayakan dan banyaknya bangunan yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan kebersihan pasar juga. Pasar desa yang aman dan bersih akan memberikan perasaan yang nyaman bagi mereka yang ada di dalam pasar. Selain itu operasional pasar desa juga merupakan salah satu faktor pemicu dari bertambahnya penerimaan yang dihasilkan pasar tersebut. Oleh karena itu kontribusi yang diberikan kepada pemerintah desa tidaklah sama jumlahnya antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, berikut akan disajikan kontribusi realisasi dari target pasar desa pada tiga desa dengan tiga kecamatan yang berbeda yang berasal dari retribusi pasar desa.

Tabel 1.3 Kontribusi retribusi pasar desa pada PADesa tahun 2012-2016

Tahun	Kontribusi		
	Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran	Desa Temurejo Kec. Bangorejo	Desa Purwoharjo Kec. Purwoharjo
2012	18.000.000	1.500.000	25.200.000
2013	18.000.000	1.500.000	25.200.000
2014	24.000.000	1.500.000	25.200.000
2015	24.000.000	1.500.000	25.200.000
2016	30.000.000	1.500.000	33.400.000

Sumber: data diolah

Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan dalam keuangan pasar desanya walaupun tidak setiap tahunnya bertambah, bahkan kontribusi yang diberikan pada setiap desa relatif sama tiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena kontribusi itu merupakan bentuk realisasi dari target yang telah ditetapkan kecuali di Kecamatan Pesanggaran. Kontribusi yang diberikan pasar Desa Pesanggaran kepada pemerintah desa bukanlah hasil dari target melainkan penerimaan bersih dari pengelolaan pasar desanya. Dapat diketahui juga bahwa kontribusi pasar desa yang paling banyak terhadap pendapatan asli desa adalah di Kecamatan Purwoharjo. Oleh karena itu peneliti memilih Kecamatan Purwoharjo untuk diteliti, selain itu juga karena dari hasil wawancara dengan Bapak Suraji selaku Pj. Kepala Desa Purwoharjo (03 Januari 2017), pada tahun 2016 pasar desanya berhasil meraih penghargaan terbaik satu pada tingkat Kabupaten dan terbaik tiga se-Jawa Timur dalam kategori Pengelolaan Pasar Desa Provinsi Jawa Timur.

Kecamatan Purwoharjo terdapat 8 desa dan ada 6 desa yang mempunyai pasar desa, data mengenai hal tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Desa yang memiliki pasar desa di Kecamatan Purwoharjo

No	Nama Desa	Nama Pasar	Hari Pasaran	Keterangan
1	Kradenan	Kradenan	Selasa dan jum'at	Mempunyai bangunan sederhana sebanyak 11 bangunan
2	Karetan	Pasar Sarana Niaga	Selasa	Ada bangunan los permanen 41 bangunan dan 21 bangunan sederhana
3	Sumberasri	Sumberasri	Rabu	Terdapat 8 los permanen dan 1 bangunan semi permanen
4	Grajagan	Pasar Curahjati Grajagan	Sabtu dan setiap hari	Ada 19 los permanen dan 2 bangunan semi permanen
5	Sidorejo	Pasar Desa	Senin dan rabu	Mempunyai bangunan
6	Purwoharjo	Purwoharjo	Kamis	Terdapat 2 los permanen, 4 semi permanen, dan ada 3 bangunan sederhana
7	Bulurejo	-	-	Ada 75 los permanen, 148 semi permanen, dan 56 bangunan sederhana
8	Glagahagung	-	-	-

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas Desa Bulurejo dan Glagahagung tidak mempunyai pasar desa. Untuk menambah informasi yang akurat mengenai ada atau tidaknya pasar desa di kedua desa tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suraji selaku Kasi Kesra dan Informasi di Kecamatan Purwoharjo dan juga Penanggung Jabatan (Pj) Kepala Desa Purwoharjo yang mengutarakan bahwa,

Desa Bulurejo dulunya mempunyai pasar, namun sekarang sudah mati atau berhenti tetapi masih ada yang berjualan hanya beberapa orang saja. Mereka berjualan di pinggir jalan dan itu dikelola oleh perorangan dan pemerintah desa tidak terlibat mengenai pasar desa tersebut. Hal tersebut juga karena tempat yang dulunya dibuat pasaran tanahnya bukan tanah desa, sehingga pemilik tanah menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Sedangkan di Desa Glagahagung ada pasar namun pasar tersebut bukan pasar desa melainkan pasar daerah, hak kepemilikan pasar tersebut juga sudah lama, bahkan dapat dikatakan sudah dari dulu dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Di Kecamatan

Purwoharjo ini pasar desa yang tergolong ramai dan beroperasi setiap hari ya di Desa Purwoharjo dan Grajagan. Desa Karetan juga termasuk ramai tapi hanya beroperasi sekali dalam seminggu. (wawancara, tanggal 03 Januari 2017)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pasar desa di Kecamatan Purwoharjo yang tergolong ramai pada saat hari pasaran adalah pasar desa Purwoharjo, Karetan, dan Grajagan dan dari data sebelumnya ketiga desa ini juga mempunyai bangunan yang baik, layak dan juga banyak. Oleh karena itu peneliti memilih ketiga pasar tersebut sebagai tempat penelitian. Tiga pasar lainnya yang ada di Kecamatan Purwoharjo yaitu pasar desa di Desa Kradenan, Sumberasri dan Sidorejo saat ini masih dimulai proses penataan pengelolaan pasar desanya.

Setiap pasar desa mempunyai pemasukan atau pendapatan dari pengelolaan pasar desanya, dan masing-masing pasar desa mempunyai target yang harus direalisasikan tiap tahunnya, target tersebut berasal dari retribusi pasar baik dari retribusi karcis pedagang, karcis kendaraan maupun sewa tempat untuk berjualan dan juga retribusi lainnya yang ada di dalam pasar sehingga kontribusi yang diberikan pada tiap pasar desa dapat berbeda-beda. Besar kecilnya kontribusi yang diberikan pastinya tidak lepas dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan desa dan upaya pemerintahan desa dalam mengelola dan memberdayakan pasar desa tersebut. Bukan hanya pemerintah desa tetapi partisipasi para warga serta para penjual dan pembeli yang bersangkutan dalam menjalankan dan mengelola pasar desa juga harus ditingkatkan.

Pemerintah desa dapat mengupayakan peningkatan pengawasan terhadap pengelola pasar baik itu kepala pasar, sekretaris pasar, bendahara pasar maupun petugas lainnya yang ada dalam menjalankan tugasnya selain itu juga menetapkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan pasar desa tersebut untuk kemajuan pasar. Pembukuan atau pencatatan keuangan yang ada di dalam pasar juga sangat penting baik itu yang berkaitan dengan pendapatan pasar maupun pengeluaran yang terjadi dalam pengelolaan pasar desa tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pasar desa juga perlu ditingkatkan dalam hal kebersihan dan juga keamanan di dalam pasar.

Pasar desa pada saat ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, pada dasarnya dibentunya pasar desa mempunyai tujuan utama yaitu sebagai sarana untuk memasarkan hasil produksi desa, mendorong masyarakat desa agar mampu/berproduksi dan mengolah hasil produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mendorong kehidupan perekonomian desa. Bagi masyarakat, pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sangat mendukung pemenuhan hidup mereka sesuai dengan kondisi dan kemampuan finansialnya. Bukan hanya masyarakat dan pengelola pasar yang harus berperan demi kelangsungan pasar. Namun, peran pemerintah dalam mempertahankan kearifan lokal yang ada pada pasar tradisional juga sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup pasar tradisional tersebut. Baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam mengelola pasar daerah dan pasar desa khususnya yang jauh dari perkotaan.

Pasar desa menyediakan fasilitas pelengkap agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan tepat. Selain itu, dengan adanya pasar desa masyarakat lokal juga dapat melakukan aktivitas jual beli, dan juga masyarakat dapat memperjualkan hasil pertaniannya atau hasil karyanya di dalam pasar. Hal inilah yang membuat pasar desa lebih efektif dan efisien bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat pada umumnya. Tanpa ada larangan siapa yang ada di dalam pasar, sehingga tidak membatasi apa saja yang diperjual belikan dalam pasar. Namun, keamanan dan kebersihan benar-benar harus dijaga dan diperhatikan di pasar bukan hanya tanggungjawab petugas saja, tetapi para penjual dan pembeli juga harus berperanserta dalam menjaga keamanan dan kebersihan baik di dalam maupun di luar pasar desa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Menurut Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:48) menjelaskan bahwa perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori, atau kaidah dan kenyataan. Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah “Bagaimana kontribusi pasar desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) dan bagaimana manfaat pasar desa tersebut di tiga pasar desa yang berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, dengan begitu akan ada target dari dilakukannya penelitian tersebut. Menurut Moleong (2014:400), tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian. Tujuan dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh penelitian untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:49), tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah terdeskripsikannya kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa yang berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintahan desa dan masyarakat desa baik dari dalam maupun luar desa yang menggunakan pasar desa tersebut sebagai pedagang maupun sebagai pembeli.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang dilakukan (Wardiyanta, 2006:90). Manfaat teoritis yang dimaksudkan adalah peneliti dapat mengembangkan teori, sedangkan manfaat praktis penelitian merujuk pada hasil penelitian yang dapat berguna pada hal-hal yang bersifat praktis. Manfaat penelitian ini dikemukakan apa yang sekiranya menjadi kegunaan dari hasil penelitian baik dalam dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur penelitian mengenai kontribusi dan manfaat dari adanya pasar desa.

b. Bagi Pemerintah

Memberi suatu gambaran terhadap kontribusi dan manfaat dari adanya pasar desa sehingga dapat dijadikan saran dan kritik yang membangun bagi pemerintah untuk membuat kebijakan di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan terkait gambaran kontribusi dan manfaat dari adanya pasar desa kepada masyarakat luas yang dapat meningkatkan pembangunan di desanya yang masih jarang mengetahuinya sehingga dapat menambah pengetahuan umum tentang kebijakan serta program pemerintah tersebut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Dapat diketahui bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya.

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti seharusnya memiliki konsep dasar untuk mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dijadikan alur berpikir. Alur tersebut kemudian dikemas dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berpikir yang menjadi pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berpikir itu dapat berupa kerangka teoritis yang akan dijadikan dasar pemikiran peneliti untuk menganalisis sebuah permasalahan penelitian yang akan dicari jawabannya. Berdasarkan uraian tersebut maka konsep yang dibutuhkan peneliti dalam membangun konsep dasar penelitian ini adalah: Otonomi desa, keuangan desa, pasar desa, kontribusi dan manfaat pasar desa, serta kerangka berfikir.

2.1 Otonomi Desa

2.1.1 Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:256), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Sedangkan menurut Widjaja (2012:3), desa adalah

suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut Ter Haar (dalam Nurcholis, 2011:16), desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat *ajeg* dengan pemerintah sendiri. Desa dapat disebut sebuah komunitas yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Kewenangan tersebut dilaksanakan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat.

Pelaksanaan kewenangan desa diatur dan diurus oleh desa sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Adanya undang-undang tentang desa ini semakin jelas bahwa pemerintah desa mempunyai tugas untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Desa dalam perjalanannya telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi lebih maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Selain itu dalam segi pembangunan, pemerintah desa dapat mewujudkan kemandirian desa dan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu terdapat pengaturan desa yang berdasarkan atas asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan desa tersebut bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- d. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- g. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- h. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.1.2 Otonomi Desa

Otonomi dapat dimaknai sebagai suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Adanya otonomi desa berarti desa mempunyai otonomi sendiri atau mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan sendiri sehingga tidak lagi mengikuti aturan dari pemerintah daerah secara langsung. Desa sebagai daerah otonom tentu saja memiliki pemerintahan sendiri namun tetap berada dibawahnya kecamatan dan desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa desa dan pemerintahan desa adalah,

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2012:4), desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat mengandung pengertian bahwa otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut Ndraha (dalam Huda, 2015:55), terdapat unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain: 1) adat istiadat yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat (di) desa yang bersangkutan; 2) tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 3) sumber-sumber pendapatan desa; 4) urusan rumah tangga desa; 5) pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”; dan 6) lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”. Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul

dan juga adat istiadat desa. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 18, adapun kewenangan desa pada Pasal 19 meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa. Sedangkan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa disertai dengan biayanya. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi.

Kewenangan yang berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan suatu warisan yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat desa. Kewenangan berdasarkan asal usul ini dapat diidentifikasi dengan tiga langkah sebagai berikut; Pertama, melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa; Kedua, menginventarisir harta benda yang dimilikinya; dan ketiga menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki. Bentuk nyata tindakan

yang tergolong dalam kewenangan hak asal usul memang sangat beragam di daerah, namun secara umum hak asal usul desa mencakup:

- a. mengatur dan mengurus tanah desa atau tanah ulayat adat desa;
- b. menerapkan susunan asli dalam pemerintahan desa;
- c. melestarikan adat-istiadat, lembaga, pranata dan kearifan lokal; dan
- d. menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat.

Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa. Kewenangan lokal berskala desa ini meliputi tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan. Adanya kewenangan tersebut, maka desa berwenang dalam mengurus dan mengatur aset desa yang dimiliki.

Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati. Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak selalu sama tergantung dari kebutuhan dan keadaan masing-masing

desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan, yaitu Kepala desa;
- b. unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
 - 1) sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretariat desa,
 - 2) unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain, dan
 - 3) unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan yang dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, sedangkan perangkat desa lainnya di angkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dengan kata lain dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah yang ada di atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu juga berupaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

2.2 Keuangan Desa

Menurut Surianingrat (1992:116), “keuangan desa dapat dirumuskan sebagai penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan pemerintah desa dalam bidang keuangan”. Ada dua faktor yang mempengaruhi suksesnya kebijaksanaan tersebut. Pertama, faktor yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri pemerintah desa sendiri (seni mengadakan pendekatan pada masyarakat desa, keterampilan menetapkan pungutan desa dan melaksanakan pungutan, penyelenggaraan administrasi keuangan, kelincihan pemerintah desa dalam bidang keuangan tersebut). Kedua, ialah yang berada di luar diri dan di luar kemampuan pemerintah desa (inflasi, perubahan moneter, perkembangan ekonomi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya). Keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan nadi desa dan merupakan cermin perkembangan pemerintah desa, desa, dan masyarakat desa.

Keuangan desa dapat berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 71 ayat (1), “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut dapat menimbulkan suatu pendapatan, belanja, pembiayaan, dan

pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa baik dalam penyelenggaraan desa maupun pembangunan desa, setiap desa mempunyai sumber pendapatan desa yang berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada desa

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan. Sumber pendapatan tersebut berasal dari usaha desa dan kekayaan desa (aset desa). Setiap desa mempunyai aset desa yang beragam jenisnya, dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan aset desa adalah “barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Aset desa meliputi tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 76 ayat 2 yang termasuk aset lainnya milik desa adalah sebagai berikut.

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset desa tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa ini dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pada tata cara pengelolaan kekayaan desa yang dimiliki desa dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 ayat 2 mengenai wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa antara lain sebagai berikut.

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 ayat 1 pengelolaan kekayaan milik Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Kepala Desa juga dapat menguasakan aset desa tersebut kepada perangkat desa, yang dimaksud menguasakan disini adalah kepala desa memberikan kepercayaan kepada perangkat desa untuk mengelola aset desa tertentu kepada perangkat desa yang biasanya berupa tanah kas desa. Adapun Perangkat desa yang dikuasakan sebagian kekuasaan dari Kepala Desa dalam Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu:

- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa, mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset desa diantaranya:
 - a) meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;
 - e) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa; dan
- b. Unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa yang berasal dari Kepala Urusan, mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya:
 - a) mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c) melakukan inventarisasi aset desa; mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - d) menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Aset desa selain tanah yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, bangunan yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, namun juga aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan pemerintah desa dan juga aset desa dilarang untuk digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Pengelolaan aset desa meliputi:

- a. Perencanaan, yang dicanangkan dalam RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- b. Pengadaan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, serta diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa.
- d. Pemanfaatan, dapat dilaksanakan sepanjang tidak digunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- e. Pengamanan, dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya pengamanannya dibebankan pada APBDesa.
- f. Pemeliharaan, dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya pemeliharaan dibebankan pada APBDesa.
- g. Penghapusan, dilakukan karena terjadinya peralihan kepemilikan, pemusnahan atau sebab lainnya. Penghapusan yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.
- h. Pemindahtanganan, hal ini meliputi tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa. Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dapat dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- i. Penatausahaan, aset desa harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.
- j. Penilaian, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai peraturan perundang-undangan. Dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan

pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pengelolaan ini dilakukan agar kejelasan mengenai aset desa itu pasti, dan tidak berkurang secara kebetulan sehingga dikelola oleh pihak yang mempunyai wewenang serta tanggungjawab dalam pengelolaan aset desa ini sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Aset desa yang bermacam-macam jenisnya ini penulis mengambil satu aset desa yang berupa pasar desa yang merupakan aset atau kekayaan asli desa untuk diteliti. Karena keberadaan pasar desa tersebut sangat berguna dan bermanfaat untuk pemerintah desa maupun masyarakat desanya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82).

2.3 Pasar Desa

Secara historis, pasar berasal dari pasar fisik yang seiring akan berkembang menjadi komunitas kecil, kota dan desa. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli, sehingga di pasar para pembeli dan para penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Dapat diartikan pasar adalah suatu tempat dimana para penjual dan para pembeli melakukan interaksi (Sukirno, 2005: 40). Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran, dengan demikian sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. Namun, pasar juga dapat berperan sebagai fasilitator perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang di perdagangkan untuk

dievaluasi dan diberi harga. Sebuah pasar muncul dapat secara spontan atau sengaja yang dibangun oleh adanya interaksi antarmanusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

Pasar desa merupakan salah satu dari pasar tradisional, hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, yang menyatakan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Adapun tujuan dibentuknya suatu pasar desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Pasar desa yang sudah dibangun oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus diserahkan kepada pemerintah desa. Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembangunan dan pengembangan pasar desa didasarkan atas beberapa prinsip, antara lain; a) mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat; b) memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa; c) mengembangkan

kekayaan dan aset desa; dan d) menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Pasar desa merupakan aset desa yang dapat berkontribusi bagi pendapatan asli desa, selain itu pasar juga dapat dijadikan tempat untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli ataupun antar sesamanya sehingga keberadaan pasar tersebut secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat baik itu kepada penjual, pembeli ataupun para pegawai di pasar.

Pasar desa dapat berkontribusi dalam menambah pendapatan asli desa. Adanya siklus pasar juga yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kontribusi yang diberikan. Siklus pasar desa biasanya terjadi dalam waktu mingguan, yang mana pada setiap desa yang mempunyai pasar akan mempunyai siklus waktu pasaran yang berbeda dalam satu minggu tersebut. Adanya siklus pasar ini membuat pasar desa mengalami naik turun terkait jumlah pedagangnya, yang dapat mempengaruhi pendapatan pasar desa tersebut. Tidak sedikit para pedagang masih banyak yang melakukan kejar pasar atau berpindah dari satu pasar ke pasar lain yang sedang pasaran (pasar raya), dan biasanya pada saat terjadi pasar raya (pasaran) terjadi penambahan jumlah pedagang yang membludak hingga keluar area pasar.

Kontribusi yang berkaitan dengan pemerintah desa dapat diperoleh dari retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa beserta pengelola pasar dan para penjual yang mengikuti musyawarah di balai desa. Retribusi yang sudah dikumpulkan oleh pengelola pasar diserahkan dan dilaporkan kepada aparatur desa yang bersangkutan. Retribusi tersebut berasal dari retribusi pasar dan parkir atau lain-lain yang berada di dalam pasar desa dan juga retribusi sewa tahunan pada tempat yang dipakai oleh pedagang.

Pasar desa yang berkembang dan maju, maka akan dapat memberi pemasukan pada pendapatan desa. Pemasukan desa dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pemasukan yang di dapat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah digunakan sebagai anggaran pokok pembangunan desa dan pendapatan asli desa dapat digunakan sebagai tambahan pemasukan untuk pembangunan yang berjalan. Pembangunan tersebut dapat

berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan mendukung kegiatan masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Meskipun pasar desa dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, tetapi pasar desa mempunyai kekurangan dan kelebihan yang tidak selalu sama antara pasar yang satu dengan yang lainnya. Kelebihan pasar desa tersebut pada umumnya, antara lain:

- a. harga barang yang diperjual-belikan cukup terjangkau;
- b. barang yang diperjual-belikan dapat ditawar;
- c. barangnya beragam macamnya; dan
- d. barang yang diperjual-belikan seperti sayur, ikan, daging dan lain sebagainya masih segar-segar.

Hal tersebut yang menjadikan pasar masih berjalan hingga saat ini juga. Adapun kekurangan yang dimiliki pasar desa pada umumnya, antara lain:

- a. area tempat berjualan sempit, sumpek dan sesak diantara penjual yang satu dengan yang lainnya;
- b. jalanan di dalam pasar masih kotor atau buruk;
- c. keamanannya belum terjamin, masih sering terjadi kejahatan kriminal seperti perampokan;
- d. tidak jarang di pasar masih ada bau yang kurang sedap; dan
- e. kesehatan makanan yang diperjual-belikan kualitasnya tidak terjangkau.

Adanya kekurangan pada pasar tersebut secara bertahap pasar desa terus melakukan perbaikan baik itu terhadap sarana ataupun prasarananya agar masyarakat nyaman berbelanja di pasar, sehingga pasar desa tetap tumbuh dan tidak tergerus zaman. Adanya pasar dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat penting, oleh karena itu pasar memiliki fungsi dan peran bagi kehidupan manusia. Menurut Rosyidi (2014:404), fungsi pasar ada tiga yaitu sebagai penentu nilai, sebagai organisator produksi, dan sebagai distribusi produk. Sedangkan menurut Sudarman (1989:8), fungsi pasar ada lima yaitu pasar menetapkan nilai (*sets value*), pasar mengorganisir produksi, pasar mendistribusikan barang, pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan, dan pasar mempertahankan dan

mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapatlah disimpulkan fungsi pasar desa adalah sebagai berikut.

1. Pasar sebagai sarana pembentukan harga atau nilai.

Pasar berfungsi untuk pembentukan harga (nilai) karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Fungsi pasar sebagai pembentukan harga atau nilai ini karena terjadinya proses interaksi dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan di pasar.

2. Pasar sebagai sarana distribusi.

Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik dan sebaliknya. Pasar berfungsi untuk mempermudah penyalur barang dari produsen kepada konsumen.

3. Pasar sebagai sarana promosi.

Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan (mempromosikan) produk-produknya kepada konsumen. Karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang, meskipun tidak diundang. Promosi tersebut dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara seperti: memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran dan lain sebagainya.

Selain fungsinya yang sangat penting bagi perekonomian, pasar juga mempunyai peran yang sangat penting. Menurut Rahardja dan Purwanta (2016:177) peran pasar dalam perekonomian sebagai berikut.

1. Bagi produsen

Bagi produsen peran pasar sangat vital karena sebagai tempat untuk mempromosikan hasil produksi atau jasa mereka. Selain itu pasar juga menjadi tempat untuk memperlancar penjualan hasil produksi. Adanya pasar pembeli akan dapat dengan mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan dari produsen tanpa harus mendatangi tempat produksi.

Selain itu, pasar juga memudahkan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dalam proses produksi.

2. Bagi konsumen

Bagi konsumen, pasar juga memiliki peran yang sama penting yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Konsumen tidak perlu mendatangi tempat produksi atau pabrik untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan karena sudah ada pasar. Semakin luas pasar, maka semakin mudah bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan.

3. Bagi Pembangunan

Peran pasar bagi pembangunan adalah membantu menunjang pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar dapat memberikan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Pasar juga bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu pembangunan karena pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah juga digunakan untuk mendanai pembangunan negara.

4. Bagi sumber daya manusia

Kegiatan jual beli di pasar membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tidak sedikit. Banyak orang yang menjadikan pasar sebagai tempat mereka mencari uang. Semakin luas pasar, maka kebutuhan akan tenaga kerja juga akan semakin bertambah, dan permintaan tenaga kerja juga akan semakin banyak. Pasar juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran, membuka lapangan kerja baru, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 110 dijelaskan bahwa “Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.” Kekayaan yang dimiliki desa telah dijelaskan diatas bahwa salah satunya

adalah pasar desa, dan pengelolaan pasar desa itu dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Tujuan dibentuknya pasar desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa Pasal 4 dan fungsi serta peran pasar dapat diketahui bahwa pasar desa dapat bermanfaat atau berguna bagi masyarakat desa, dan juga bagi pemerintah desa dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, masyarakat Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo dapat memanfaatkan dan pemerintahan desa juga dapat meningkatkan pendapatan asli desanya.

Penarikan retribusi pasar yang diberlakukan di ketiga desa yaitu Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan Desa Grajagan untuk penjual dan parkir masih terbilang relatif murah yang berkisar antara Rp 1000 sampai Rp 2000 dilakukan pada saat hari pasaran (operasional pasar) maupun tidak. Saat pasaran dan penarikan yang berbeda tarifnya itu biasanya terjadi saat hari biasa dan menjelang hari lebaran, biasanya pasaran saat menjelang lebaran tarif retribusi terjadi kenaikan. Bukan hanya tarif retribusinya yang naik tetapi jumlah pengunjung dan penjualnya pun terbilang cukup banyak dan padat dan untuk kios maupun toko biasanya ditarik retribusinya setiap satu bulan sekali dan besarnya penarikan disesuaikan dengan luas lahan yang dipakai.

Penjual maupun pembeli yang berada dalam pasar desa tersebut tidak semuanya berasal dari satu desa saja, melainkan ada yang dari desa lain bahkan kecamatan lain. Pasar Desa Purwoharjo mempunyai penataan dagangan dengan cara membuat blok-blok yang disesuaikan dengan barang dagangannya dan pasarnya beroperasi setiap hari, dan pasar rayanya pada hari kamis. Pasar Desa Grajagan masih belum tertata, namun telah dirembukkan tetapi pelaksanaan penataannya sulit dilakukan. Pasar Desa Grajagan beroperasi juga setiap hari dan pasar rayanya pada hari sabtu. Sedangkan pasar Desa Karetan juga sudah tertata berdasarkan dagangannya, namun pasar desa ini hanya beroperasi pada hari selasa saja dalam seminggu.

Penataan dagangan di pasar Purwoharjo dilakukan menurut hasil wawancara dengan Pj. Purwoharjo bertujuan agar para pembeli lebih mudah dan

nyaman dalam mencari dan membeli yang mereka butuhkan, sehingga mereka hanya perlu menyusuri blok dagangan sesuai yang mereka cari. Secara tidak langsung, hal tersebut merupakan suatu kemudahan bagi para pembeli dalam berbelanja, selain itu pembeli juga dalam berbelanja dapat lebih efisien waktu dan dengan tertatanya barang dagangan tersebut dan juga membuat pasar menjadi lebih rapi dan teratur. Penataan itu juga dapat mengatasi para penjual musiman dalam membuka lapak di blok yang tidak sesuai dengan barang dagangannya. Walaupun terkadang juga masih ada yang memanfaatkan lahan seperti jalan dan pintu masuk pasar, yang membuat pasar terlihat lebih padat.

Kebersihan dan keamanan merupakan salah satu prioritas utama dalam pasar desa. Kebersihan yang dilakukan pengelola tersebut selain membuat para pembeli merasa nyaman juga diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang memuaskan bagi mereka yang datang di pasar tersebut. Kebersihan dilakukan di pagi hari sebelum pasaran berlangsung, pembersihan ini dilakukan pada seluruh fasilitas yang ada di dalam pasar. Pembersihan pasar juga dilakukan setelah pasaran berakhir, sehingga keadaan di dalam pasar tetap terjaga kebersihannya. Hal ini berlaku di tiga pasar desa yang ada di Kecamatan Purwoharjo.

Keamanannya di pasar Desa Purwoharjo, bagi para penjual yang menyimpan dagangannya atau yang telah menyewa gudang di dalam pasar telah diberi gerbang atau pintu pada tiap jalan masuk ke dalam pasar, pintu ini ditutup pada saat malam hari setelah pasaran berhenti dan penjual meninggalkan tempat ini. Bukan hanya diadakannya pintu pada tiap jalan masuk, tetapi juga para petugas keamanan juga bergantian berjaga untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke dalam pasar itu. Petugas keamanannya ada 4 (empat) orang, mereka di bagi menjadi 2 (dua) bagian, ada yang berjaga malam 2 (dua) orang dan berjaga pagi 2 (dua) orang juga. Keamanan di Desa Karetan masih terbilang buruk, karena tidak ada gerbang pada pintu masuknya, dan tempat penyimpanan barang dagangan juga belum ada. Sedangkan di pasar Grajagan keamanannya sudah diupayakan, dan tempat untuk menyimpan barang dagangan juga sudah di sediakan bagi mereka yang menyewa tempat penyimpanan barang.

Ketiga pasar desa tersebut mempunyai letak yang sangat strategis, dan ketiga pasar desa tersebut juga dapat dengan mudah di akses bagi masyarakat atau orang yang ingin berbelanja. Karena ke tiga pasar tersebut berada di persimpangan jalan, yang dapat dilalui dari arah barat, timur, selatan, maupun utara. Selain itu, pasar desa dari ketiga pasar ini berada di persimpangan jalan poros. Pasar dengan fasilitas yang cukup lengkap dan barang yang diperdagangkan cukup beragam tidaklah cukup. Namun, perlunya pelayanan yang baik bagi para penjual dagangan juga sangat mempengaruhi minat para pembeli. Apabila menyediakan jasa memberikan pelayanan yang baik, maka sangat mungkin pembelinya akan berbelanja dan datang lagi ketempat itu saat berbelanja di kemudian hari. Oleh karenanya pelayanan yang cepat, tepat, aman, ramah dan nyaman perlu dilakukan. Pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Cepat. Dalam hal ini pelayanan yang cepat dalam melayani pembeli akan membuat pembeli lebih meminimalkan waktunya untuk berbelanja dan mencari keperluannya lainnya. Sehingga pembeli dapat merasakan kepuasan saat belanja di tempat itu.
- b. Tepat. Cepat tanpa ketepatan pastinya tidak akan membuat pembeli merasa puas, sehingga perlunya ketepatan saat melayani pembeli.
- c. Aman. Keamanan untuk para pembeli juga menjadi hal yang sangat penting, yang mana pembeli dapat memilih dan memutuskan secara tepat barang apa saja yang mereka butuhkan tanpa ada rasa khawatir terhadap sesuatu yang aneh di sekitar tempat mereka berbelanja.
- d. Ramah. Seorang penjual harus bersikap ramah kepada pembeli agar pembeli merasa nyaman saat berbelanja, apabila penjual ramah dalam melayani pembeli dapat dipastikan barang yang diperjualkan akan lebih cepat terjual dan cepat habis. Karena seorang pembeli akan merasa puas jika penjual dapat melayaninya saat berbelanja dengan ramah.
- e. Nyaman. Jika pembeli merasa nyaman, maka pembeli akan kembali lagi berbelanja di tempat itu yang akan di jadikannya tempat langganan saat berbelanja kebutuhan yang diperjualkan ditempat itu.

Pelayanan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula karena pelayanan itu merupakan suatu tindakan yang akan membuat penerima layanan merasa dipuaskan atau tidak, sehingga mereka akan dapat menilai kepuasan mereka dari pelayanan yang didapatkannya saat pertama kali berbelanja di tempat tersebut. Pelayanan yang baik juga akan membuat para penjual dapat merasakan keberhasilannya saat berjualan, hal ini dapat mereka rasakan dengan cepat lakunya barang yang mereka dagangkan dan akan banyak pembeli yang akan berdatangan lagi menjadi seorang pelanggan di tempat mereka berjualan.

Ada banyak hal yang akan terjadi apabila pasar dikelola dengan baik, diantaranya pemasukan kas pasar akan bertambah sehingga kontribusi yang diberikan juga akan bertambah, potensi retribusi akan bertambah karena pengguna fasilitas pasar bertambah, selain itu juga pasar desa menjadi pusat perbelanjaan tradisional yang harga barangnya terjangkau dan dapat bersaing dengan pasar modern.

2.4 Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa

Kontribusi sering digunakan diberbagai kajian, makna yang terkandung di dalamnya juga cukup luas. Kontribusi dalam Kamus Bahasa Indonesia (2005), berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Sedangkan kontribusi dalam Kamus Bahasa Inggris (2008), yaitu *contribute*, *contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, maupun sumbangan. Hal ini berarti kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan. Menurut Taufikurrahman (2014:3109), kontribusi yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Anne Ahira (26:2012)

Adanya beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah bagian dari suatu aspek tertentu pada suatu hal, sehingga kontribusi pasar desa di Kecamatan Purwoharjo adalah bagian dari pasar desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang ada di Kecamatan Purwoharjo. Selain

berkontribusi terhadap pendapatan desa, pasar desa juga bermanfaat atau berguna bagi pengguna pasar baik sebagai pedagang maupun pembeli yang berada di pasar desa tersebut. Manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), berarti guna; faedah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat pasar desa kepada masyarakat desa berarti adanya suatu kegunaan atau kebergunaan pasar desa tersebut bagi masyarakat desa. Keberadaan pasar desa tersebut berguna bagi mereka yang berdagang maupun yang berbelanja di pasar desa tersebut baik dari dalam maupun luar desa pada masing-masing pemanfaat atau pengguna pasar desa tersebut. Kebermanfaatan pasar desa tersebut bagi masyarakat desa dapat berupa lapangan pekerjaan yang mana mereka dapat bekerja sebagai pegawai pasar ataupun pegawai di pertokoan pasar sehingga adanya pasar desa tersebut dapat menyerap tenaga kerja juga, kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan sebagai tempat menjual produk dan hasil pertanian masyarakat desa setempat.

Pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa yang memberikan kontribusi dari hasil pelayanan, pemanfaatan dan pengelolaan yang ada di pasar desa baik terhadap pemasukan pendapatan desa maupun masyarakat desa. Kontribusi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pasar desa memberikan sumbangan kepada pemerintah desa dalam menambah atau meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desanya. Penyerahan hasil dari pengelolaan pasar desa ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mantri pasar (ketua pengelola pasar desa) dengan apatur desa yang bersangkutan. Aparatur desa yang bersangkutan adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur pembangunan, dan bendahara desa. Akan tetapi, pada masing-masing desa yang menangani pasar desa dari pemerintah desa berbeda-beda.

Pada saat penarikan retribusi kepada para penjual meskipun sudah di sepakati masih terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi antar penjual dan penarik retribusi (mantri pasar) antara lain:

- a. para penjual masih sepi pembeli;
- b. para penjual belum mendapatkan pemasukan; dan
- c. masih adanya lapak yang tidak beroperasi saat pasaran.

Hal tersebut menjadi kendala dalam merealisasi target yang telah ditentukan antara penjual dan mantri pasar. Pasar Desa Purwoharjo dan Grajagan para mantri pasar dapat menambah penyerahannya dari retribusi lainnya yang ada di pasar desanya sehingga realisasinya sesuai seperti yang sudah ditargetkan. Tetapi untuk pasar Desa Karetan yang hanya beroperasi sehari dalam seminggu sangat sulit untuk merealisasi target tersebut sehingga realisasinya tidak penuh atau tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Selain hambatan yang muncul dari para penjual dan mantri pasar hambatan lain yang muncul dari pemerintahan desa, hambatan itu antara lain:

- a. pemerintah desa tidak memberikan ketegasan kepada mantri pasar mengenai waktu penyerahan hasil pasar desa;
- b. pengawasan terhadap pasar desa kurang efektif; dan
- c. tidak adanya pelatihan mengenai pengelolaan pasar desa yang baik.

Hambatan tersebut terjadi pada tiga desa yang dipilih karena itu pihak pemerintahan desa secara terus-menerus harus melakukan perbaikan untuk kedepannya. Untuk pengelolaan pasar desa di setiap desa pengoperasi pasar desa telah disesuaikan dengan kebutuhannya dan kemampuan finansial pasar desanya guna memaksimalkan pengeluaran untuk biaya operasional pasar desa tersebut. Pasar Desa Purwoharjo pengelola pasar terdiri dari kepala pasar, petugas parkir, petugas keamanan dan petugas jaga keamanan pasar. Pasar Desa Karetan dan Desa Grajagan terdiri dari kepala pasar, petugas kebersihan dan petugas parkir. Meskipun petugas pasar telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadi pemborosan dalam pengeluaran untuk para pekerja pasarnya, pemborosan itu dapat berupa gaji yang dibayarkan pada petugas pasar; dana anggaran untuk pembangunan pasar; belanja operasional pasar; dan pengeluaran tak terduga.

Terjadi pemborosan biasanya dikarenakan dalam pasar desa pencatatan dan penatausahaan keuangan kas pasar belum teradministrasikan, sehingga untuk pemasukan yang diperoleh saat pengoperasian pasar desa tersebut tidak tercatat. Hal tersebut yang menyebabkan pasar desa terus bergantung pada kebijakan yang

diberikan oleh pemerintah desa dalam pembangunan maupun pengembangan pasar desa. Selain itu juga pengelola pasar dapat bertindak semauanya karena pemerintah desa juga tidak dapat terus mengawasi gerak-gerik para pengelola pasar dalam mengelola pasar desa tersebut. Saat penyerahan hasil retribusi pasar, aparatur yang bertugas menangani seperti kepala desa memberikan masukan kepada mantri pasar untuk kemajuan pasar desa dan hal ini dilakukan secara musyawarah dan terbuka sehingga antara aparatur yang bersangkutan dengan pengelola pasar terjalin keterbukaan mengenai keuangan pasar desa. Kontribusi yang diberikan itu berasal dari retribusi atas los, kios, bango maupun tenda yang digunakan oleh para penjual ataupun retribusi dari sewa tempat seperti pada bangunan pertokoan maupun ruko. Kontribusi yang berasal dari pasar desa adalah keuntungan bersih yang dihasilkan pasar desa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain berkontribusi pada pendapatan asli desa, pasar desa juga berkontribusi bagi masyarakat desa yang tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial budaya.

Pasar desa pada masing-masing desa yang dipilih mempunyai pengaturan yang berbeda-beda terkait pengelolaannya. Untuk pasar Desa Purwoharjo pasar desa di atur dalam Peraturan Desa Purwoharjo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa Purwoharjo Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi dengan, kemudian pasar Desa Karetan yang di atur dalam Peraturan Desa Karetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pasar Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo, dan pasar Desa Grajagan yang di atur dalam Peraturan Desa Grajagan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Curahjati Desa Grajagan. Baik Desa Purwoharjo, Desa KAREtan, maupun Desa Grajagan mempunyai landasan hokum salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Desa dalam menguatkan peraturan desanya.

2.5 Penelitian Terdahulu

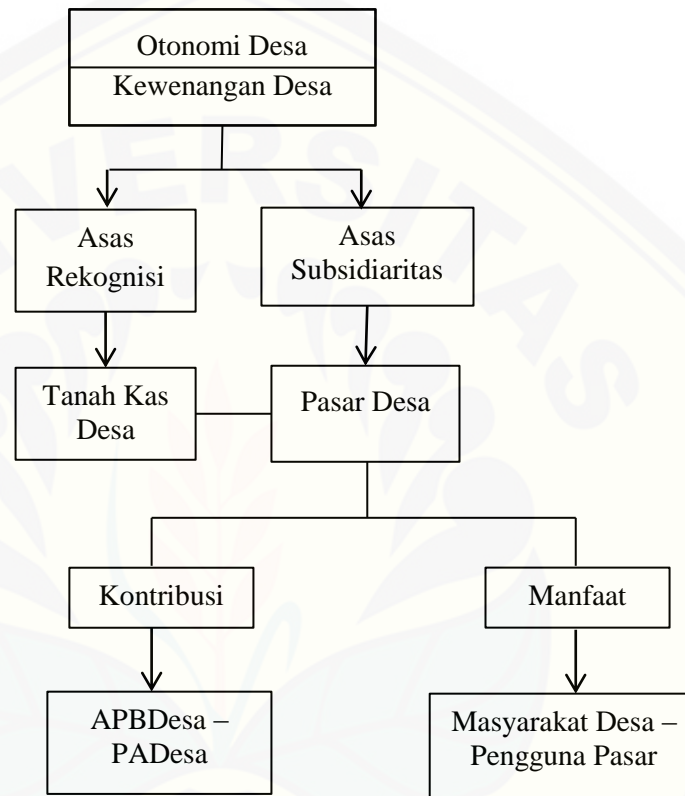
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Judul Penelitian	Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo	Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Banyumanik)	Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda
Tahun	2012	2013	2016
Penulis	Nur Anisa Megawati, Ady Soejoto	Dewi Azimah, Dra. Rina Martini, M.Si, Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si.	Dharma Hammam Nur Mubarok
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> Berapa potensi retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo? Berapa kontribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo? Berapa prospek penerimaan retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo di masa yang akan datang? 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kontribusi pasar tradisional dan pasar modern terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang? Bagaimana mekanisme kontribusinya? Regulasi apa saja yang mengatur pasar tradisional dan pasar modern di Kota Semarang? 	Seberapa besar potensi pasar dan kontribusi maupun prospeknya serta faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pelayanan pasar agar mampu melampaui nilai target retribusinya?
Metode Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Kuantitatif
Hasil Penelitian	Potensi retribusi pasar berbeda jauh dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selisihnya mencapai Rp 4.537.202.71,25. Kontribusi terhadap PAD sangat kurang dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya hanya sebesar 1,82%. Kemudian prospek penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015-	Pasar tradisional di wilayah Kecamatan Banyumanik berkontribusi terhadap PAD Kota Semarang sebesar Rp 364.128.420,00. Pada tahun 2011 sedangkan pasar modern tidak diketahui. Pasar tradisional berkontribusi melalui retribusi pasar yang dipungut setiap hari dan setiap bulan,	Pada analisis pertama, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada, analisis kedua, kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau

	2023 terjadi peningkatan yang positif dengan <i>slop</i> yang tidak terlalu curam.	sedangkan pasar modern berkontribusi melalui retribusi perijinan sebelum mendirikan pasar modern, yakni melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO). Namun karena dalam perijinannya pengusaha pasar modern menggunakan nama pribadi dan tidak menggunakan nama usahanya, sehingga tidak diketahui besarnya kontribusi yang berasal dari pasar modern. Hal ini belum bisa diatasi oleh Pemerintah Kota Semarang karena tidak ada Perda yang mengatur pasar modern.	mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya, dan analisis yang ketiga, prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.
Persamaan dengan penelitian		Metode penelitiannya	
Perbedaan dengan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitiannya b. Tempat penelitiannya c. Fokus penelitiannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus penelitiannya b. Tempat penelitiannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode Penelitiannya b. Tempat penelitiannya c. Fokus Penelitiannya

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang dirangkai oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian untuk menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi pasar desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara secara ilmiah untuk mendapatkan data dan menganalisis atau menggunakan data tersebut sesuai kebutuhan. Berdasarkan metode penelitian ada empat kunci dalam melakukan penelitian yaitu secara ilmiah (sesuai dengan prinsip penelitian yang meliputi rasional, empiris, dan sistematis), data, tujuan dan kegunaannya. Sugiyono (2008:2) menyatakan metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan reliabel dengan tujuan yang dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih, dan prosedur serta alat yang digunakan harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Nazir (1988:51) menyatakan, metode penelitian memandu si peneliti tentang urutan *bagaimana* penelitian dilakukan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan langkah-langkah yang sistematis. Bab metode penelitian ini menguraikan beberapa sub-sub bab yang meliputi;

- a. Pendekatan Penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Penyajian Data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai dengan penjelasan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang kontribusi dan manfaat pasar desa pada tiga pasar desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi tersebut berkaitan dengan pemerintahan desa dan manfaat yang dimaksudkan berkaitan dengan masyarakat desa sebagai pengguna pasar baik itu pedagang maupun pembeli yang berada di pasar khususnya dari dalam desa dan umumnya dari luar desa tersebut. Tiga pasar desa tersebut berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di pasar Desa Purwoharjo, pasar Desa Karetan dan pasar Desa Grajagan, dan di tiga Kantor Desa yang berada di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih Kecamatan Purwoharjo sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Belum ada penelitian di Kecamatan Purwoharjo mengenai kontribusi dan manfaat pasar desa pada tiga pasar desa di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

- b. Pasar desa di Kecamatan Purwoharjo ada yang menjadi juara pertama dalam kompetisi pengelolaan pasar desa tingkat Kabupaten dan menjuarai terbaik tiga dalam kompetisi Pengelolaan Pasar Desa se-Jawa Timur tahun 2016 yaitu Pasar Desa Purwoharjo.
- c. Ketiga pasar desa yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan pengelolaan pasar desanya yang sudah mulai tertata se-Kecamatan Purwoharjo. Selain itu juga karena ketiganya dikelola oleh Pemerintah Desa.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli–September 2017.

3.3 Situasi Sosial

Situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

3.3.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan di tiga pasar desa Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Pasar desa yang dipilih adalah pasar desa di Desa Purwoharjo yang berada di ujung utara dari Kecamatan Purwoharjo, kemudian Desa Karetan yang ada di pertengahan Kecamatan Purwoharjo, dan di Desa Grajagan yang berada paling ujung selatan di Kecamatan Purwoharjo.

3.3.2 Pelaku

Pihak-pihak yang terlibat pada kontribusi dan manfaat pasar desa di Kecamatan Purwoharjo ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pengelola Pasar Desa, Penjual dan Pembeli yang berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan di Desa Grajagan.

3.3.3 Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa Kecamatan Purwoharjo dilakukan di Balai Desa dan di

dalam pasar di Desa Purwoharjo, Karetan dan Desa Grajagan di Kecamatan Purwoharjo. Aktivitas yang dilakukan berupa:

- a. Pertemuan rutin antara pengelola pasar (mantri pasar) dengan bendahara desa di kantor desa, dan terkadang kepala desa dengan sekretaris desa juga ada dalam pertemuan tersebut baik di Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan di Desa Grajagan;
- b. Pertemuan rutin antara petugas parkir dengan bendahara desa di kantor desa yang berada di Desa Karetan dan Desa Grajagan;
- c. Pengelola pasar (mantri pasar) yang berada di Desa Purwoharjo berkeliling di dalam pasar desa dan juga menjaga tempat penitipan kendaraan, sedangkan pengelola pasar di Desa Karetan dan Grajagan berkeliling menarik biaya retribusi/partisipasi kepada para penjual di area pasar desa;
- d. Petugas parkir yang menjaga kendaraan dan menarik biaya parkir di tempat parkir di area pasar desa yang berada baik di Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan di Desa Grajagan;
- e. Kegiatan jual beli dan tawar menawar antara pedagang dan pembeli di di tiga pasar desa yaitu di Desa Purwoharjo, Desa Karetan dan di Desa Grajagan.

3.4 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52), desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sedangkan menurut Silalahi (2009), desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa yang berada

di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan desain penelitian studi kasus. Terdapat 4 tipe desain dalam penelitian studi kasus, yaitu 1) desain kasus tunggal holistik; 2) desain kasus tunggal terjalin (*embedded*); 3) desain multikasus holistik; 4) desain multikasus terjalin (Yin, 2015:46). Terkait penelitian ini, desain penelitian studi kasus yang digunakan adalah tipe-4 yaitu desain multikasus terjalin yang berarti desain tersebut mengandung banyak kasus dan banyak unit analisisnya. Banyak kasus yang dimaksudkan adalah kasus terhadap tiga pasar desa yang berbeda yaitu pasar Desa Purwoharjo, pasar Desa Karetan, dan pasar Desa Grajagan. Sedangkan yang dimaksud unit analisis banyak yaitu terkait kontribusi dan manfaat pasar desa.

3.4.1 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif mempunyai batasan masalah yang menjadi suatu fokus penelitian secara umum yang disebut fokus penelitian. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian (Moleong, 2007:94). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kontribusi dan manfaat pasar desa pada tiga pasar desa yang berada di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi dimaksudkan terhadap pemerintahan desa yang berkaitan dengan pendapatan asli desa, dan manfaat pasar desa tersebut berkaitan dengan masyarakat desa sebagai pengguna pasar baik sebagai pedagang maupun pembeli yang berada di pasar khususnya yang berasal dari dalam desa dan umumnya yang berasal dari luar desa tersebut.

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif menekankan pada interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, karena penelitian ini bersifat mendalam sehingga perlu melibatkan banyak pelaku. Pelaku disini berkaitan dengan informan yang akan dimintai informasi ataupun data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informan merupakan pihak yang dapat memberikan informasi secara

mendalam tentang keadaan pasar beserta permasalahan yang ada dan berkaitan di dalamnya sehingga peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan. Peneliti mengidentifikasi dan memilih informan yang mengacu pada kriteria dalam memilih sampel awal yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal dengan mengutip pendapatnya Spradly (dalam Sugiyono, 2014:221) kriteria tersebut adalah:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang memiliki cukup banyak waktu atau aktif untuk dimintai informasi.

Penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *pusposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Menurut Silalahi (2012:272), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:53), *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber data.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

1. Kasi Pembinaan Pasar Tradisional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
2. Kasi Pasar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa di Desa Karetan dan Kepala Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;

4. Sekretaris Desa di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
5. Petugas Pasar Desa selaku Pengelola Pasar Desa (Mantri Pasar) Purwoharjo, Pasar Desa Karetan, dan Pasar Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
6. Petugas Pasar Desa selaku Pengelola Parkir Pasar Desa (Mantri Parkir) Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
7. Petugas Pasar Desa selaku Penarik Retribusi Pasar Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
8. Petugas Penitipan Kendaraan Pasar Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
9. Pedagang di Pasar Desa Purwoharjo, Pasar Desa Karetan, dan Pasar Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi; dan
10. Pembeli di Pasar Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

3.4.3 Sumber Data

Data dalam penelitian sangatlah penting, tanpa adanya data yang tersedia sebuah penelitian tidak dapat dilakukan. Menurut Arikunto (1998:114), yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber yang meliputi.

1. Data primer, merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan, dan diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dengan survei lapangan. Data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, dan wawancara.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data ini

diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, yang mana data sekunder ini dapat memberikan keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi terkait kontribusi dan manfaat adanya pasar desa.

3.4.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2010:24), teknik dan alat perolehan data adalah uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan dalam memperoleh data. Suatu instrumen yang baik akan menghasilkan data yang baik pula, sehingga instrumen ini mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penelitian. Penggunaan instrumen penelitian berkaitan dengan teknik apa yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan fakta yang sesuai dengan masalah penelitian. Bungin (2015:142) menyatakan, metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.

Observasi yang dilakukan adalah observasi pasif, dalam hal ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang ada hanya mengamati perilaku individu yang berkaitan di dalamnya guna memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan peneliti terkait kontribusi pasar desa. Hasil observasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 22 Maret 2017, observasi kegiatan di tiga pasar desa yang tidak sedang hari raya pasaran dan ke Kantor Desa

Karetan dan Kantor Desa Grajagan untuk observasi keadaan sekaligus melakukan wawancara dengan Kepala Desanya.

- 2) Tanggal 4 Juli 2017, observasi ke pasar Desa Karetan yang sedang berlangsung hari raya pasaran dan pasar Desa Grajagan yang tidak sedang berlangsung hari raya pasaran.
- 3) Tanggal 6 Juli 2017, observasi ke pasar Desa Purwoharjo saat berlangsungnya hari raya pasaran dan ke pasar Desa Karetan yang tidak sedang berlangsung hari raya pasaran.
- 4) Tanggal 8 Juli 2017, observasi saat hari raya pasaran di pasar Desa Grajagan dan ke pasar Desa Karetan juga ketika bukan hari raya pasaran.
- 5) Tanggal 10 Agustus 2017, observasi pasar Desa Grajagan dan pasar Desa Karetan yang sedang tidak hari pasaran, dan pasar Desa Purwoharjo pada saat hari pasaran.
- 6) Tanggal 11 Agustus 2017, observasi keadaan pasar Desa Purwoharjo.
- 7) Tanggal 15 Agustus 2017, observasi pasar Desa Karetan yang sedang hari pasaran dilanjutkan wawancara.
- 8) Tanggal 17 Agustus 2017, observasi pasar Desa Purwoharjo saat hari pasaran dan dilanjutkan melakukan kegiatan wawancara.
- 9) Tanggal 19 Agustus 2017, observasi ke tiga pasar desa dan di pasar Desa Purwoharjo dan pasar Desa Grajagan dilanjutkan dengan kegiatan wawancara.
- 10) Tanggal 31 Agustus 2017, observasi di pasar Desa Purwoharjo yang sedang hari pasaran dan pasar Desa Karetan.
- 11) Tanggal 02 September 2017, observasi pasar Desa Grajagan yang sedang hari pasaran.
- 12) Tanggal 04 September 2017, observasi pasar Desa Purwoharjo.
- 13) Tanggal 05 September 2017, observasi dan wawancara di pasar Desa Karetan.

14) Tanggal 04 Februari 2018, observasi ke pasar Desa Karetan.

15) Tanggal 06 Februari 2018, observasi ke pasar Desa Purwoharjo dan Grajagan.

Observasi tersebut dilakukan antara jam 08.00 pagi sampai dengan jam 02.00 siang, dan pasar yang sedang pasaran dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi tersebut berupa melihat keadaan kantor desa saat melayani, kegiatan kantor desa saat ada acara, kemudian melihat keadaan pasar desa, kegiatan yang berlangsung saat terjadi proses jual beli, kegiatan pasar saat tidak beroperasi, dan kegiatan pasar di saat hari pasaran.

2. Wawancara.

Bungin (2015:133) menyatakan, metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami seseorang atau subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Wawancara tersebut dilakukan selama periode penelitian maupun sebelum dilakukan penelitian, adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut.

1. Tanggal 22 Maret 2017, wawancara dengan Kepala Desa Karetan yakni Bapak Gimo Purwoko dan juga kepada Kepala Desa Grajagan yakni Bapak Supriyono.
2. Tanggal 11 Juli 2017, wawancara dengan Kasi Pasar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yakni Bapak Edi.
3. Tanggal 14 Juli 2017, wawancara dengan Kasi Pembinaan Pasar Tradisional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak Suhernaji.

4. Tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan Sekretaris Desa di Desa Karetan dan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak Sumarno dan Bapak Guntaris.
5. Tanggal 11 Agustus 2017, wawancara dengan Sekretaris Desa di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak Susianto.
6. Tanggal 15 Agustus 2017, wawancara dengan para pedagang di Pasar Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Ibu Indun Juwariyah, Rofiatun, dan ibu Sutini. Dan juga wawancara dengan petugas pasar desa selaku Pengelola Pasar Desa (Mantri Pasar) Karetan yakni Bapak Sujimin.
7. Tanggal 17 Agustus 2017, wawancara dengan para pedagang di Pasar Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Ibu Napsiatun, Irah, Khusnul, dan Bapak Muhammad Yusuf. Dan juga wawancara dengan petugas pasar desa selaku Pengelola Pasar Desa (Mantri Pasar) Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak Suyanto.
8. Tanggal 19 Agustus 2017, wawancara dengan para pedagang di Pasar Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Ibu Legi Puryanti, Wiwin, Katemi.
9. Tanggal 19 Agustus 2017, wawancara dengan petugas pasar desa selaku Pengelola Pasar Desa (Mantri Pasar) Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak Meseni. Dan juga wawancara dengan Pengelola Parkir Pasar Desa (Mantri Parkir) Grajagan yakni Bapak Mulyono.
10. Tanggal 31 Agustus 2017, wawancara dengan para pedagang di Pasar Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Ibu Sundiyem, Senimah, Bapak Mukhsin,

dan Bapak Hadi Nuryanto. Penarik Retribusi Pasar Desa Purwoharjo yakni Bapak Petrus Simanjutak.

11. Tanggal 02 September 2017, wawancara dengan para pedagang di Pasar Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Ibu Paenah, Purwati, dan Bapak Saman.
12. Tanggal 02 September 2017, wawancara dengan para Pembeli di Pasar Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni ibu Ratemi, Jeminah, Sulastri, dan ibu Shinta.
13. Tanggal 04 September 2017, wawancara dengan para pedagang di Pasar Desa Purwoharjo yakni Ibu Liswati dan Bapak Hanny. Dan juga wawancara dengan para pembeli di Pasar Desa Purwoharjo yakni ibu Siti, Yuliati, dan ibu Nur.
14. Tanggal 05 September 2017, wawancara dengan petugas penitipan kendaraan pasar Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak Sujarno. Dan juga wawancara dengan para pembeli di Pasar Desa Karetan yakni Ibu Suprihatin, Dewi, dan ibu Wati.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan mengambil dokumen, catatan atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut berupa Peraturan Desa tentang Pasar Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, profil desa di masing-masing desa yang dipilih, profil pasar desa di masing-masing desa yang dipilih, foto-foto kegiatan wawancara di kantor desa dan pasar desa di masing-masing desa yang dipilih, dan foto-foto struktur organisasi pemerintahan desa di masing-masing desa yang dipilih.

3.4.5 Menguji Keabsahan Data

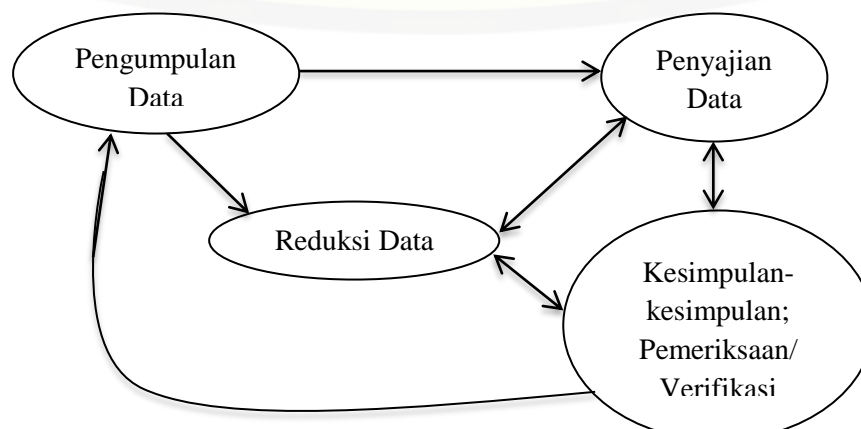
Menguji keabsahan data dilakukan agar data yang di dapat bisa dipertanggungjawabkan karena memiliki derajat kepercayaan yang memadai. Hal

ini disebabkan validitas dalam penelitian sangat penting untuk menjaga agar penelitian bersifat ilmiah dan memiliki reabilitas yang tinggi. Menurut Moleong (2014:327) pemeriksaan keabsahan data dalam kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dapat dilakukan dengan teknik: perpanjangan keikut-sertaan; ketekunan pengamatan; triangulasi; pengecekan sejawat; kecukupan referensial; kajian kasus negatif; dan pengecekan anggota. Sedangkan menurut Sugiyono (2015:270) uji kredibilitas (derajat kepercayaan) dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *membercheck*.

Berdasarkan uji kredibilitas tersebut dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan keikut-sertaan/perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:273), terdapat tiga model triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data (teknik), dan waktu. Berdasarkan tiga model triangulasi tersebut peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data (teknik) yang dilakukan dengan cara mengecek data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi, atau hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumentasi, atau hasil dokumentasi dengan hasil observasi dan wawancara.

3.4.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2014:280), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Huberman.



- Pengumpulan Data

Pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa (Idrus, 2009:148). Penelitian kualitatif bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga segala sesuatu yang diperoleh dari melihat, mendengar dan juga yang diamati. Data juga dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian/pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah dan juga lainnya yang dapat dijadikan data/ informasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang *guna* menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran yang melintas kembali dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

3.5 Teknik Penyajian Data

Hasil analisis data disajikan secara gabungan antara informal dan formal. Informal, yaitu penguraian dalam deskripsi kata-kata (naratif) dan juga disajikan data formal berupa tabel dan gambar.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang kontribusi pasar desa di tiga pasar desa yakni di Desa Purwoharjo, Desa Karetan, dan Desa Grajagan di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kontribusi pasar desa di Desa Purwoharjo terhadap pendapatan asli desa terus mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada prosentasenya, tetapi dari segi nominalnya mengalami penurunan di tahun 2015 yakni pada tahun 2014 sebesar Rp 83.809.000,00 menjadi Rp 83.396.000,00. Dari segi manfaat keberadaan pasar Desa Purwoharjo tersebut memudahkan masyarakat desa Purwoharjo dalam memenuhi kebutuhannya, mendatangkan investor dari dalam maupun luar desa, dapat dijadikan tempat bekerja, dapat dijadikan tempat menjual dagangan, dan dapat menyerap tenaga kerja.
2. Kontribusi pasar Desa Karetan terhadap pendapatan asli desa di Desa Karetan terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 baik dari segi nominal maupun prosentasenya, yaitu dari Rp 18.600.000,00 dengan prosentase 15,2% menjadi Rp 16.000.000,00 dengan prosentase 10,1%. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan mengalami kenaikan baik dari nominal maupun prosentasenya yaitu sebesar Rp 17.200.000,00, dengan kenaikan prosentase 0,6% sehingga menjadi 10,7%. Terkait manfaat keberadaan pasar desa tersebut lebih banyak menarik investor dari luar desa, akan tetapi masyarakat desa tidak dapat memanfaatkan secara efektif keberadaan pasar desa tersebut. Meskipun begitu dapat memudahkan masyarakat desa setempat dalam memenuhi kebutuhan mingguannya dengan berbelanja di pasar.
3. Kontribusi pasar desa terhadap pendapatan asli desa di Desa Grajagan pada tahun 2012 sampai tahun 2014 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp 26.500.000,00. Pada tahun 2015 kontribusi pasar desa sebesar Rp 37.545.000,00 dan tahun 2016 menjadi Rp 39.000.000,00. Prosentase

pada tahun 2012–2014 sama yakni 9,5%, tahun 2015 naik menjadi 13,2%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan drastis menjadi 7,1%. Keberadaan pasar desa tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam desa maupun luar Desa Grajagan. Mereka dapat berjualan dan berbelanja di pasar tersebut, dapat bekerja di pasar desa tersebut, dapat menjual hasil panen mereka, dan lain sebagainya.

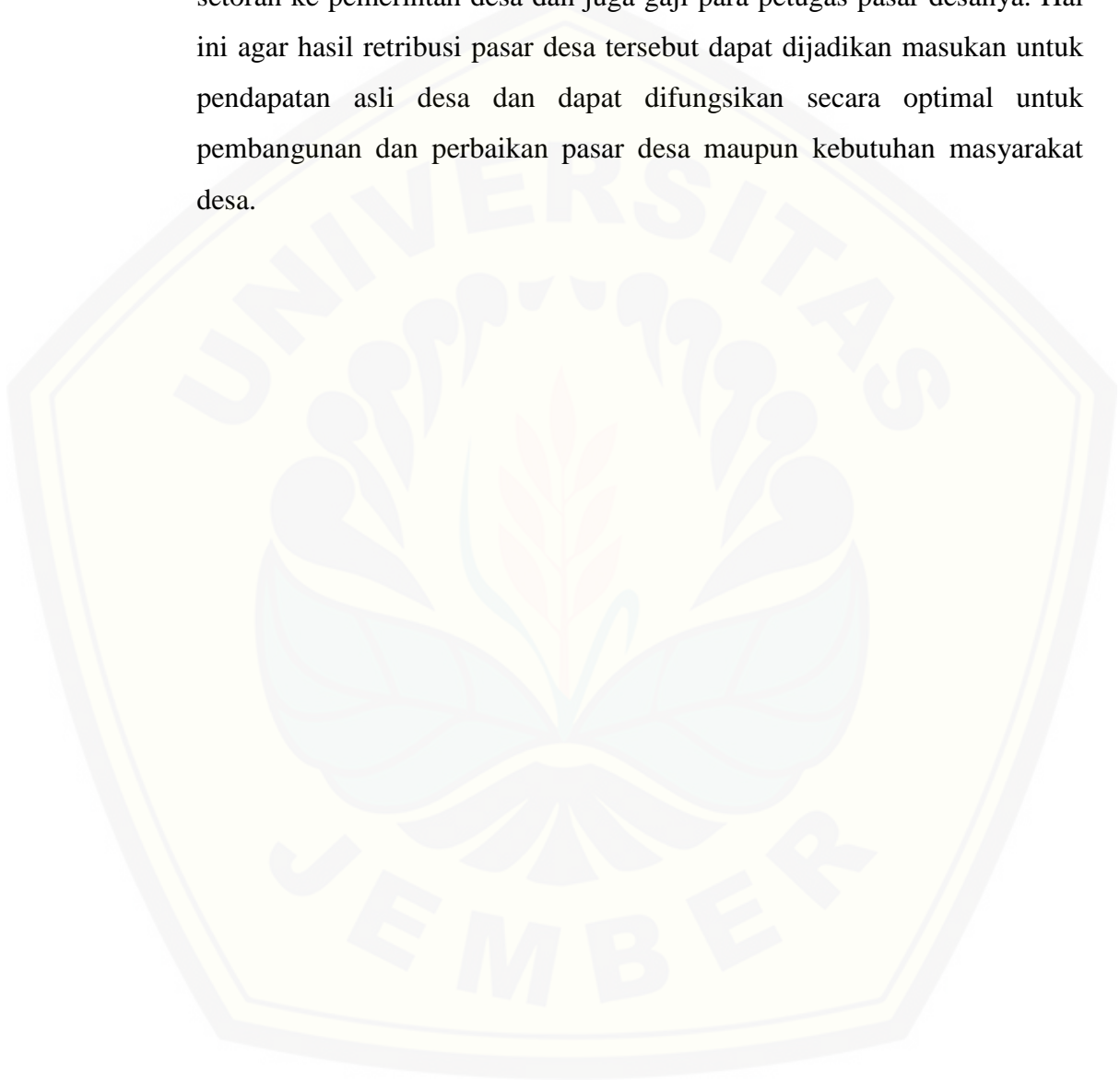
4. Pasar Desa Purwoharjo terkait kontribusi yang diberikan pada nominalnya bersifat fluktuatif, namun pada prosentasenya terus mengalami kenaikan. Untuk pasar Desa Karetan terkait kontribusinya baik pada nominal ataupun prosentasenya bersifat fluktuatif. Sedangkan pasar Desa Grajagan terkait kontribusi nominalnya mengalami kenaikan, namun prosentasenya bersifat fluktuatif. Kontribusi pasar desa terhadap pendapatan asli desa di masing-masing desa berada di urutan ketiga setelah hasil dari sewa tanah kas desa dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong yang merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan asli desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran terkait dengan kontribusi dan manfaat pasar desa di tiga pasar desa pada masing-masing desa yang diteliti di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah hendaknya segera membuat peraturan daerah mengenai pasar desa agar pasar desa kedudukannya juga lebih jelas lagi, dan dapat lebih berkembang ke depannya.
2. Pemerintah daerah mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai bagaimana pengelolaan pasar desa yang baik dan secara mendalam.
3. Pemerintah desa terus melakukan perbaikan pasar, agar pasar mampu bersaing dengan pasar tradisional lainnya.

4. Pemerintah desa memberikan sosialisasi, pengarahan serta pelatihan kepada para petugas pasar terkait pengelolaan pasar agar lebih baik dan maju.
5. Untuk keuangan pasar desa, seharusnya diatur lagi agar lebih tegas tentang setoran ke pemerintah desa dan juga gaji para petugas pasar desanya. Hal ini agar hasil retribusi pasar desa tersebut dapat dijadikan masukan untuk pendapatan asli desa dan dapat difungsikan secara optimal untuk pembangunan dan perbaikan pasar desa maupun kebutuhan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Echols, J. M. & Shadily, H. 2008. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- K. Yin, Robert. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Milles, M. & Huberman, M. A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Erlangga.
- Rahardja, P. & Purwanta, W. 2016. *Ekonomi*. Bandung: Yrama Widya.
- Rosyidi, Suherman. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarman, Ari. 1989. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2013. *Buku Ajar Ekonomi Mikro*. Jember: Pustaka Radja.
- Supartomo, C. 1986. *Ekonomi Mikro Ikhtisar dan Latihan Soal Pilihan Berganda*. Jakarta: PT Gramedia.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjaja, A.W. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Buku Terbitan Lembaga

- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Widodo, Musikal, Puspawijaya, Siregar. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Artikel dalam Jurnal Ilmiah

- Azimah, D., Martini, R., dan Manar, D. G. 2013. *Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011 (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyumanik)*. Journal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 (2): 1-10.
- Megawati, N. H., dan Soejoto, A. 2012. *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal. Vol. 1 (1): 1-10.
- Mubarok, D. H. N. 2016. *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Journal. Vol. 18 (2): 95-110.
- Taufikurrahman. 2014. *Kontribusi Retribusi Pemanfaatan Lahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 (4): 3105-3018.

Internet

Data Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. 2018.

<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>. [diakses pada 11 September 2017]

Data Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. 2018.

<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html>. [diakses pada 12 September 2017]

Data Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. 2018.

<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html>. [diakses pada 12 September 2017]

Ratyh. 2017. 5 Peran Pasar dalam Perekonomian Masyarakat.

<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/publik/peran-pasar-dalam-perekonomian>. [diakses pada 11 April 2017]

Yovi, M. 2014. Pengertian Pasar.

<http://woocara.blogspot.com/2016/01/pengertian-pasar-jenis-jenis-pasar-fungsi-pasar.html#ixzz4dtF5uHRp>. [diakses pada 11 April 2017]



LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

DESA

Pasal 1 sampai Pasal 66 mengenai Ketentuan Umum,
Kedudukan dan Jenis, Kewenangan Desa,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 71 sampai Pasal 77 mengenai Keuangan Desa
dan Aset Desa

Lampiran 6.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 42 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 1 sampai Pasal 12 mengenai Ketentuan Umum,
Pembentukan, Pembangunan dan
Pengembangan, Pengelolaan dan Keuangan

Lampiran 6.3 Peraturan Desa Purwoharjo Nomor 03 Tahun 2010



PERATURAN DESA

PERATURAN DESA PURWOHARJO NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA PURWOHARJO KEC. PURWOHARJO KAB. BANYUWANGI

Pasal 1 sampai Pasal 12 mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Tujuan, Pembentukan Pasar Desa, Pembangunan dan Pengembangan, Pengelolaan Pasar Desa, Keuangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi

Lampiran 6.4 Peraturan Desa Karetan Nomor 07 Tahun 2016



**DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN
BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA KARETAN NOMOR 07
TAHUN 2016**

TENTANG

**PASAR DESA
DESA KARETAN KECAMATAN
PURWOHARJO**

Pasal 1 sampai Pasal 12 mengenai Ketentuan Umum, Pengelolaan, Ketentuan Pengenaan Retribusi, Perlindungan, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan

Lampiran 6.5 Peraturan Desa Grajagan Nomor 01 Tahun 2014



PERATURAN DESA

PERATURAN DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR CURAHJATI DESA GRAJAGAN

Pasal 1 sampai Pasal 20 mengenai Ketentuan Umum, Pembentukan, Pembangunan dan Pengembangan, Pengelolaan, Keuangan, Perlindungan, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan

Lampiran 6.6 Profil Pasar Desa Purwoharjo

PROFIL PASAR DESA



NAMA PASAR : PASAR DESA PURWOHARJO
DESA : PURWOHARJO
KECAMATAN : PURWOHARJO
KABUPATEN : BANYUWANGI

PROFIL PASAR DESA

Nama pasar desa : PASAR DESA PURWOHARJO
Desa : Purwoharjo
Kecamatan : Purwoharjo
Kabupaten : Banyuwangi

I. Tanah / Lahan Pasar Desa

1. Status kepemilikan: MILIK PEMDES
Berikan keterangan singkat, contoh sbb (Milik Pemdes/tanah kas desa, sebagian milik pemdes, tidak milik pemdes) *
2. Luas lahan pasar desa : 10.000 M²
Luas bangunan pasar bangunan : 8.000 M²
3. Posisi/ letak strategis pasar desa: JALAN PROVINSI

II. Landasan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Desa

	Uraian	Nomor	Tanggal
a.	Perda	-	-
b.	Perbup	-	-
c.	Perdes	03	01 Maret 2010
d.	SK Kades	188/14/429.513.05/2011	10 Januari 2011
e.	Musdes	-	-
f.	Lainnya	-	-

*) Lampirkan bukti dokumennya.

III. Organisasi Pasar Desa

1. Landasan Kerja Organisasi

No	Landasan Kerja Organisasi	Ada / Tidak	
1	AD/ART Pasar Desa	Ada	-
2	Struktur Organisasi	Ada	-
3	Organisasi termuat di RPJMDesa	-	Tidak
4	Program Kerja	-	Tidak
5	Anggaran biaya operasional/program kerja dialokasikan dlm APBDesa	-	Tidak
6	Dll	-	-

*) lampirkan bukti dokumennya.

2. Kepengurusan Pasar Desa

No	Nama	Jabatan	Pend.	Pekerjaan	Kontak	Pertemuan pengurus
1	Suyanto	Pengelola	SMP	Wiraswasta	082 141 409 784	2 kali
2	Sutarno	Jaga Malam	SD	-	-	-
3	Jumali	Jaga Malam	SD	-	-	-
4	Wawan	Kebersihan	SD	-	-	-
5	Petrus	Kebersihan	SD	-	-	-
6	Dll	-	-	-	-	-

*) Lampirkan bukti dokumen legalitas pengurus pasar desa

3. Kemitraan

Nama Lembaga	Dana Kemitraan	Jangka Waktu Kerjasama
-	-	-
-	-	-
-	-	-

*) Lampirkan bukti dokumennya

IV. Administrasi Pasar Desa

No	Uraian	Ada / Tidak Ada	Terisi Tertib	Tidak Tertib Administrasi
1	Buku Administrasi Pengelolaan Keuangan	Ada	-	
2	Buku Administrasi Pengelolaan	Ada	-	
3	Buku Inventaris Aset Pasar	Ada	-	
4	Buku Administrasi Kinerja	-	-	
5	Buku Administrasi Umum	-	-	
6	Buku Tamu	Ada	-	
7	Buku Daftar Pedagang	Ada	-	
8	Tempat Arsip/Filling Cabinet	-	-	
9	Papan Struktur Organisasi	Ada	-	
10	Papan Informasi	Ada	-	
11	Lainnya:	-	-	

*) Lampirkan bukti dokumennya

V. Pengelolaan Pasar Desa

- 1) Sistem kepemilikan took/kios : SEWA (sewa, beli hak guna pakai, sewa hbg dgn pihak lain)
(lampirkan bkti kontrak/sewa)
- 2) Besaran gaji/honor/insentif pengelola : Rp 450.000/bulan
- 3) Sumber pendapatan pasar desa berasal dari :
 - a) Alokasi ADD/APBDesa : Rp 0
 - b) Kontrak ruko/toko : Rp 48.145.000;
 - c) Sewa kios : Rp 2.925.000;
 - d) Retribusi pedagang : Rp 25.200.000;
 - e) Retribusi toilet : Rp 2.400.000;
 - f) Retribusi parkir : Rp 8.100.000;
 - g) Papan reklame : Rp 0
- 4) Mekanisme alokasi pendapatan pengelolaan pasar desa SELURUH PENDAPATAN MASUK PADesa
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
 - Keuntungan bersih (pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan kegiatan) masuk sebagai PADesa
 - Seluruh pendapatan masuk PADesa
 - Tidak ada yang masuk PADesa
 - dll
- 5) Alokasi pemanfaatan pendapatan pasar desa:

- a. BOP Pasar Desa termasuk honor/ intensif pengelola pasar : 5%
 - b. Perawatan aset desa : 10%
 - c. Pengembangan infrastruktur : 20%
 - d. PAD Desa : 65%
 - e. Kegiatan sosial :%
 - f. Dll :%
- 6) Perlibatan pemanfaatan pasar kepada lingkungan masyarakat sekitar:
PERLIBATAN PENGELOLA SEPENUHNYA
 (sertakan bukti dan berikan keterangan singkat), contoh sbb:
- Perlibatan pengelolaan sepenuhnya
 - Perlibatan sebagian
 - Tidak ada perlibatan dengan masyarakat
- 7) Kerjasama dengan pihak ketiga :
- Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Untuk pengembangan infrastruktur
 - Untuk promosi pasar
 - Untuk pengembangan SDM pengelola & pedagang
 - Untuk sanitasi & kebersihan pasar
 - dll
- 8) Kegiatan santunan sosial :
- Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Dianggarkan pertahun
 - Kadang-kadang dianggarkan
 - dll
- 9) Waktu operasional pasar: TIAP HARI
- 10) Sebutkan beberapa inovasi pengembangan/pengelolaan Pasar Desa:
BAKSO PURWOHARJO

VI. Pedagang, komoditas barang dagangan & akses permodalan

1. * Jumlah pedagan : 253 Orang
 * Asal pedagang : DI ATAS 50% BERASAL DARI DESA PURWOHARJO
 Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
 - Di atas 50% berasal dari desa ybs
 - 25% - 50% berasal dari desa ybs
 - Kurang dari 25% berasal dari desa ybs
2. Organisasi pedagang: (missal: koperasi pedagang, paguyuban pedagang, dll)

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	Kontak Person/ HP
1	-	-	-	-

*) lampirkan bukti dokumennya.

3. Jumlah komoditas barang dagangan: LENGKAP
(sebutkan jenis komoditas mis: sembako, sayur, daging, dll)
Sembako, sayur, daging, pakaian anak-anak dan dewasa, makanan, sepeda dan motor dan hewan.
4. Akses permodalan dagang: BANK PEMERINTAH/ SWASTA

VII. Infrastruktur Pasar Desa

1. Bangunan Pasar Desa
 - a. Jumlah Toko/Ruko lantai I : 46 Unit
Jumlah Toko/Ruko lantai I yang difungsikan : 46 Unit
Jumlah Toko/Ruko lantai II : Unit
Jumlah Toko/Ruko lantai II yang difungsikan : Unit
 - b. Jumlah kios : 43 Unit
Jumlah kios yang difungsikan : 43 Unit
 - c. Jumlah los/blok : 50 Unit
Jumlah los/blok yang difungsikan : 35 Unit
 - d. Jumlah lapak : 25 Unit
Jumlah lapak yang difungsikan : 25 Unit
 - e. Jumlah pedagang lesehan :158 Orang
2. Kantor Pasar
 - a. Keberadaan Kantor Pasar Desa: ADA DI SEBELAH BARAT PASAR
 - b. Fasilitas Kantor Pasar

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Kantor pasar	Ada
b	Meja dan Kursi	Ada
c	Almari Arsip	Ada
d	Brangkas	Tidak ada
e	Komputer	Tidak ada
f	Printer	Tidak ada
g	Mesin Tik	Tidak ada
h	Dll	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

3. Sanitasi Pasar

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Kamar mandi/toilet	Ada
b	Saluran pembuangan air	Ada
c	Sumber air bersih	Ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

4. Pengelolaan Sampah

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Tempat sampah	Ada

b	Gerobak sampah	Ada
c	Pembuangan sampah sementara	Ada
d	Pengolahan sampah	Tidak ada
e	Petugas sampah	Ada
f	Mekanisme pengolahan sampah	Tidak ada
g	Dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

5. Tempat Parkir

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Lahan parkir	Ada
b	Tempat bongkar muat	Tidak ada
c	Pengolaan pasar	Ada
d	dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

6. Tempat ibadah dalam Pasar Desa: ADA

7. Keamanan Pasar Desa

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Pos keamanan	Ada
b	Perlengkapan keamanan	Ada
c	Pemadam kebaran	Ada
d	Papan daftar jaga	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

8. Sarana Informasi

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Papan informasi	Ada
b	Loud speaker/ toa	Tidak ada
c	Dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

9. Sarana pasar hewan: TIDAK ADA

VIII. Peran Pemerintah Kabupaten/ Desa dan Partisipasi Masyarakat

1. Peran Pemerintah Kabupaten

a. Alokasi Anggaran Pemkab untuk Pasar Desa

- Tahun 2012 Rp.....
- Tahun 2013 Rp.....
- Tahun 2014 Rp.....
- Tahun 2015 Rp.....

b. Fasilitas Pemkab untuk Pasar Desa:

2. Peran Pemerintah Desa

a. Program Pengembangan Pasar Desa yang sudah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

- Rp 24.450.000; untuk kegiatan PAVINGISASI
- Rp 25.000.000; untuk kegiatan PERBAIKAN TALANG

- Rp 17.744.000; untuk kegiatan DRAINASE PASAR
 - Rp 20.350.000; untuk kegiatan TOILET PASAR DESA
 - Rp 6.456.200; untuk kegiatan PEMBANGUNAN KANTOR KEAMANAN KANTOR DESA
- b. Fasilitas Pemdes untuk Pasar Desa:
3. Partisipasi Masyarakat Pedagang atau Pihak lain
- a. Jumlah Sumbangan Dana.

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
a. Dari masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
b. Dari pedagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
c. Pihak lain	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

- b. bentuk partisipasi lain: TIDAK ADA

IX. Lampiran Foto-foto pendukung dan dokumen lainnya

Purwoharjo, 20 Agustus 2017

Mengetahui,

Pj. Kepala Desa

Ketua Pengelola Pasar Desa

Drs. Ponirin

Suyanto

Pengatur

NIP. 196407162007011017

Lampiran 6.7 Profil Pasar Desa Karetan

PROFIL PASAR DESA



NAMA PASAR : PASAR SARANA NIAGA
DESA : KARETAN
KECAMATAN : PURWOHARJO
KABUPATEN : BANYUWANGI

PROFIL PASAR DESA

Nama pasar desa : PASAR SARANA NIAGA

Desa : Karetan

Kecamatan : Purwoharjo

Kabupaten : Banyuwangi

I. Tanah / Lahan Pasar Desa

1. Status kepemilikan: MILIK PEMDES/TANAH KAS DESA

Berikan keterangan singkat, contoh sbb (Milik Pemdes/tanah kas desa, sebagian milik pemdes, tidak milik pemdes) *

2. Luas lahan pasar desa : 6.364 M²

Luas bangunan pasar bangunan : 360 M²

3. Posisi/ letak strategis pasar desa: DEKAT PEREMPATAN, JALAN PROVINSI, DAN POLSEK

II. Landasan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Desa

	Uraian	Nomor	Tanggal
a.	Perda	-	-
b.	Perbup	-	-
c.	Perdes	07	02 Januari 2017
d.	SK Kades	141/7/429.513.8/2016	30 Desember 2016
e.	Musdes	-	-
f.	Lainnya	-	-

*) Lampirkan bukti dokumennya.

III. Organisasi Pasar Desa

1. Landasan Kerja Organisasi

No	Landasan Kerja Organisasi	Ada / Tidak	
1	AD/ART Pasar Desa	-	Tidak
2	Struktur Organisasi	Ada	-
3	Organisasi termuat di RPJMDesa	Ada	-
4	Program Kerja	Ada	-
5	Anggaran biaya operasional/program kerja dialokasikan dlm APBDesa	Ada	-
6	Dll	-	-

*) lampirkan bukti dokumennya.

2. Kepengurusan Pasar Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan	Kontak	Pertemuan pengurus
1	Sujimin	Pengelola	SLTP	Wiraswasta	-	1 kali
2	Sujarno	Anggota	SLTP	Wiraswasta	-	
3	dst	-	-	-	-	-

*) Lampirkan bukti dokumen legalitas pengurus pasar desa

3. Kemitraan

Nama Lembaga	Dana Kemitraan	Jangka Waktu Kerjasama
-	-	-
-	-	-
-	-	-

*) Lampirkan bukti dokumennya

IV. Administrasi Pasar Desa

No	Uraian	Ada / Tidak Ada	Terisi Tertib	Tidak Tertib Administrasi
1	Buku Administrasi Pengelolaan Keuangan	Ada	Terisi	-
2	Buku Administrasi Pengelolaan	Ada	Terisi	-
3	Buku Inventaris Aset Pasar	Ada	-	-
4	Buku Administrasi Kinerja	Tidak ada	-	-
5	Buku Administrasi Umum	Tidak ada	-	-
6	Buku Tamu	Tidak ada	-	-
7	Buku Daftar Pedagang	Ada	-	-
8	Tempat Arsip/Filling Cabinet	Tidak ada	-	-
9	Papan Struktur Organisasi	Tidak ada	-	-
10	Papan Informasi	Tidak ada	-	-
11	Lainnya:	-	-	-

*) Lampirkan bukti dokumennya

V. Pengelolaan Pasar Desa

- 1) Sistem kepemilikan toko/kios : SEWA (sewa, beli hak guna pakai, sewa hbg dgn pihak lain)
(lampirkan bkti kontrak/sewa)
- 2) Besaran gaji/honor/insentif pengelola : Rp 300.000/bulan
- 3) Sumber pendapatan pasar desa berasal dari :
 - a) Kontrak ruko/toko : Rp
 - b) Sewa kios : Rp
 - c) Partisipasi/swadaya pedagang : Rp 3.200.000/tahun
 - d) Partisipasi toilet : Rp
 - e) Partisipasi parkir : Rp 500.000/tahun
 - f) Papan reklame : Rp
- 4) Mekanisme alokasi pendapatan pengelolaan pasar desa **SELURUH PENDAPATAN MASUK PADesa**
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
 - Keuntungan bersih (pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan kegiatan) masuk sebagai PADesa
 - Seluruh pendapatan masuk PADesa
 - Tidak ada yang masuk PADesa
 - dll
- 5) Alokasi pemanfaatan pendapatan pasar desa:

- a) BOP Pasar Desa termasuk honor/ intensif pengelola pasar :%
- b) Perawatan aset desa :%
- c) Pengembangan infrastruktur :%
- d) PAD Desa :%
- e) Kegiatan sosial :%
- f) Dll :%
- 6) Perlibatan pemanfaatan pasar kepada lingkungan masyarakat sekitar:
(sertakan bukti dan berikan keterangan singkat), contoh sbb:
- Perlibatan pengelolaan sepenuhnya
 - Perlibatan sebagian
 - Tidak ada perlibatan dengan masyarakat
- 7) Kerjasama dengan pihak ketiga :
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Untuk pengembangan infrastruktur
 - Untuk promosi pasar
 - Untuk pengembangan SDM pengelola & pedagang
 - Untuk sanitasi & kebersihan pasar
 - dll
- 8) Kegiatan santunan sosial :
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Dianggarkan pertahun
 - Kadang-kadang dianggarkan
 - dll
- 9) Waktu operasional pasar: HARI SELASA
- 10) Sebutkan beberapa inovasi pengembangan/pengelolaan Pasar Desa:

VI. Pedagang, komoditas barang dagangan & akses permodalan

1. * Jumlah pedagang : 147 Orang
* Asal pedagang : LUAR DESA KARETAN/ kurang dari 25% yang berasal dari desa ybs
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Di atas 50% berasal dari desa ybs
 - 25% - 50% berasal dari desa ybs
 - Kurang dari 25% berasal dari desa ybs
2. Organisasi pedagang: (missal: koperasi pedagang, paguyuban pedagang, dll)

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	Kontak Person/ HP
1	-	-	-	-

*) lampirkan bukti dokumennya.

3. Jumlah komoditas barang dagangan: LENGKAP
(sebutkan jenis komoditas mis: sembako, sayur, daging, dll)

Sembako, sayur, daging, ikan, buah-buahan, cabe, bawang merah, bawang putih, pakaian anak-anak dan dewasa, makanan, barang perca dan hewan.

4. Akses permodalan dagang: BUMDES, UED-SP, BANK PEMERINTAH, BKD

VII. Infrastruktur Pasar Desa

1. Bangunan Pasar Desa

- a) Jumlah Toko/Ruko lantai I : 23 Unit
 Jumlah Toko/Ruko lantai I yang difungsikan : 15 Unit
 Jumlah Toko/Ruko lantai II : Unit
 Jumlah Toko/Ruko lantai II yang difungsikan : Unit
- b) Jumlah kios : 3 Unit
 Jumlah kios yang difungsikan : 3 Unit
- c) Jumlah los/blok : 41 Unit
 Jumlah los/blok yang difungsikan : 27 Unit
- d) Jumlah lapak : 13 Unit
 Jumlah lapak yang difungsikan : 13 Unit
- e) Jumlah pedagang lesehan : 126 Orang

2. Kantor Pasar

- a. Keberadaan Kantor Pasar Desa: TIDAK ADA
- b. Fasilitas Kantor Pasar

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
A	Kantor pasar	Tidak ada
B	Meja dan Kursi	Tidak ada
C	Almari Arsip	Tidak ada
D	Brankas	Tidak ada
E	Komputer	Tidak ada
F	Printer	Tidak ada
G	Mesin Tik	Tidak ada
H	Dll	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

3. Sanitasi Pasar

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
A	Kamar mandi/toilet	Ada
B	Saluran pembuangan air	Ada
C	Sumber air bersih	Ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

4. Pengelolaan Sampah

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
A	Tempat sampah	Ada
B	Gerobak sampah	Ada
C	Pembuangan sampah sementara	Ada

D	Pengolahan sampah	Tidak ada
E	Petugas sampah	Ada
F	Mekanisme pengolahan sampah	Tidak ada
G	Dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

5. Tempat Parkir

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
A	Lahan parkir	Ada
B	Tempat bongkar muat	Tidak ada
C	Pengolaan pasar	Ada
D	dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

6. Tempat ibadah dalam Pasar Desa:

7. Keamanan Pasar Desa

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
A	Pos keamanan	Tidak ada
B	Perlengkapan keamanan	Tidak ada
C	Pemadam kebaran	Tidak ada
D	Papan daftar jaga	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

8. Sarana Informasi

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Papan informasi	Tidak ada
b	Loud speaker/ toa	Tidak ada
c	Dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

9. Sarana pasar hewan: TIDAK ADA

VIII. Peran Pemerintah Kabupaten/ Desa dan Partisipasi Masyarakat

1. Peran Pemerintah Kabupaten

a. Alokasi Anggaran Pemkab untuk Pasar Desa

- Tahun 2013 Rp.....
- Tahun 2014 Rp.....
- Tahun 2015 Rp 108.000.000; untuk kegiatan PAVINGISASI
- Tahun 2016 Rp.....

b. Fasilitas Pemkab untuk Pasar Desa: JALAN PAVINGISASI PASAR DESA KARETAN

2. Peran Pemerintah Desa

a. Program Pengembangan Pasar Desa yang sudah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

- Rp 15.450.000; untuk kegiatan PAVINGISASI
- Rp untuk kegiatan

Lampiran 6.8 Profil Pasar Desa Grajagan

PROFIL PASAR DESA



NAMA PASAR : PASAR DESA CURAHJATI
DESA : PURWOHARJO
KECAMATAN : PURWOHARJO
KABUPATEN : BANYUWANGI

PROFIL PASAR DESA

Nama pasar desa : PASAR DESA CURAHJATI
Desa : Grajagan
Kecamatan : Purwoharjo
Kabupaten : Banyuwangi

I. Tanah / Lahan Pasar Desa

1. Status kepemilikan: MILIK PEMDES
Berikan keterangan singkat, contoh sbb (Milik Pemdes/tanah kas desa, sebagian milik pemdes, tidak milik pemdes) *
2. Luas lahan pasar desa : 7.500 M²
3. Luas bangunan pasar bangunan : 2.500 M²
4. Posisi/ letak strategis pasar desa: TERLETAK DI DEKAT JALAN KABUPATEN YANG MENGHUBUNGKAN ANTARA DESA GLAGAHAGUNG. KARETAN DAN DESA SUMBERASRI

II. Landasan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Desa

	Uraian	Nomor	Tanggal
a.	Perda	-	-
b.	Perbup	-	-
c.	Perdes	01	29 Desember 2014
d.	SK Kades	-	-
e.	Musdes	-	-
f.	Lainnya	-	-

*) Lampirkan bukti dokumennya.

III. Organisasi Pasar Desa

1. Landasan Kerja Organisasi

No	Landasan Kerja Organisasi	Ada / Tidak	
1	AD/ART Pasar Desa	Ada	-
2	Struktur Organisasi	Ada	-
3	Organisasi termuat di RPJMDesa	Ada	-
4	Program Kerja	Ada	-
5	Anggaran biaya operasional/program kerja dialokasikan dlm APBDesa	Ada	-
6	DII	-	-

*) lampirkan bukti dokumennya.

2. Kepengurusan Pasar Desa

No	Nama	Jabatan	Pend.	Pekerjaan	Kontak	Pertemuan pengurus
1	Meseni	Pengelola	SMA	Wiraswasta	081 232 444 150	-
2	Dhalim	Anggota	SD	Wiraswasta	081 217 319 532	-
6	Dst	-	-	-	-	-

*) Lampirkan bukti dokumen legalitas pengurus pasar desa

3. Kemitraan

Nama Lembaga	Dana Kemitraan	Jangka Waktu Kerjasama

*) Lampirkan bukti dokumennya

IV. Administrasi Pasar Desa

No	Uraian	Ada / Tidak Ada	Terisi Tertib	Tidak Tertib Administrasi
1	Buku Administrasi Pengelolaan Keuangan			
2	Buku Administrasi Pengelolaan			
3	Buku Inventaris Aset Pasar			
4	Buku Administrasi Kinerja			
5	Buku Administrasi Umum			
6	Buku Tamu			
7	Buku Daftar Pedagang			
8	Tempat Arsip/Filling Cabinet			
9	Papan Struktur Organisasi			
10	Papan Informasi			
11	Lainnya:			

*) Lampirkan bukti dokumennya

V. Pengelolaan Pasar Desa

- 1) Sistem kepemilikan toko/kios : SEWA DAN BELI HAK GUNA PAKAI (sewa, beli hak guna pakai, sewa hbg dgn pihak lain) (lampirkan bkti kontrak/sewa)
- 2) Besaran gaji/honor/insentif pengelola : PENGELOLA Rp 850.000/bulan
: ANGGOTA Rp 600.000/bulan
- 3) Sumber pendapatan pasar desa berasal dari:
 - a) Kontrak ruko/toko : Rp
 - b) Sewa kios : Rp 9.600.000;
 - c) Partisipasi/swadaya pedagang : Rp 22.400.000;
 - d) Partisipasi toilet : Rp
 - e) Partisipasi parkir : Rp 4.000.000;
 - f) Papan reklame : Rp
- 4) Mekanisme alokasi pendapatan pengelolaan pasar desa:
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
 - Keuntungan bersih (pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan kegiatan) masuk sebagai PADesa
 - Seluruh pendapatan masuk PADesa
 - Tidak ada yang masuk PADesa
 - dll
- 5) Alokasi pemanfaatan pendapatan pasar desa:
 - a) BOP Pasar Desa :%

- b) Gaji/honor/ intensif pengelola pasar : 39.5%
- c) Perawatan aset desa :%
- d) Pengembangan infrastruktur :%
- e) PAD Desa : 60.5%
- f) Kegiatan sosial :%
- g) Dll :%
- 6) Perlibatan pemanfaatan pasar kepada lingkungan masyarakat sekitar: (sertakan bukti dan berikan keterangan singkat), contoh sbb:
- Perlibatan pengelolaan sepenuhnya
 - Perlibatan sebagian
 - Tidak ada perlibatan dengan masyarakat
- 7) Kerjasama dengan pihak ketiga :
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Untuk pengembangan infrastruktur
 - Untuk promosi pasar
 - Untuk pengembangan SDM pengelola & pedagang
 - Untuk sanitasi & kebersihan pasar
 - dll
- 8) Kegiatan santunan sosial :
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Dianggarkan pertahun
 - Kadang-kadang dianggarkan
 - dll
- 9) Waktu operasional pasar: TIAP HARI
- 10) Sebutkan beberapa inovasi pengembangan/pengelolaan Pasar Desa: POLA HIDUP BERSIH, SEHAT. (MEMBUANG SAMPAH DI GROBAK)

VI. Pedagang, komoditas barang dagangan & akses permodalan

1. * Jumlah pedagang : 233 Orang
* Asal pedagang : DI ATAS 50% BERASAL DARI DESA GRAJAGAN
Berikan keterangan singkat, contoh sbb:
- Di atas 50% berasal dari desa ybs
 - 25% - 50% berasal dari desa ybs
 - Kurang dari 25% berasal dari desa ybs
2. Organisasi pedagang: (missal: koperasi pedagang, paguyuban pedagang, dll)

No	Nama Organisasi	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	Kontak Person/ HP
1	-	-	-	-

*) lampirkan bukti dokumennya.

3. Jumlah komoditas barang dagangan: LENGKAP
(sebutkan jenis komoditas mis: sembako, sayur, daging, dll)
Sembako, sayur, daging, konveksi, ikan laut, snack dan tembakau.

4. Akses permodalan dagang:

VII. Infrastruktur Pasar Desa

1) Bangunan Pasar Desa

- a) Jumlah Toko/Ruko lantai I : 36 Unit
 Jumlah Toko/Ruko lantai I yang difungsikan : 36 Unit
 Jumlah Toko/Ruko lantai II : Unit
 Jumlah Toko/Ruko lantai II yang difungsikan : Unit
- b) Jumlah kios : 11 Unit
 Jumlah kios yang difungsikan : 8 Unit
- c) Jumlah los/blok : 34 Unit
 Jumlah los/blok yang difungsikan : 26 Unit
- d) Jumlah lapak : 30 Unit
 Jumlah lapak yang difungsikan : 30 Unit
- e) Jumlah pedagang lesehan : 25 Orang

2) Kantor Pasar

a. Keberadaan Kantor Pasar Desa: TIDAK ADA

b. Fasilitas Kantor Pasar

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Kantor pasar	Tidak ada
b	Meja dan Kursi	Tidak ada
c	Almari Arsip	Tidak ada
d	Brankas	Tidak ada
e	Komputer	Tidak ada
f	Printer	Tidak ada
g	Mesin Tik	Tidak ada
h	Dll	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

c. Sanitasi Pasar

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Kamar mandi/toilet	Ada
b	Saluran pembuangan air	Ada
c	Sumber air bersih	Ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

d. Pengelolaan Sampah

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Tempat sampah	Ada
b	Gerobak sampah	Ada
c	Pembuangan sampah sementara	Ada
d	Pengolahan sampah	Tidak ada
e	Petugas sampah	Ada
f	Mekanisme pengolahan sampah	Tidak ada
g	Dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

e. Tempat Parkir

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Lahan parkir	Ada
b	Tempat bongkar muat	Tidak ada
c	Pengolaan pasar	Ada
d	dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

f. Tempat ibadah dalam Pasar Desa: TIDAK ADA

g. Keamanan Pasar Desa

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Pos keamanan	Tidak ada
b	Perlengkapan keamanan	Tidak ada
c	Pemadam kebaran	Tidak ada
d	Papan daftar jaga	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

h. Sarana Informasi

FASILITAS		ADA / TIDAK ADA
a	Papan informasi	Tidak ada
b	Loud speaker/ toa	Tidak ada
c	Dll	

*) lampirkan bukti dokumennya.

i. Sarana pasar hewan: TIDAK ADA

VIII. Peran Pemerintah Kabupaten/ Desa dan Partisipasi Masyarakat

1. Peran Pemerintah Kabupaten

a. Alokasi Anggaran Pemkab untuk Pasar Desa

- Tahun 2013 Rp.....
- Tahun 2014 Rp.....
- Tahun 2015 Rp.....
- Tahun 2016 Rp.....

b. Fasilitas Pemkab untuk Pasar Desa:

2. Peran Pemerintah Desa

a. Program Pengembangan Pasar Desa yang sudah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

- Rp untuk kegiatan
- Rp untuk kegiatan
- Rp untuk kegiatan
- Rp untuk kegiatan
- Rp untuk kegiatan

b. Fasilitas Pemdes untuk Pasar Desa:

3. Partisipasi Masyarakat Pedagang atau Pihak lain

a. Jumlah Sumbangan Dana.

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
g. Dari masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
h. Dari pedagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
i. Pihak lain	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) lampirkan bukti dokumennya.

b. bentuk partisipasi lain: TIDAK ADA

IX. Lampiran Foto-foto pendukung dan dokumen lainnya

Grajagan, 21 Agustus 2017

Mengetahui,

Kepala Desa Grajagan

Ketua Pengelola Pasar Desa

Supriyono

Meseni

Lampiran 6.9 Peraturan Desa Purwoharjo Nomor 02 Tahun 2015

**PERATURAN DESA PURWOHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWOHARJO TAHUN 2015**



**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN**

**: PURWOHARJO
: PURWOHARJO
: BANYUWANGI**

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PURWOHARJO KECAMATAN PURWOHARJO

NOMOR

2 Tahun 2015

TANGGAL

21 April 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 DESA PURWOHARJO KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
1	PENDAPATAN DESA		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.01	Hasil Usaha Desa		
1.1.01.02	Hasil Tanah Kas Desa		
1.1.01.02.01	Hasil sewa tanah kas desa	240.600.000,00	
1.1.02	Hasil Aset Desa		
1.1.02.02	Pemakaian kekayaan desa		
1.1.02.02.12	Lapangan milik Desa	3.000.000,00	
1.1.02.03	Pasar grosir/pertokoan		
1.1.02.03.01	Retribusi ijin Pasar Hewan	600.000,00	
1.1.02.03.02	Retribusi pasar grosir / Pertokoan	25.200.000,00	
1.1.03	Hasil Swadaya,Partisipasi dan Gotong royong		
1.1.03.01	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta berupa uang		
1.1.03.01.01	Sumbangan petani pemilik sawah/tegal	87.500.000,00	
1.1.03.01.02	Sumbangan pemilik usaha/perusahaan negeri/swasta	10.000.000,00	
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.1.04.01	Pungutan Desa		
1.1.04.01.02	Pungutan pasar Desa	57.596.000,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	423.896.000,00	
1.2	Pendapatan Tranfer		
1.2.01	Dana Desa Pemerintah Pusat		
1.2.01.01	Dana Desa bersumber dari APBN		
1.2.01.01.01	Bantuan Dana Desa	310.068.000,00	
1.2.04	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
1.2.04.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten		
1.2.04.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	296.789.000,00	
	Jumlah Pendapatan Tranfer	606.867.000,00	
1.3	Pendapatan Lain-lain		
1.3.01	Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat		
1.3.01.03	Sumbangan dari pihak Ketiga		
1.3.01.03.01	Sumbangan dari persorangan	4.158.000,00	
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	4.158.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.034.911.000,00	
2	BELANJA DESA		
2.1.	Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		

Halaman : 2

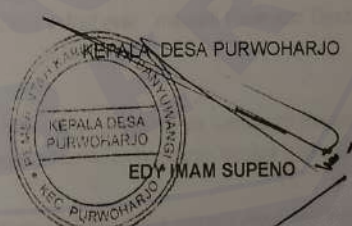
KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.1.1.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.876.000,00	
2.1.1.01.01.02	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12.120.500,00	
2.1.1.01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	74.190.000,00	
2.1.1.01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	44.514.000,00	
2.1.1.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.02.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	73.200.000,00	
2.1.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	24.500.000,00	
2.1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan	75.000.000,00	
2.1.1.02.01.05	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	50.400.000,00	
2.1.1.02.01.06	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Fungsional Umum	38.400.000,00	
2.1.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
2.1.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	921.000,00	
2.1.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD	7.200.000,00	
2.1.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD		
	Jumlah Belanja Pegawai	430.121.500,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.056.780,00	
2.1.2.01.01.04	Belanja peranko, meterai dan benda pos lainnya	450.000,00	
2.1.2.01.01.10	Belanja baliho, banner	1.500.000,00	
2.1.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.02.01.25	Belanja Jasa entry data	1.500.000,00	
2.1.2.02.01.28	Belanja Jasa pendataan	4.500.000,00	
2.1.2.03	Belanja Material		
2.1.2.03.01	Belanja Material		
2.1.2.03.01.01	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000,00	
2.1.2.04	Belanja Pemeliharaan		
2.1.2.04.01	Belanja Pemeliharaan		
2.1.2.04.01.03	Belanja Pemeliharaan godung	9.500.000,00	
2.1.2.04.01.05	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	600.000,00	
2.1.2.04.01.17	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	840.000,00	
2.1.2.04.01.23	Belanja Pemeliharaan bangunan stadion	2.000.000,00	
2.1.2.04.01.26	Belanja Pemeliharaan jaringan internet	1.120.000,00	
2.1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.05.01.01	Belanja Cetak	463.750,00	
2.1.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	447.975,00	
2.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.07.01.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	18.900.000,00	
2.1.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.572.500,00	
2.1.2.08	Belanja Pakaian		
2.1.2.08.01	Belanja Pakaian		
2.1.2.08.01.05	Belanja Pakaian batik tradisional	1.075.000,00	
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	2.865.000,00	
2.1.2.11	Belanja Honorarium		

Halaman : 3

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.1.2.11.01	Belanja Honorarium	1.650.000,00	
2.1.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI		
2.1.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.1.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	2.000.000,00	
2.1.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat		
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	102.041.005,00	
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.08	Belanja Modal pengadaan komputer	5.774.400,00	
2.1.3.08.01	Belanja Modal pengadaan komputer		
2.1.3.08.01.03	Belanja Modal pengadaan komputer notebook	1.726.600,00	
2.1.3.08.01.04	Belanja Modal pengadaan printer		
2.1.3.09	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
2.1.3.09.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan	2.800.000,00	
2.1.3.09.01.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan desa		
2.1.3.10	Belanja Modal pengadaan meubeler		
2.1.3.10.01	Belanja Modal pengadaan meubeler	10.000.000,00	
2.1.3.10.01.02	Belanja Modal pengadaan meja rapat	2.000.000,00	
2.1.3.10.01.05	Belanja Modal pengadaan kursi rapat	3.600.000,00	
2.1.3.10.01.10	Belanja Modal pengadaan kursi tunggu		
2.1.3.13	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
2.1.3.13.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio	4.622.000,00	
2.1.3.13.01.01	Belanja Modal pengadaan kamera	500.000,00	
2.1.3.13.01.10	Belanja Modal pengadaan wireless portable		
	Jumlah Belanja Modal	31.023.000,00	
2.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.2	Belanja Barang/Jasa		
2.2.2.04	Belanja Pemeliharaan		
2.2.2.04.01	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
2.2.2.04.01.19	Belanja Pemeliharaan makam		
2.2.2.14	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.2.2.14.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	4.000.000,00	
2.2.2.14.01.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	7.000.000,00	
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.24	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		
2.2.3.24.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		
2.2.3.24.01.15	Belanja Modal pengadaan konstruksi drainase	110.929.000,00	
2.2.3.24.01.16	Belanja Modal pengadaan konstruksi plongsengan	79.349.000,00	
2.2.3.34	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
2.2.3.34.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
2.2.3.34.01.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving jalan	136.466.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	329.744.000,00	
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan		
2.3.2	Belanja Barang/Jasa		
2.3.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.3.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.3.2.02.01.11	Belanja jasa keamanan	9.860.000,00	
2.3.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		

Halaman : 4

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.3.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.3.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	22.500,00	
2.3.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.3.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.3.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.477.500,00	
2.3.2.11	Belanja Honorarium		
2.3.2.11.01	Belanja Honorarium		
2.3.2.11.01.01	Honorarium PNS, TNI dan POLRI	4.800.000,00	
2.3.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW/LPMD, PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	91.226.495,00	
2.3.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
2.3.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	125.186.495,00	
2.4.	Pemberdayaan Masyarakat		
2.4.2	Belanja Barang/Jasa		
2.4.2.12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
2.4.2.12.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
2.4.2.12.01.01	Belanja Kursus singkat/ pelatihan	9.795.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	9.795.000,00	
	JUMLAH BELANJA DESA	1.034.911.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	0,00	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Desa		
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
3.1.01.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu		
3.1.01.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	147.001.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Desa	147.001.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	147.001.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	147.001.000,00	



KEPALA DESA PURWOHARJO
EDY IMAM SUPENO

Lampiran 6.10 Peraturan Desa Purwoharjo Nomor 02 Tahun 2016

**PERATURAN DESA PURWOHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWOHARJO TAHUN 2016**



**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN**

**: PURWOHARJO
: PURWOHARJO
: BANYUWANGI**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOHARJO
SEMESTER KEDUA TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH KURANG (Rp.)	REK
1	2	3	4	5	6
		1.754.896.000,00	1.754.896.000,00	-	
1	PENDAPATAN	428.054.000,00	428.054.000,00		
1 1	Pendapatan Asli Desa	327.406.000,00	327.406.000,00		
1 1 1	Hasil Usaha	240.000.000,00	240.000.000,00		
1 1 1 1	Hasil sewa tanah Kas desa 24 Ha x Rp. 10.000	63.806.000,00	63.806.000,00		
1 1 1 2	Pasar Desa	6.732.000,00	6.732.000,00		
	Toko Deretan depan utara/Blok A 259 m2 x Rp 25.000 per tahun	32.786.000,00	32.786.000,00		
	Toko Deretan depan Timur/Blok B 1.271 m2 x Rp 25.000 per tahun	2.826.000,00	2.826.000,00		
	Toko Deretan Selatan Timur 282,6 m2 x Rp 10.000 per tahun	1.480.000,00	1.480.000,00		
	Toko Deretan Selatan Barat 99 m2 x Rp 15.000 per tahun	450.000,00	450.000,00		
	Toko Deretan depan Barat 30 m2 x Rp 15.000 per tahun	1.507.000,00	1.507.000,00		
	Toko Deretan tengah Barat menghadap ke Timur 151 m2 x Rp 10.000	1.425.000,00	1.425.000,00		
	Toko Tertutup deretan dalam 95 m2 x Rp 15.000 per tahun	1.730.000,00	1.730.000,00		
	Los terbuka dalam 346 m2 x Rp 6.000 per tahun	3.270.000,00	3.270.000,00		
	Jasa Penitipan sepeda biasa 6.540 spd x Rp 500 per tahun	6.400.000,00	6.400.000,00		
	Jasa Penitipan sepeda motor 6.400 spd x Rp 1.000 per tahun	25.200.000,00	25.200.000,00		
	Retribusi Pasar Desa Rp 2.100.000 x 12 Bln	600.000,00	600.000,00		
1 1 1 3	Pasar Hewan	600.000,00	600.000,00		
	Retribusi Pasar Hewan 12 Bulan x Rp 50.000	3.000.000,00	3.000.000,00		
1 1 1 4	Bangunan Milik Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Sewa Stadion Brawijaya Purwoharjo	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Sewa Stadion Brawijaya Purwoharjo kelas A Rp 1.500.000 x 1 Akt	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Sewa Stadion Brawijaya Purwoharjo kelas B Rp 1000.000 x 1 Akt	500.000,00	500.000,00		
	Sewa Stadion Brawijaya Purwoharjo Kelas C Rp 500.000 x 1 Akt				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	96.490.000,00	96.490.000,00		
1 1 2 1	Sumbangan pemilik sawah dan tegal 864,9 ha x Rp 100.000	86.490.000,00	86.490.000,00		
1 1 2 2	Sumbangan pemilik Toko/ Pengusaha	10.000.000,00	10.000.000,00		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2 2	Bagian dan hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa	443.859.000,00	443.859.000,00		
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota Reward PBB 2014	197.053.000,00	197.053.000,00		
1 3	Pendapatan Lain-lain	4.158.000,00	4.158.000,00		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dan pajak ke-3 yang tidak meningkat	4.158.000,00	4.158.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.754.896.000,00	1.754.896.000,00		

2		BELANJA	1.769.696.000,00	1.749.696.000,00	20.000.000	90%		
2	1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	546.321.730,00	546.321.730,00	-	100%		
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	412.688.000,00	412.688.000,00	-	100%	
2	1	1	1	Belanja Pegawai:	210.488.000,00	210.488.000,00	-	100%
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa	3.320.000,00	3.320.000,00	-	100%
				- Penghasilan tetap Sekretaris Desa	27.888.000,00	27.888.000,00	-	100%
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan tetap Kepala Urusan Pemerintahan	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan tetap Kepala Urusan Keuangan	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan Kesra	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan Tetap Kepala Dusun Curahpekak	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan tetap Kepala Dusun Krajan	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan tetap Kepala Dusun Gumukrejo	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				- Penghasilan tetap staf desa	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100%
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100%
				-Tunjangan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100%
				-Tunjangan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan Pembangunan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				-Tunjangan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan Pemerintahan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				-Tunjangan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan Keuangan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan Kesra	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau penghasilan lainnya Kepala Urusan Umum	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau penghasilan lainnya Kepala Dusun Curahpekak	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau penghasilan lainnya Kepala Dusun Krajan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau penghasilan lainnya Kepala Dusun Gumukrejo	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100%
				-Tunjangan atau penghasilan Fungsional Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau penghasilan Tukang Kebun	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100%
				- Tunjangan atau penghasilan staf desa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100%
				Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100%
2	1	2	Operasional Perkantoran	126.213.730	126.213.730	-	100%	
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	33.835.880	33.835.880	-	100%
				- Alat Tulis Kantor	1.864.480	1.864.480	-	100%
				- Benda POS	450.000	450.000	-	100%
				- Cetak dan Penggandaan	661.400	661.400	-	100%
				- Belanja Baliho, Banner	1.900.000	1.900.000	-	100%
				- Rekening Majalah/Surat Kabar	3.860.000	3.860.000	-	100%
				- Belanja faximile/internet	4.800.000	4.800.000	-	100%
				- Belanja listrik	17.800.000	17.800.000	-	100%
				- Perjalanan Dinas	2.500.000	2.500.000	-	100%
2	1	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	47.541.750	47.541.750	-	100%	
				- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.926.000	2.926.000	-	100%
				- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.926.000	2.926.000	-	100%
				- Penyusunan realisasi pelaksanaan Apbdes	2.926.000	2.926.000	-	100%
				- Penyusunan RKPDes	1.357.050	1.357.050	-	100%
				- Penyusunan RAPBDes	1.357.050	1.357.050	-	100%
				- Penyusunan LKP,MLPPD	978.250	978.250	-	100%
				- Pemeliharaan rutin gedung kantor	24.500.000	24.500.000	-	100%
				- Pemeliharaan rutin jaringan internet	3.360.000	3.360.000	-	100%
				- Pemeliharaan rutin peralatan kantor	600.000	600.000	-	100%
				- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	568.000	568.000	-	100%
				- Entry Data	1.250.000	1.250.000	-	100%
				- Jasa Pendataan	2.000.000	2.000.000	-	100%
				- Musrebangdes	2.793.400	2.793.400	-	100%

2	1	2	3	Belanja Modal	41.900.500	41.900.500	-	100%
				- Komputer/Printer	9.400.000	9.400.000	-	100%
				- Pengadaan Kursi kerja	300.000	300.000	-	100%
				- Pengadaan Kursi tunggu	2.268.500	2.268.500	-	100%
				- Pengadaan tv	3.500.000	3.500.000	-	100%
				- Pengadaan ac	6.432.000	6.432.000	-	100%
				- Pengadaan backdrop ruang pelayanan	20.000.000	20.000.000	-	100%
2	1	2	4	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	7.420.000	7.420.000	-	100%
				- Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	7.420.000	7.420.000	-	100%
2	1	3		Operasional BPD	2.935.600	2.935.600	-	100%
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	2.935.600	2.935.600	-	100%
				- ATK	790.600	790.600	-	100%
				- Komsumsi Rapat	2.145.000	2.145.000	-	100%
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	913.013.500	893.013.500	20.000.000	94%
				- Pembangunan Drainase Dusun gumukrejo rt.2 rw.3	60.000.000	60.000.000	-	100%
				- Pembangunan Plengsengan Dsn gumukrejo rt.3 rw.5	50.000.000	50.000.000	-	100%
				- Pembangunan Plengsengan jalan makam Dsn gumukrejo rw.8	30.190.000	30.190.000	-	100%
				- Pembangunan Plengsengan jalan jalan kas desa curahpecak	190.440.000	190.440.000	-	100%
				- Pembangunan Plengsengan jurusan TKD rt.2 rw.5 curahpecak	45.109.500	45.109.500	-	100%
				- Pavingisasi jalan Dusun krajan Rt.03/03	27.900.000	27.900.000	-	100%
				- Pavingisasi jalan Dusun Gumukrejo Rt.01/02	40.500.000	40.500.000	-	100%
				- Pavingisasi jalan Dusun Gumukrejo Rt.02/5	10.000.000	10.000.000	-	100%
				- pembangunan atap kantor balai dusun krajan	15.000.000	15.000.000	-	100%
				- Rehab ruang pelayanan	37.369.300	37.369.300	-	100%
				- Pembangunan TPA dusun curahpecak	106.000.000	106.000.000	-	100%
				-Pembangunan Pagar Keliling Kantor Desa	187.053.000	187.053.000	-	100%
				- Pembangunan tandon air kantor desa purwoharjo	10.000.000	10.000.000	-	100%
				- Pemeliharaan bangunan stadion	2.000.000	2.000.000	-	100%
				- Pemeliharaan rumah jabatan	16.251.700	16.251.700	-	100%
				- Pemeliharaan makam di 3 dusun	15.000.000	15.000.000	-	100%
				- Rehab gedung posyandu balita dusun gumukrejo Rw.4	30.000.000	30.000.000	-	100%
				-Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	5.200.000	5.200.000	-	100%
				- Pemeliharaan gedung paud	5.000.000	5.000.000	-	100%
				- Pembangunan papan nama pasar desa	10.000.000	10.000.000	-	100%
				- Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pengembangan ekonomi produktif	20.000.000	-	20.000.000	100%
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	234.043.770	234.043.770	-	100%
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	3.500.000	3.500.000	-	100%
2	3	2		Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW,LPMD, PKK,Karang Taruna dan Lembaga Lainnya)	169.827.770	169.827.770	-	100%
				- Insentif RT/RW	117.600.000	117.600.000	-	100%
				- Penunjang kegiatan LPMD	5.081.250	5.081.250	-	100%
				- Penunjang kegiatan Karang Taruna	1.748.000	1.748.000	-	100%
				- Penunjang kegiatan PKK	5.378.520	5.378.520	-	100%
				- Insentif fullimer pkk	7.200.000	7.200.000	-	100%
				- Insentif ppxbd	7.200.000	7.200.000	-	100%
				- Tunjangan dan atau penghasilan lainnya kepala desa	25.620.000	25.620.000	-	100%
2	3	3		Pembinaan kerukunan umat beragama	43.558.000	43.558.000	-	100%
				Santunan anak yatim piatu 20 anak x Rp 200.000,00	4.000.000	4.000.000	-	100%
				Selamatan Desa dan doa bersama lintas agama	30.558.000	30.558.000	-	100%
				insentif seksi kematian 15 org x Rp 600.000	9.000.000	9.000.000	-	100%

2	3	4	Pembinaan Posyandu	17.158.000	17.158.000	-	100%
2	3	4	1 Insentif Posyandu	13.000.000	13.000.000	-	100%
2	3	2	Pemberian makanan tambahan Balita	4.158.000	4.158.000	-	100%
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	76.317.000	76.317.000	-	100%
			- Insenti KPMD 3 oranf @ Rp.300.000	1.500.000	1.500.000	-	100%
			- Pelatihan administrasi pengajuan dan pelaporan keuangan desa	2.887.500	2.887.500	-	100%
			- Sosialisasi peraturan perundang undangan	6.039.000	6.039.000	-	100%
			- Pelatihan Teknologi tepat guna	5.245.000	5.245.000	-	100%
			- Sosialisasi perlindungan ibu dan anak	9.130.000	9.130.000	-	100%
			- Pelatihan ketrampilan pengolahan barang bekas pkk desa	5.702.000	5.702.000	-	100%
			- Pelatihan ketrampilan berusaha PKH	9.982.500	9.982.500	-	100%
			- Pelatihan perakitan listrik hemat energi	14.686.000	14.686.000	-	100%
			- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	5.465.000	5.465.000	-	100%
			- Penyuluhan bagi anggota linmas persiapan tour de ijen	3.680.000	3.680.000	-	100%
			- Pemeliharaan /Pembangunan rumah tak layak huni	12.000.000	12.000.000	-	100%
2	5		Bidang Tak Terduga	-	-	-	-
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
			JUMLAH BELANJA	1.769.696.000	1.749.696.000	20.000.000	
			SURPLUS / DEFISIT	(15.000.000)	-	20.000.000	
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	15.000.000	15.000.000	-	
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				20.000.000
			JUMLAH (RP)				

Purwoharjo,
 PURWOHARJO
 KEPALA DESA
 PURWOHARJO
 NIP. 19600910 198802 1003

Lampiran 6.11 Peraturan Desa Karetan Nomor 01 Tahun 2015



**PERATURAN DESA KARETAN NOMOR 01
TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARETAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO

NOMOR : _____

TANGGAL : _____

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
1	PENDAPATAN DESA		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.01	Hasil Usaha Desa		
1.1.01.01	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)		
1.1.01.01.01	Badan Usaha Milik Desa	1.000.000,00	
1.1.01.01.04	UED-Simpan Pinjam	1.500.000,00	
1.1.01.01.05	Hasil kerjasama Desa dalam bidang	2.000.000,00	
1.1.01.02	Hasil Tanah Kas Desa		
1.01.02.01	Hasil sewa tanah kas desa	104.000.000,00	
1.01.02.02	Hasil bagi hasil tanah kas desa	7.000.000,00	
1.01.02.03	Hasil pinjam pakai tanah kas desa	16.000.000,00	
1.03	Hasil Swadaya,Partisipasi dan Gotong royong		
1.03.01	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta berupa uang		
1.03.01.01	Sumbangan petani pemilik sawah/legal	21.000.000,00	
1.03.01.02	Sumbangan pemilik usaha/perusahaan negeri/swasta	5.724.000,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	158.224.000,00	
	Pendapatan Tranfer		
01	Dana Desa Pemerintah Pusat,		
01.01	Dana Desa bersumber dari APBN		
01.01.01	Bantuan Dana Desa	302.214.000,00	
04	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
04.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten		
04.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	297.658.000,00	
06	Bantuan Keuangan Desa dari APBD Kabupaten		
06.06	Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur lainnya		
06.06.01	Bantuann reward PBB	52.960.000,00	
	Jumlah Pendapatan Tranfer	652.830.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	811.054.000,00	
	BELANJA DESA		
	Penyelenggaraan Pemerintahan		
	Belanja Pegawai		
01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
01.01.02	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	29.760.000,00	
01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	16.200.000,00	
01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	90.000.000,00	
01.01.06	Penghasilan Tetap Staf Desa lainnya	36.000.000,00	
		6.480.000,00	

Halaman : 2

1	2	4	5
KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	24.000.000,00	
1.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	12.300.000,00	
1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan	40.020.000,00	
1.1.02.01.05	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	13.800.000,00	
1.1.02.01.06	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Fungsional Umum	22.800.000,00	
1.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
1.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	3.300.000,00	
1.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD	19.320.000,00	
1.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD		
	Jumlah Belanja Pegawai	372.072.000,00	
1.2	Belanja Barang/Jasa		
1.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
1.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	8.231.000,00	
1.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
1.2.01.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya		
1.2.01.01.10	Belanja balho, banner	1.700.000,00	
1.2.02	Belanja Jasa Kantor		
1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.2.02.01.03	Belanja listrik	2.040.000,00	
1.2.02.01.04	Belanja surat kabar/majalah	1.000.000,00	
1.2.02.01.56	Belanja penggantian suku cadang	500.000,00	
1.2.02.01.57	Belanja jasa pengisian pelumas/oli	2.500.000,00	
1.2.02.01.58	Belanja surat tanda nomor kendaraan		
1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.05.01.01	Belanja Cetak	640.000,00	
1.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
1.2.06	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.2.06.01	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.2.06.01.13	Belanja Sewa sound sistem	400.000,00	
1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
1.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
1.2.07.01.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.875.000,00	
1.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.550.000,00	
1.2.08	Belanja Pakaian		
1.2.08.01	Belanja Pakaian		
1.2.08.01.01	Belanja Pakaian dinas	2.700.000,00	
1.2.08.01.05	Belanja Pakaian batik tradisional	3.000.000,00	
1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas		
1.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas		
1.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		
1.2.09.01.02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	785.000,00	
1.2.10	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	
1.2.10.01	Belanja Premi Asuransi		
1.2.10.01.01	Belanja Premi Asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.850.000,00	
1.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
1.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
1.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	68.556.000,00	
	Belanja Modal		

Halaman : 3

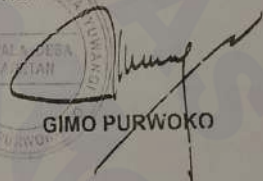
KODE LEKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
09.01.02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	7.125.000,00	
11	Belanja Honorarium		
11.01	Belanja Honorarium	2.700.000,00	
11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI		
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	73.726.900,00	
	Belanja Modal		
02	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor		
02.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor		
02.01.05	Belanja Modal pengadaan alat angkut lainnya	60.000.000,00	
07	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
07.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
07.01.03	Belanja Modal pengadaan brankas	6.000.000,00	
07.01.10	Belanja Modal pengadaan infocus	8.500.000,00	
08	Belanja Modal pengadaan komputer		
08.01	Belanja Modal pengadaan komputer		
08.01.02	Belanja Modal pengadaan komputer/PC	6.500.000,00	
08.01.03	Belanja Modal pengadaan komputer notebook	6.500.000,00	
08.01.04	Belanja Modal pengadaan printer	7.710.000,00	
08.01.06	Belanja Modal pengadaan monitor/display	3.000.000,00	
09	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
09.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
09.01.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan dasa	1.000.000,00	
0	Belanja Modal pengadaan meubeler		
0.01	Belanja Modal pengadaan meubeler		
0.01.10	Belanja Modal pengadaan kursi tunggu	4.000.000,00	
2	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga		
2.01	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga		
2.01.04	Belanja Modal pengadaan taplak	3.000.000,00	
)	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1.01.20	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian pagar gedung kantor	48.000.000,00	
1	Belanja Modal pengadaan peralatan rumah tangga		
1.01	Belanja Modal pengadaan peralatan rumah tangga		
1.01.19	Belanja Modal pengadaan perkakas pembersih	2.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	186.210.000,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	Belanja Barang/Jasa		
	Belanja Material		
01	Belanja Material		
01.01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00	
	Belanja Pakaian		
01	Belanja Pakaian		
01.01	Belanja Pakaian dinas	1.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	4.000.000,00	
	Belanja Modal		
	Belanja Modal pengadaan meubeler		
1	Belanja Modal pengadaan meubeler		
1.01	Belanja Modal pengadaan meja kerja	1.500.000,00	
	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		

DE NING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
	2	4	5
.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor	16.000.000,00	
.21	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ los pasar	110.960.000,00	
.24	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian sarana air bersih dan sanitary	8.000.000,00	
	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving jalan	36.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	172.460.000,00	
	Pembinaan Kemasyarakatan		
	Belanja Barang/Jasa		
	Belanja Barang Habis Pakai		
	Belanja Barang Habis Pakai		
.01	Belanja alat tulis kantor	770.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Belanja Cetak dan Penggandaan		
.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
.07	Belanja Sewa meja kursi	1.500.000,00	
.11	Belanja Sewa tenda	1.500.000,00	
.13	Belanja Sewa sound sistem	2.500.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman		
	Belanja Makanan dan Minuman		
.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.820.000,00	
.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	3.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas		
.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	225.000,00	
.02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	625.000,00	
	Belanja Honorarium		
	Belanja Honorarium		
.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	19.260.000,00	
	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW, LPMD, PKK dan atau Lembaga Komasyarakatan lainnya	20.800.000,00	
.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	
.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	11.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	69.600.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat		
	Belanja Barang/Jasa		
	Belanja Makanan dan Minuman		
	Belanja Makanan dan Minuman		
.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.000.000,00	
	Belanja Honorarium		
	Belanja Honorarium		
.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	2.500.000,00	
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Aparat Pemerintah Desa		
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Aparat Pemerintah Desa		
.01	Belanja Kursus singkat/ pelatihan	5.170.000,00	
	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		

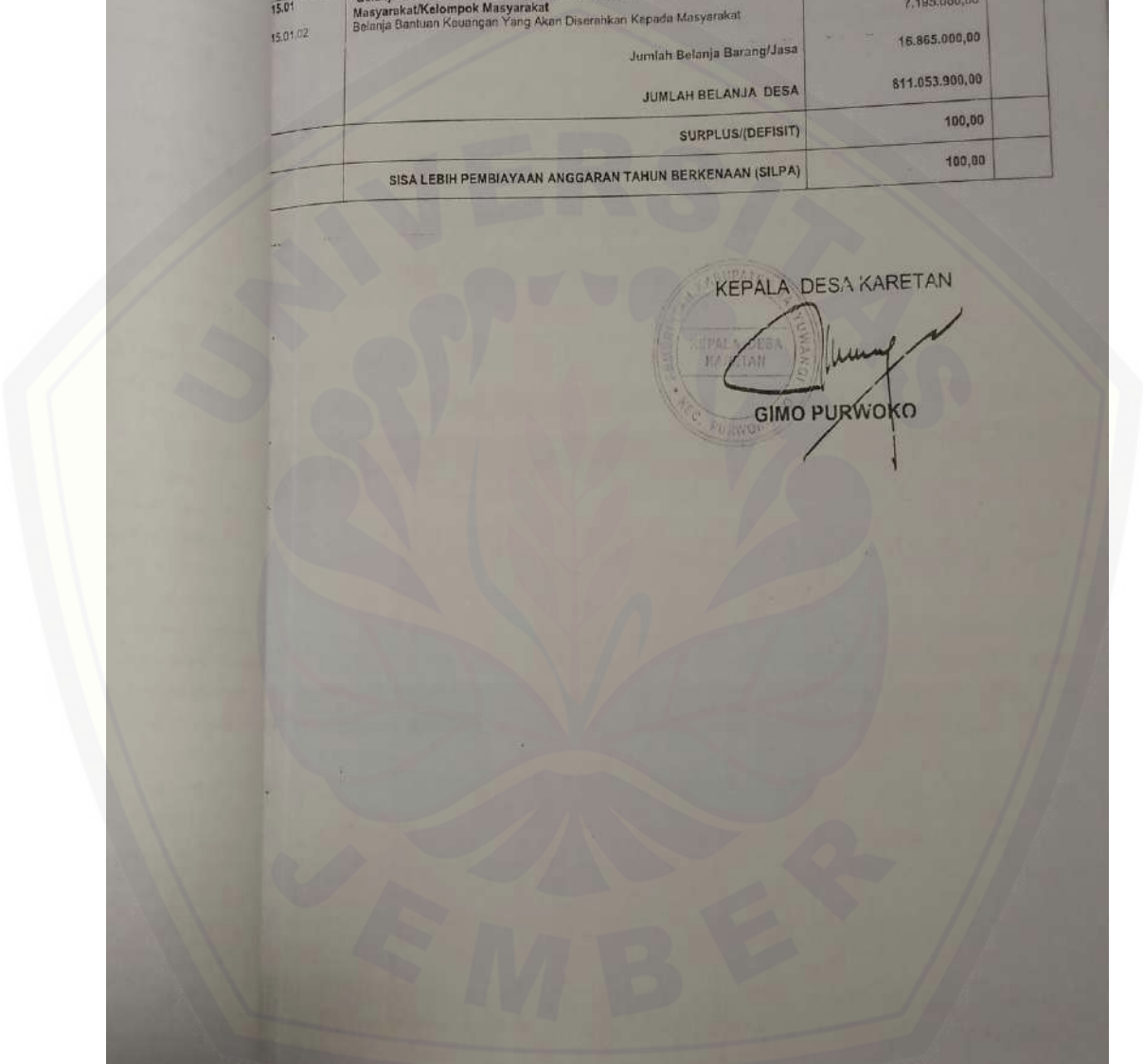
Halaman : 5

KODE EKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	7.195.000,00	
15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.865.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	811.053.900,00	
	JUMLAH BELANJA DESA		
	SURPLUS/(DEFISIT)	100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	100,00	

KEPALA DESA KARETAN



GIMO PURWOKO



Lampiran 6.12 Peraturan Desa Karetan Nomor 01 Tahun 2016



**PERATURAN DESA KARETAN NOMOR 01
TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARETAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

**KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO

NOMOR : 1 Tahun 2016

TANGGAL : 26 Januari 2016

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
	PENDAPATAN DESA		
	Pendapatan Asli Desa		
01	Hasil Usaha Desa		
01.01	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)		
01.01.01	Badan Usaha Milik Desa	2.000.000,00	
01.01.04	UED-Simpan Pinjam	1.500.000,00	
01.01.05	Hasil kerjasama Desa dalam bidang	1.000.000,00	
01.02	Hasil Tanah Kas Desa		
01.02.01	Hasil sewa tanah kas desa	110.500.000,00	
01.02.02	Hasil bagi hasil tanah kas desa	5.000.000,00	
01.02.03	Hasil pinjam pakai tanah kas desa	25.700.000,00	
03	Hasil Swadaya,Partisipasi dan Gotong royong		
03.01	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta berupa uang		
03.01.01	Sumbangan petani pemilik sawah/tegal	13.300.000,00	
03.01.02	Sumbangan pemilik usaha/perusahaan negeri/swasta	1.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
	Pendapatan Tranfer		
31	Dana Desa Pemerintah Pusat		
31.01	Dana Desa bersumber dari APBN		
31.01.01	Bantuan Dana Desa	643.803.000,00	
34	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
34.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten		
34.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	394.403.000,00	
36	Bantuan Keuangan Desa dari APBD Kabupaten		
36.06	Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur lainnya		
36.06.01	Bantuan reward PBB	53.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan Tranfer	1.091.206.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.251.206.000,00	
	BELANJA DESA		
	Penyelenggaraan Pemerintahan		
	Belanja Pegawai		
01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	39.432.000,00	
01.01.02	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	31.536.000,00	
01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	118.260.000,00	
01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	47.304.000,00	
32	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
32.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		

Halaman : 2

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
1.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	24.000.000,00	
1.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	12.300.000,00	
1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan	40.020.000,00	
1.1.02.01.05	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	13.800.000,00	
1.1.02.01.06	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Fungsional Umum	22.800.000,00	
1.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
1.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	3.300.000,00	
1.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD	19.320.000,00	
1.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD		
	Jumlah Belanja Pegawai	372.072.000,00	
1.2	Belanja Barang/Jasa		
1.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
1.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	8.231.000,00	
1.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
1.2.01.01.04	Belanja peranko, meterai dan benda pos lainnya	1.700.000,00	
1.2.01.01.10	Belanja balho, banner		
1.2.02	Belanja Jasa Kantor		
1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.2.02.01.03	Belanja listrik	2.040.000,00	
1.2.02.01.04	Belanja surat kabar/majalah	1.000.000,00	
1.2.02.01.56	Belanja penggantian suku cadang	500.000,00	
1.2.02.01.57	Belanja jasa pengisian pelumas/oli	2.500.000,00	
1.2.02.01.59	Belanja surat tanda nomor kendaraan		
1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.05.01.01	Belanja Cetak	640.000,00	
1.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
1.2.06	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.2.06.01	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.2.06.01.13	Belanja Sewa sound sistem	400.000,00	
1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
1.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
1.2.07.01.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.875.000,00	
1.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.550.000,00	
1.2.08	Belanja Pakaian		
1.2.08.01	Belanja Pakaian		
1.2.08.01.01	Belanja Pakaian dinas	2.700.000,00	
1.2.08.01.05	Belanja Pakaian batik tradisional	3.000.000,00	
1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas		
1.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas		
1.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		
1.2.09.01.02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	785.000,00	
1.2.10	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	
1.2.10.01	Belanja Premi Asuransi		
1.2.10.01.01	Belanja Premi Asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	17.850.000,00	
1.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
1.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	68.556.000,00	
	Belanja Modal		

Halaman - 3

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.1.3.08	Belanja Modal pengadaan komputer		
2.1.3.08.01	Belanja Modal pengadaan komputer		
2.1.3.08.01.04	Belanja Modal pengadaan printer	2.400.000,00	
2.1.3.13	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
2.1.3.13.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
2.1.3.13.01.01	Belanja Modal pengadaan kamera	4.320.000,00	
2.1.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.1.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.1.3.19.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor	53.000.000,00	
2.1.3.29	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor		
2.1.3.29.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor		
2.1.3.29.01.02	Belanja Modal pengadaan AC	3.600.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	63.520.000,00	
2.2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.2	Belanja Barang/Jasa		
2.2.2.04	Belanja Pemeliharaan		
2.2.2.04.01	Belanja Pemeliharaan		
2.2.2.04.01.01	Belanja Pemeliharaan jalan	10.000.000,00	
2.2.2.04.01.03	Belanja Pemeliharaan gedung	5.000.000,00	
2.2.2.04.01.25	Belanja Pemeliharaan bangunan LPJU	3.000.000,00	
2.2.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.2.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.2.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	7.500.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	25.500.000,00	
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.02	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor		
2.2.3.02.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor		
2.2.3.02.01.05	Belanja Modal pengadaan alat angkut lainnya	34.000.000,00	
2.2.3.07	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
2.2.3.07.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
2.2.3.07.01.02	Belanja Modal pengadaan almari	6.000.000,00	
2.2.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.2.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.2.3.19.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor	175.000.000,00	
2.2.3.19.01.20	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian pagar gedung kantor	30.000.000,00	
2.2.3.19.01.21	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ los pasar	75.000.000,00	
2.2.3.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan		
2.2.3.22.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan		
2.2.3.22.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan		
2.2.3.22.01.05	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ plensengan/ penahan badan jalan	40.500.000,00	
2.2.3.24	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air	35.000.000,00	
2.2.3.24.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		
2.2.3.24.01.06	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum		
2.2.3.24.01.12	Belanja Modal pengadaan konstruksi drainase	15.000.000,00	
2.2.3.34	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving	141.978.000,00	
2.2.3.34.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
2.2.3.34.01.02	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving pasar	20.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	572.478.000,00	
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan		

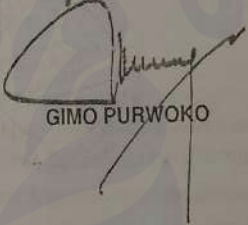
Halaman : 4

KODE KEKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
	Belanja Barang/Jasa		
01	Belanja Barang Habis Pakai		
01.01	Belanja Barang Habis Pakai	242.800,00	
01.01.01	Belanja alat tulis kantor		
03	Belanja Material		
03.01	Belanja Material	15.653.000,00	
03.01.08	Belanja bahan logistik		
05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	239.700,00	
05.01.02	Belanja Penggandaan		
07	Belanja Makanan dan Minuman		
07.01	Belanja Makanan dan Minuman	5.967.500,00	
07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat		
11	Belanja Honorarium		
11.01	Belanja Honorarium	15.050.000,00	
11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI		
15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	36.000.000,00	
15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya		
15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	12.600.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	85.755.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat		
	Belanja Barang/Jasa		
03	Belanja Material		
03.01	Belanja Material		
03.01.14	Belanja bahan alat praktik	402.500,00	
05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
05.01.01	Belanja Cetak	640.000,00	
05.01.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
06	Belanja Sewa Gedung,Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
06.01	Belanja Sewa Gedung,Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
06.01.13	Belanja Sewa sound sistem	500.000,00	
07	Belanja Makanan dan Minuman		
07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.477.500,00	
11	Belanja Honorarium		
11.01	Belanja Honorarium		
11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	19.425.000,00	
12	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
12.01	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
12.01.02	Belanja sosialisasi	3.000.000,00	
15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	8.825.000,00	
15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.500.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	67.645.000,00	
	JUMLAH BELANJA DESA	1.255.526.000,00	

Halaman : 5

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.320.000,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan Desa		
07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.320.000,00	
07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	4.320.000,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	4.320.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Desa	4.320.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	4.320.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	

KEPALA DESA KARETAN


 GIMO PURWOKO

Lampiran 6.13 Peraturan Desa Grajagan Nomor 02 Tahun 2015



**PERATURAN DESA GRAJAGAN
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DESA GRAJAGAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAMPIRAN II | PERATURAN DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO

NOMOR : 02 TAHUN 2015
TANGGAL : 09 MARET 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
	PENDAPATAN DESA		
	Pendapatan Asli Desa		
0.01	Hasil Usaha Desa		
0.01.02	Hasil Tanah Kas Desa	17.300.000,00	PAK
0.01.02.03	Hasil pinjam pakai tanah kas desa		
0.02	Hasil Aset Desa		
0.02.02	Pemakaian kekayaan desa		TKD
0.02.02.01	Tanah Kas Desa untuk operasional Pemerintah Desa	142.815.900,00	
0.03	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong		
0.03.01	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta berupa uang		Pasal
0.03.01.01	Sumbangan petani pemilik sawah/tegal	104.175.000,00	
0.03.01.02	Sumbangan pemilik usaha/perusahaan negeri/swasta	500.000,00	
0.04	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
0.04.01	Pungutan Desa	20.245.000,00	PAP
0.04.01.02	Pungutan pasar Desa		
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	285.035.000,00	
	Pendapatan Transfer		
2.01	Dana Desa Pemerintah Pusat		
2.01.01	Dana Desa bersumber dari APBN		
2.01.01.01	Bantuan Dana Desa	333.086.000,00	
2.04	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
2.04.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	349.011.000,00	
2.04.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten		
	Jumlah Pendapatan Transfer	682.097.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	967.132.000,00	
	BELANJA DESA		
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan		
1.1	Belanja Pegawai		
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.800.000,00	ADD
1.1.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12.180.000,00	ADD
1.1.01.01.02	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	87.000.000,00	ADD
1.1.01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	69.600.000,00	ADD
1.1.01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun		
1.1.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.1.02.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000,00	PAD
1.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	9.000.000,00	PAD
1.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa		

Halaman : 2

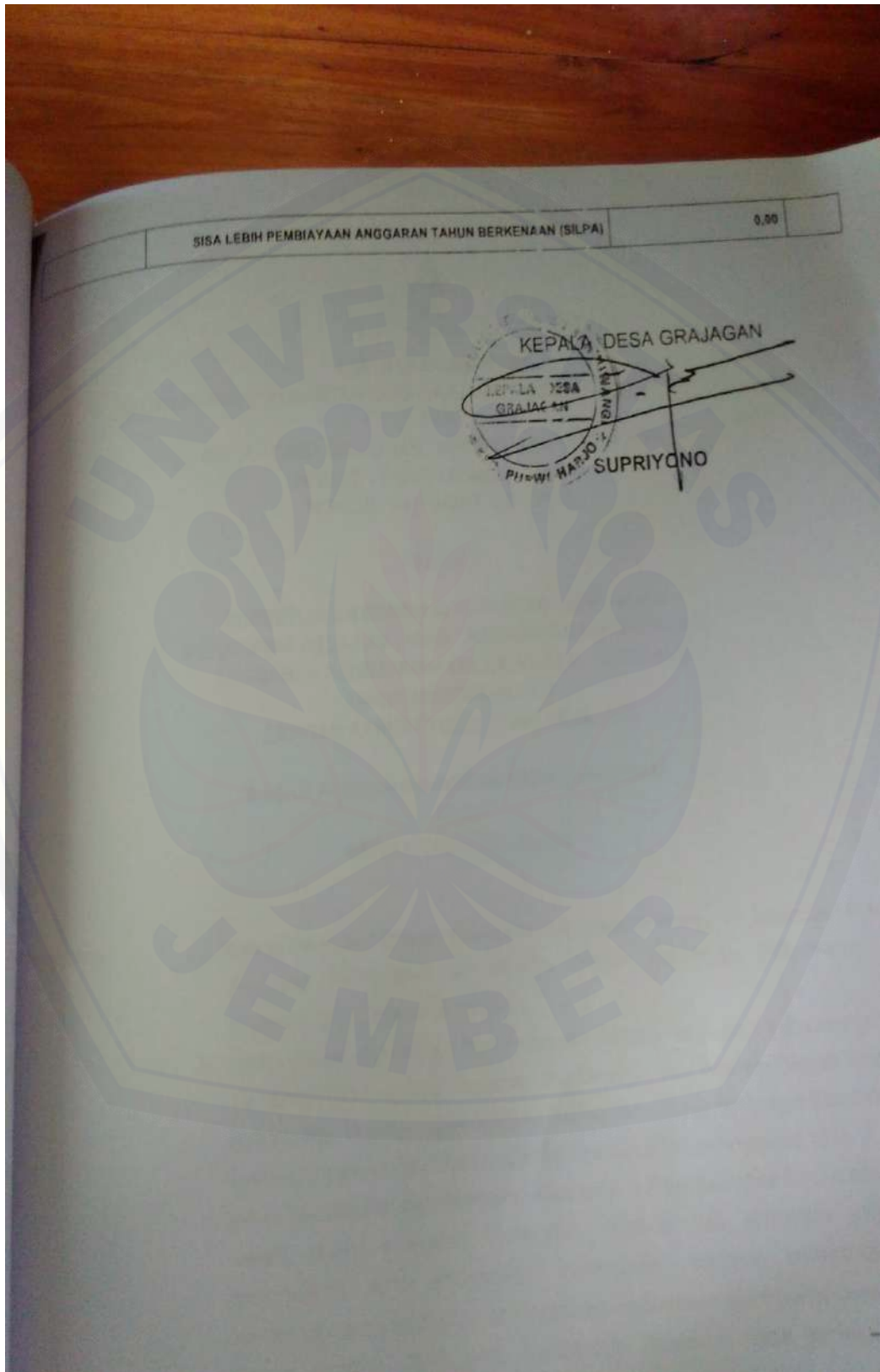
KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
1.1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan		
1.1.1.02.01.05	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	54.000.000,00	PAD
1.1.1.02.01.06	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Fungsional Umum	54.000.000,00	PAD
1.1.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	34.800.000,00	PAD
1.1.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
1.1.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD		
1.1.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD	1.200.000,00	ADD
		9.600.000,00	ADD
1.2	Belanja Barang/Jasa Jumlah Belanja Pegawai	396.180.000,00	
1.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
1.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
1.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor		
1.2.01.01.04	Belanja perangk, meterai dan benda pos lainnya	4.775.000,00	ADD
1.2.01.01.10	Belanja baliho, banner	675.000,00	PAD ADD
1.2.02	Belanja Jasa Kantor	1.590.000,00	ADD
1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
1.2.02.01.03	Belanja listrik	3.750.000,00	PAD
1.2.02.01.04	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	ADD
1.2.02.01.11	Belanja jasa keamanan	1.600.000,00	PAD
1.2.02.01.22	Belanja Jasa publikasi	500.000,00	PAD
1.2.02.01.25	Belanja Jasa entry data	1.000.000,00	ADD
1.2.02.01.37	Belanja jasa pihak ketiga	12.652.000,00	PAD
1.2.02.01.41	Belanja jasa angkut	500.000,00	PAI
1.2.02.01.51	Belanja Jasa pembawa acara	500.000,00	PAI
1.2.04	Belanja Pemeliharaan		
1.2.04.01	Belanja Pemeliharaan		
1.2.04.01.05	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	1.000.000,00	PAD
1.2.04.01.07	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	6.000.000,00	PAD
1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.05.01.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	
1.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	561.000,00	
1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
1.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
1.2.07.01.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2.400.000,00	PAI
1.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.400.000,00	PAD
1.2.07.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	1.300.000,00	PAD
1.2.08	Belanja Pakalan		
1.2.08.01	Belanja Pakalan		
1.2.08.01.01	Belanja Pakalan dinas	3.750.000,00	PAI
1.2.08.01.05	Belanja Pakalan batik tradisional	4.500.000,00	PAD
1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas		
1.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas		
1.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1.350.000,00	ADD
1.2.09.01.02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	4.375.000,00	ADD
1.2.11	Belanja Honorarium		
1.2.11.01	Belanja Honorarium		
1.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	3.755.000,00	PAI
1.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
1.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		

Halaman : 3

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
		4	5
1	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diterahkan Kepada Kelompok Masyarakat	18.790.000,00	
1.1.01.03	Jumlah Belanja Barang/Jasa	85.859.000,00	
	Belanja Modal		
1.1.2	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
1.1.2.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor		
1.1.2.01.01	Belanja Modal pengadaan rak arsip	9.000.000,00	
1.1.2.01.02	Belanja Modal pengadaan komputer		
1.1.2.01.03	Belanja Modal pengadaan komputer		
1.1.2.01.04	Belanja Modal pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	
1.1.2.01.05	Belanja Modal pengadaan komputer notebook	12.000.000,00	
1.1.2.01.06	Belanja Modal pengadaan printer	4.400.000,00	
1.1.2.01.07	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
1.1.2.01.08	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
1.1.2.01.09	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan desa	1.000.000,00	
1.1.2.01.10	Belanja Modal pengadaan meubeler		
1.1.2.01.11	Belanja Modal pengadaan meubeler		
1.1.2.01.12	Belanja Modal pengadaan meja rapat	6.000.000,00	
1.1.2.01.13	Belanja Modal pengadaan kursi rapat	9.000.000,00	
1.1.2.01.14	Belanja Modal pengadaan meja resepsionis	5.500.000,00	
1.1.2.01.15	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga		
1.1.2.01.16	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga		
1.1.2.01.17	Belanja Modal pengadaan taplak	187.000,00	
1.1.2.01.18	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
1.1.2.01.19	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio		
1.1.2.01.20	Belanja Modal pengadaan kamera	2.500.000,00	
1.1.2.01.21	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1.1.2.01.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1.1.2.01.23	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan pertamanan	27.800.000,00	
1.1.2.01.24	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian pagar gedung kantor	78.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	160.387.000,00	
1.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.2.2	Belanja Barang/Jasa		
1.2.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	-	
1.2.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
1.2.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	15.000.000,00	
1.2.3	Belanja Modal		
1.2.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1.2.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
1.2.3.19.01.10	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan persampahan	10.000.000,00	
1.2.3.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan		
1.2.3.22.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan		
1.2.3.22.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan	14.000.000,00	
1.2.3.22.01.05	Belanja Modal pengadaan konstruksi piongsangan/ penahan badan jalan	10.000.000,00	
1.2.3.23	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan		
1.2.3.23.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan		
1.2.3.23.01.04	Belanja Modal pengadaan konstruksi jembatan diatas air	17.000.000,00	
1.2.3.24	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		
1.2.3.24.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air		

Halaman : 4

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
3.2.34.01.15	Belanja Modal pengadaan konstruksi drainase	97.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	138.000.000,00	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan		
3.2	Belanja Barang/Jasa		
3.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
3.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
3.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.411.200,00	
3.2.01.01.07	Belanja bahan dan peralatan lomba	1.350.000,00	
3.2.03	Belanja Material		
3.2.03.01	Belanja Material		
3.2.03.01.15	Belanja bahan hadiah	1.000.000,00	
3.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
3.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
3.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	238.800,00	
3.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
3.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
3.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.500.000,00	
3.2.11	Belanja Honorarium		
3.2.11.01	Belanja Honorarium		
3.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	800.000,00	
3.2.14	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
3.2.14.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
3.2.14.01.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	8.000.000,00	
3.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
3.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
3.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPM/D,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	111.900.000,00	
3.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	21.600.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	145.800.000,00	
4.	Pemberdayaan Masyarakat		
4.2	Belanja Barang/Jasa		
4.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
4.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
4.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.460.000,00	
4.2.02	Belanja Jasa Kantor		
4.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
4.2.02.01.28	Belanja Jasa pendataan	2.340.000,00	
4.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
4.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
4.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.250.000,00	
4.2.12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
4.2.12.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
4.2.12.01.01	Belanja Kursus singkat/ pelatihan	4.170.000,00	
4.2.12.01.02	Belanja sosialisasi	4.740.000,00	
4.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
4.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
4.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	9.946.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	25.906.000,00	
	JUMLAH BELANJA DESA	967.132.000,00	



Lampiran 6.14 Peraturan Desa Grajagan Nomor 02 Tahun 2016



**PERATURAN DESA GRAJAGAN
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DESA GRAJAGAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAMPIRAN | PERATURAN DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO
 NOMOR : 02 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 JANUARI 2016

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
1	PENDAPATAN DESA		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.01	Hasil Usaha Desa		
1.1.01.02	Hasil Tanah Kas Desa	405.000.000,00	
1.1.01.02.01	Hasil sewa tanah kas desa	17.400.000,00	
1.1.01.02.03	Hasil pinjam pakai tanah kas desa		
1.1.03	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong		
1.1.03.01	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/awasta berupa uang	104.075.000,00	
1.1.03.01.01	Sumbangan petani pemilik sawah/tegal		
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.1.04.01	Pungutan Desa	21.600.000,00	
1.1.04.01.02	Pungutan pasar Desa		
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	548.075.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.01	Dana Desa Pemerintah Pusat		
1.2.01.01	Dana Desa bersumber dari APBN	826.932.000,00	
1.2.01.01.01	Bantuan Dana Desa		
1.2.04	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
1.2.04.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	491.230.000,00	
1.2.04.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten		
1.2.05	Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi		
1.2.05.04	Bantuan Keuangan program kemasyarakatan	104.500.000,00	
1.2.05.04.01	Bantuan keuangan penunjang program kemasyarakatan (Feminisasi)		
1.2.06	Bantuan Keuangan Desa dari APBD Kabupaten		
1.2.06.06	Bantuan Keuangan untuk pembangunan Infrastruktur lainnya	161.651.000,00	
1.2.06.06.01	Bantuan reward PBB		
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.584.313.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	2.132.388.000,00	
2	BELANJA DESA		
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	
2.1.1.01.01.02	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	30.000.000,00	
2.1.1.01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	120.000.000,00	
2.1.1.01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	96.000.000,00	
2.1.1.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.02.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		

Halaman - 2

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.1.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	192.000.000,00	
2.1.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	42.000.000,00	
2.1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan	90.000.000,00	
2.1.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	90.000.000,00	
2.1.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
2.1.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD		
2.1.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD	3.000.000,00	
2.1.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD	24.000.000,00	
	Jumlah Belanja Pegawai	635.000.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.1.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.190.000,00	
2.1.2.01.01.04	Belanja perangkometerai dan benda pos lainnya	780.000,00	
2.1.2.01.01.07	Belanja bahan dan peralatan lomba	3.500.000,00	
2.1.2.01.01.10	Belanja balho, banner	1.660.000,00	
2.1.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.02.01.03	Belanja listrik	1.800.000,00	
2.1.2.02.01.04	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
2.1.2.02.01.07	Belanja sertifikasi	6.908.000,00	
2.1.2.02.01.25	Belanja Jasa entry data	3.000.000,00	
2.1.2.02.01.34	Belanja jasa administrasi	15.600.000,00	
2.1.2.02.01.48	Belanja jasa layanan Telkom	3.720.000,00	
2.1.2.02.01.55	Belanja Jasa mubaligh	500.000,00	
2.1.2.04	Belanja Pemeliharaan		
2.1.2.04.01	Belanja Pemeliharaan		
2.1.2.04.01.03	Belanja Pemeliharaan gedung	17.000.000,00	
2.1.2.04.01.05	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	1.000.000,00	
2.1.2.04.01.10	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	500.000,00	
2.1.2.04.01.12	Belanja Pemeliharaan instalasi komputer	3.500.000,00	
2.1.2.04.01.26	Belanja Pemeliharaan jaringan internet	1.000.000,00	
2.1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.05.01.01	Belanja Cetak	775.000,00	
2.1.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	866.000,00	
2.1.2.06	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
2.1.2.06.01	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
2.1.2.06.01.11	Belanja Sewa tenda	800.000,00	
2.1.2.06.01.13	Belanja Sewa sound sistem	3.000.000,00	
2.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	8.760.000,00	
2.1.2.07.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	4.400.000,00	
2.1.2.08	Belanja Pakaian		
2.1.2.08.01	Belanja Pakaian		
2.1.2.08.01.05	Belanja Pakaian batik tradisional	6.794.000,00	
2.1.2.09	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1.350.000,00	
2.1.2.09.01.02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	4.375.000,00	

Halaman : 3

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.1.2.11	Belanja Honorarium		
2.1.2.11.01	Belanja Honorarium		
2.1.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	6.300.000,00	
2.1.2.14	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.1.2.14.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.1.2.14.01.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	118.998.000,00	
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa		
2.1.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa		
2.1.3.01.01.01	Belanja Modal pengadaan Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum	84.500.000,00	
2.1.3.09	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
2.1.3.09.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan		
2.1.3.09.01.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan desa	1.000.000,00	
2.1.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.1.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.1.3.19.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor	42.000.000,00	
2.1.3.29	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor		
2.1.3.29.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor		
2.1.3.29.01.02	Belanja Modal pengadaan AC	12.100.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	139.600.000,00	
2.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.2	Belanja Barang/Jasa		
2.2.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.2.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.2.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW, LPMD, PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	8.400.000,00	
2.2.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	
2.2.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	78.400.000,00	
2.2.3	Belanja Modal		
2.2.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.2.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan		
2.2.3.19.01.11	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan pertamanan	26.200.000,00	
2.2.3.19.01.20	Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian pagar gedung kantor	31.700.000,00	
2.2.3.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jalan		
2.2.3.22.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jalan		
2.2.3.22.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan	545.000.000,00	
2.2.3.22.01.05	Belanja Modal pengadaan konstruksi plengsengan/ penahan badan jalan	53.751.000,00	
2.2.3.34	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
2.2.3.34.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving		
2.2.3.34.01.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving halaman gedung kantor	21.000.000,00	
2.2.3.34.01.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving jalan	168.882.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	846.533.000,00	
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan		
2.3.2	Belanja Barang/Jasa		
2.3.2.01	Belanja Barang Habis Pakal		
2.3.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakal		
2.3.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	112.000,00	

Halaman : 4

KODE REKENING	Uraian	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	4	5
2.3.2.01.01.11	Belanja peralatan dan bahan dapur	2.000.000,00	
2.3.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.3.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.3.2.02.01.11	Belanja jasa keamanan	600.000,00	
2.3.2.02.01.61	Belanja jasa Dalang	8.500.000,00	
2.3.2.06	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
2.3.2.06.01	Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
2.3.2.06.01.03	Belanja Sewa kendaraan darat	300.000,00	
2.3.2.06.01.13	Belanja Sewa sound sistem	1.500.000,00	
2.3.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.3.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.3.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.748.000,00	
2.3.2.07.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	5.000.000,00	
2.3.2.08	Belanja Pakalan		
2.3.2.08.01	Belanja Pakalan		
2.3.2.08.01.06	Belanja Pakaian olahraga	1.800.000,00	
2.3.2.12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
2.3.2.12.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK Aparat Pemerintah Desa		
2.3.2.12.01.02	Belanja sosialisasi	1.000.000,00	
2.3.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.3.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW, LPMD, PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	166.747.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	192.307.000,00	
2.4.	Pemberdayaan Masyarakat		
2.4.2	Belanja Barang/Jasa		
2.4.2.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.4.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai		
2.4.2.01.01.09	Belanja spanduk dan alat informasi	300.000,00	
2.4.2.01.01.10	Belanja baliho, banner	180.000,00	
2.4.2.02	Belanja Jasa Kantor		
2.4.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		
2.4.2.02.01.45	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.400.000,00	
2.4.2.07	Belanja Makanan dan Minuman		
2.4.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman		
2.4.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	13.520.000,00	
2.4.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.4.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat		
2.4.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW, LPMD, PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	2.000.000,00	
2.4.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.500.000,00	
	Jumlah Belanja Barang/Jasa	121.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA DESA	2.136.738.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.350.000,00)	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembayaan Desa		
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
3.1.01.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu		
3.1.01.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	4.350.000,00	



Lampiran 6.15 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian UNEJ

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 0795/UN25.3.1/LT/2017 15 Juni 2017
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi
 di -
BANYUWANGI

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2206/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 8 Juni 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Lilis Al Quriani / 130910201009
 Fakultas / Jurusan : FISIP / Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Jawa II No. 17 Jember / No. Hp. 085336130395
 Judul Penelitian : Kontribusi Pasar Desa (Studi Kasus : Tiga Pasar Desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)
 Lokasi Penelitian : Nama – Nama Instansi di Kabupaten Banyuwangi
 Lama Penelitian : Dua Bulan (15 Juni – 15 Agustus 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

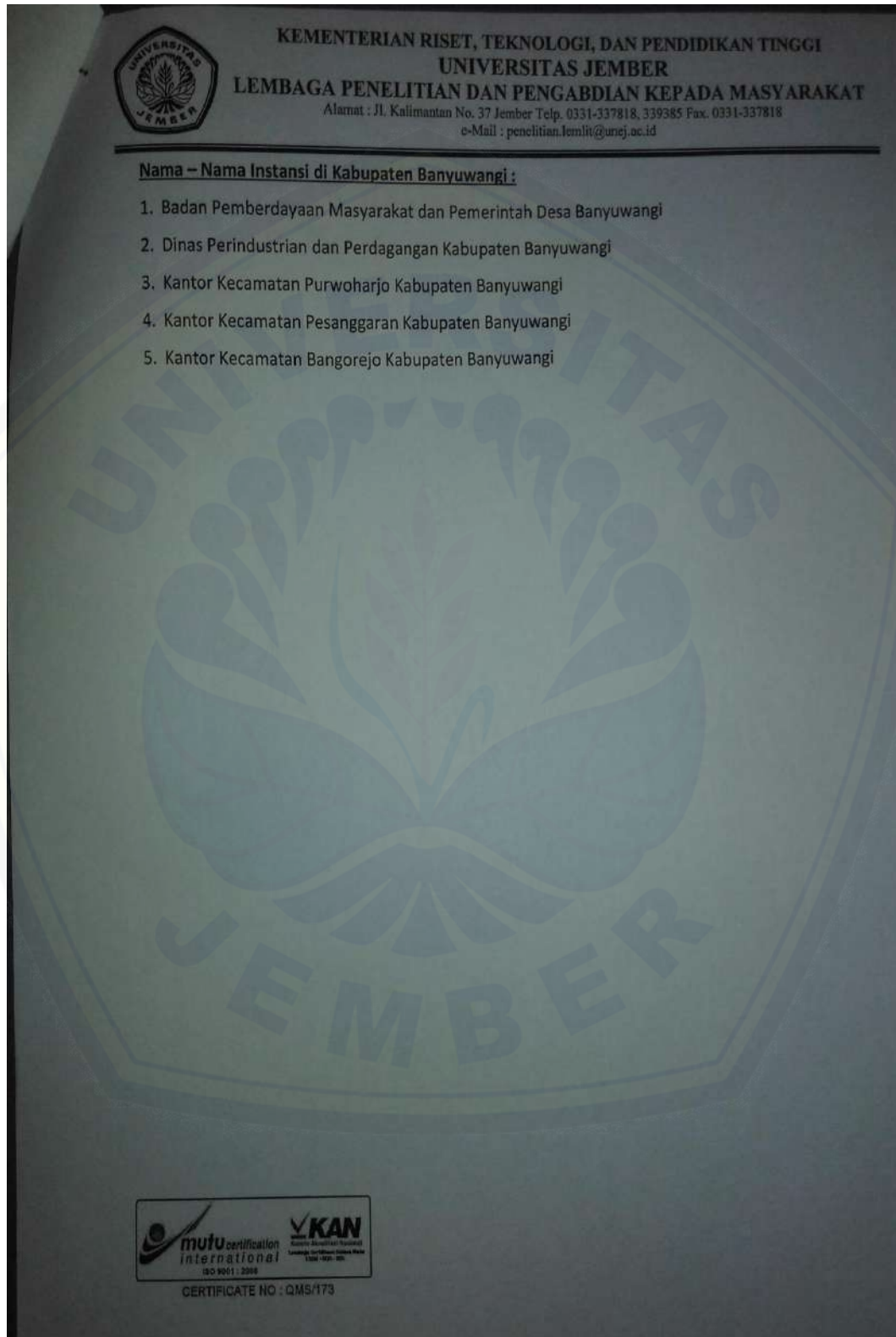
s.d. Ketua
 Sekretaris III,

 Khairu Anam, S.T., M.T.
 NIP. 197804052005011002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

 
 CERTIFICATE NO : QMS/173



Lampiran 6.16 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 10 Juli 2017

Nomor : 072/770/REKOM/429.206/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Kepala BPM dan Pemdes
2. Kepala Perindustrian dan Perdagangan
3. Camat Purwoharjo
4. Camat Pesanggaran
5. Camat Bangorejo
di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember
Tanggal : 15 Juni 2017
Nomor : 0795/UN25.3.1/LT/2017
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama/NIM : Lili Al Quriani/130910201009

Bermaksud melaksanakan Penelitian :
Judul : Kontribusi Pasar Desa (Studi Kasus: Tiga Pasar Desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)
Tempat : BPM dan Pemdes Kab. Banyuwangi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi, Desa Purwoharjo, Desa Karetan, Desa Grajagan, Desa Pesanggaran, Desa Temurejo, Desa Bangorejo
Waktu : 10 Juli s/d 10 September 2017

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan


Drs. H. WIDODO, M.Si
Peringkat/Tingkat
NIP. 196010141991031007

Tembusan:
Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

Lampiran 6.17 Inventarisasi Pasar Desa Tahun 2016

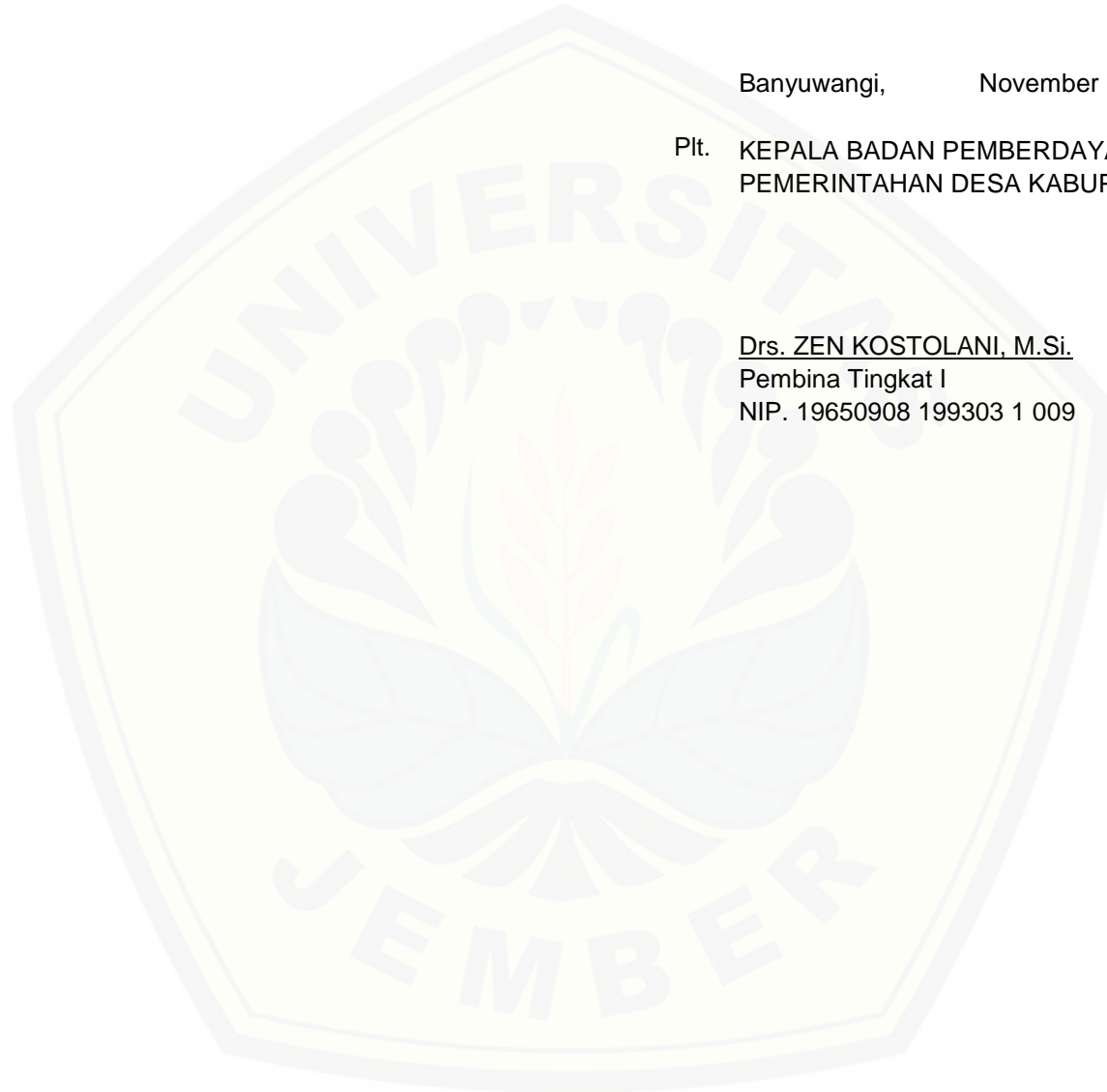
INVENTARISASI PASAR DESA																														
TAHUN 2016																														
Provinsi : JAWA TIMUR																									Kabupaten : BANYUWANGI					
NO	KECAMATAN	JML DESA	NO	NAMA DESA YANG MEMPUNYAI PASAR DESA	NAMA PASAR	STATUS TANAH						PERDES			STATUS PASAR			BANGUNAN						KONDISI BANGUNAN			HARI PASAR	ASET YANG DIMILIKI PASAR DESA	KET	
						MILIK PEMDES	MILIK PEMDA	PERORANGAN	HIBAH	SUDAH	BELUM BUAT	MILIK PEMDES	MILIK PEMDA	MILIK INDIVIDU/SWASTA	LOS PERMANEN	SEMI PERMANEN	SEDERHANA	KANTOR	PARKIR	MCK	TPS	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK DAN LAYAK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	PESANGGARAN	5	1	Pesanggaran		v	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	v	Minggu					
			2	Sumberagung		v	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	v	-	-	-	v	v	-	-	Sabtu				
			3	Sarongan		v	-	-	-	v	-	v	-	-	-	16	2	27	-	-	-	v	v	-	-	Minggu				
2	BANGOREJO	7	1	Sukorejo	Pasar Sukorejo	v	-	-	-	-	v	-	-	v	14	-	20	-	-	-	-	-	-	-						
			2	Temurejo	Pasar Selorejo	v	-	-	-	-	v	-	-	-	v	20	4	-	-	-	v	-	-	-	-					
					Psr. Sumberjambe		v	-	-	-	-	v	-	-	-	v	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3	Kebondalem	Psr. Pasembon	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			4	Sambirejo	Psr. Sambirejo	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	v	15	-	6	-	v	-	-	-	-	-				
3	PURWOHARJO	8	1	Kradenan	Kradenan	v	-	v	-	-	v	v	-	v	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	Selasa & Jum'at		(2) lokasi di jalan			
			2	Karetan	Pasar Sarana Niaga	v	-	-	-	v	-	v	-	-	-	41	-	21	-	v	v	v	v	-	-	Selasa	-			
			3	Sumberasri	Sumberasri	v	-	-	-	v	-	v	-	-	v	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Rabu	Los Pasar			
			4	Grajagan	Pasar Curahjati	v	-	-	-	v	-	v	-	-	-	19	2	-	-	v	v	v	-	v	v	Sabtu & Setiap Hari	Tanah & Lapak	2 Lokasi		
					Grajagan		v	-	-	v	-	v	v	-	-	v	v	v	-	v	v	-	v	v	v	-				
		5	Sidorejo	Pasar Desa	v	-	-	-	v	-	v	-	-	-	2	4	3	-	-	v	-	v	v	Serini,	Los pasar					

			6	Purwoharjo	Purwoharjo	v	-	-	-	v	-	v	-	-	75	148	56	v	v	v	v	-	-	v	Kamis	Pertokoan, Los Terbuka, Bangunan Inpres, Pasar Sepeda, Pasar Hewan		
4	TEGALDLIMO	9	1	Purwoasri	Purwoasri	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minggu & Setiap hari		2 Lokasi	
			2	Kedungwungu	Kedungwungu	v	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	-	v	v	v	v	v	v	-	Sabtu, Senin & Setiap hari	Los pasar	3 Lokasi	
			3	Kedungasri	Kedungasri	v	v	-	-	-	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	Kamis & Setiap hari		2 Lokasi	
			4	Tegaldlimo	Tegaldlimo	v	-	-	-	-	v	-	-	-	30	8	103	v	v	v	v	-	-	v	Setiap hari			
			5	Wringinpitu	Wringinpitu	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jum'at & Minggu			
			6	Kedunggebang	Kedunggebang	v	-	-	-	v	-	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rabu & Setiap hari		2 Lokasi	
			7	Purwoagung	Purwoagung	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	v	v	v	v	-	v	Setiap hari				
5	MUNCAR	10	1	Tembokrejo	Gotongroyong	v	-	-	-	-	v	-	-	30	2	-	-	-	-	-	-	-	v	-	Senin			
			2	Kedungrejo		-	v	-	-	-	-	v	-	v	v	v	v	v	v	v	v	-	-	v	Setiap hari			
			3	Kedungringin		v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	Jum'at			
			4	Sumberberas	Sumberayu	v	-	-	-	v	-	v	-	252	52	300	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Selasa		
			5	Kumendung		v	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-	v	Rabu		Los Pasar	
			6	Tapanrejo		v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	CLURING	9	1	Plampangrejo	Patok Wesi	v	-	-	-	-	v	v	-	25	15	30	-	v	-	-	-	v	-	Sabtu		Los Pasar		
			2	Cluring	Cluring	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v	-	v	v	v	-	-	v	Selasa				
			3	Sembulung	Sembulung	v	-	-	-	-	v	v	-	-	4	-	-	v	v	-	-	v	-	Senin				
			4	Sraten	Sraten	-	-	-	-	v	-	v	-	20	40	25	-	v	-	-	-	v	-	Rabu	Bangunan Los	Tanah milik		

Banyuwangi, November 2016

Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650908 199303 1 009



Lampiran 6.18 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk Pegawai di Kantor Disperindag Kab. Banyuwangi

1. Apakah pengelolaan pasar tradisional di bawah pengelolaan Disperindag?
2. Masing-masing pasar tersebut apa berkontribusi baik kepada pemerintah daerah?
3. Apakah setiap pasar berkontribusi berbeda-beda?
4. Ada berapakah jumlah pasar tradisional di Kabupaten Banyuwangi?
5. Regulasi apa saja yang mengatur pasar tradisional tersebut?

Pertanyaan untuk Pegawai di Kantor DPM-PD Kab. Banyuwangi

1. Apakah pasar desa di bawah pengelolaan DPM-PD?
2. Apa saja peran DPM-PD dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa?
3. Di Kabupaten Banyuwangi mana sajakah yang mempunyai pasar desa? Dan di Kecamatan mana yang mempunyai pasar desa paling banyak?
4. Apakah pihak DPM-PD pernah memberikan bantuan terhadap desa-desa yang mempunyai pasar desa tersebut?
5. Apakah ada penyuluhan terkait pengelolaan pasar desa?
6. Pasar desa yang terbilang besar di Kabupaten Banyuwangi itu mana saja?
7. Apakah ada kebijakan yang mengatur pasar desa agar tetap berkembang?
8. Adakah suatu pencapaian yang di dapatkan oleh pasar desa yang ada di Banyuwangi?
9. Apakah berita tersebut pernah diterbitkan?

Pertanyaan untuk Pegawai di Kantor Desa

1. Pasar yang ada di desa sini dikelola oleh siapa?
2. Apakah pasar desa itu penting? Terus apa manfaatnya?
3. Bagaimanakah awal mula adanya pasar desa ini?
4. Apakah masyarakat ikut serta membangun pasar tersebut? Mengapa?
5. Biasanya pembangunan pasar desa dilakukan berapa tahun sekali?
6. Bagaimana proses penetapan tempat mereka berjualan?
7. Mereka keberatan apa tidak dengan penetapan tersebut?
8. Adanya pasar desa ini sebenarnya diprioritaskan untuk siapa?
9. Siapa sajakah yang berjualan di dalam pasar?
10. Apakah ada perlakuan yang berbeda antara penjual dari desa sini dengan desa lain?

11. Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) dalam pasar desa tersebut?
12. Apakah di dalam pasar bangunannya sudah tertata berdasarkan blok jenis barang dagangannya?
13. Bagaimana kontribusi pasar desa terhadap keuangan desa?
14. Bagaimana kontribusi pasar desa kepada masyarakat? Mungkin dari segi pemenuhan kebutuhan.
15. Apakah masyarakat puas dengan fasilitas yang ada? Dan apa saja fasilitas yang ada di dalam pasar desa tersebut?
16. Regulasi apa saja yang mengatur pasar tersebut?
17. Bagaimana mekanisme kontribusinya?
18. Berapa retribusi yang dikenakan kepada pedagang?
19. Adakah yang keberatan dengan besaran biaya retribusi tersebut?
20. Apakah ada target yang harus direalisasi? Dalam jangka waktu bulanan atau tahunan target tersebut? Terealisasi atau tidak? Apa saja hambatannya?
21. Untuk mendukung kegiatan di pasar, apa saja yang sudah dilakukan selama ini?
22. Adakah hambatan dalam membangun fasilitas di pasar tersebut?
23. Adakah perbedaan jumlah bangunan pada tiap tahunnya?
24. Pedagang yang menggunakan tempat untuk berjualan itu sistemnya sewa apa beli? Dan ada berapa pegawai pasarnya?
25. Dan apakah gaji untuk petugas pasar masuk dalam anggaran desa? Dan gajinya sama apa tidak antara petugas satu dengan yang lainnya?
26. Apa ada pencapaian tertentu dari pasar disini?

Pertanyaan untuk Petugas Pengelola Pasar Desa

1. Pasar desa ini kelola oleh siapa?
2. Apa saja tugas anda disini?
3. Bagaimana kalau anda berhalangan hadir? Apakah ada sanksi tertentu?
4. Disini apakah ada pembagian tugas? Apa saja?
5. Dari mana asalnya anda dan juga para petugas di pasar ini?
6. Mengenai pasar desa ini apakah sudah ada peraturannya? Apa saja isinya? Siapa saja yang terlibat dalam membuat peraturan tersebut?
7. Apa saja barang yang dijual di pasar ini?
8. Apakah pernah ada pelatihan bagi pengelola pasar desa? Kapan?
9. Apakah ada pertemuan rutin antara perangkat desa dengan petugas pasar dan pedagang?
10. Yang berjualan disini dari mana saja asal mereka? Kebanyakan dari mana?

11. Untuk toko ataupun ruko kebanyakan yang menggunakannya orang sini atau orang dari desa atau daerah lain? Untuk pekerjanya orang sini atau orang dari desa atau daerah lain?
12. Ada berapa banyak bangunan di dalam pasar ini? Dan berapakah bangunan toko/rukonya?
13. Apakah retribusi yang harus dibayar sama pada setiap bangunan yang ada?
14. Adakah target yang harus dicapai mengenai retribusi tersebut? Kalau ada berapa? Dan terealisasi apa tidak?
15. Retribusi apa saja yang harus dibayar? Dan bagaimanakah mekanisme penarikan retribusi tersebut dilakukan?
16. Berapakah retribusi yang dikenakan oleh pedagang? Dalam menarik retribusi adakah hambatan selama ini?
17. Bangunan yang ada selama ini mengalami penambahan jumlah atau tidak?
18. Kapan terakhir kali ada renovasi bangunannya?
19. Bagaimana dengan kebersihan pasarnya? Apa pedagang ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihannya?
20. Bagaimana dengan keamanannya? Siapa saja yang terlibat?
21. Apakah dengan menjadi petugas pasar dapat menambah penghasilan anda dan petugas pasar lainnya?
22. Gaji untuk petugas rata-rata berapa ya? Apakah semua petugas gajinya sama?
23. Untuk membayar gaji tersebut, sudah dianggarkan oleh desa atau bagaimana?
24. Apa ada keuangan tersendiri yang diperuntukkan oleh petugas pasar ataupun untuk keuangan pasar? Kenapa?
25. Pembangunan atau renovasi pasar dilakukan oleh pihak desa atau para penjual yang menempatnya?
26. Apa ada pencapaian tertentu dari pasar ini?
27. Apa harapan anda terhadap pasar desa ini?

Pertanyaan untuk Petugas Penarik Retribusi Pasar Desa

1. Pasar desa ini dikeola oleh siapa?
2. Apa saja tugas anda disini?
3. Bagaimana kalau anda berhalangan hadir? Apakah ada sanksi tertentu?
4. Kepada siapa anda menyerahkan hasil retribusinya?
5. Disini apakah ada pembagian tugas? Apa saja?
6. Terkait petugas parkir itu bagaimana?
7. Dari mana asalnya anda? Dan apa pekerjaan anda selain menjadi petugas pasar?

8. Apakah ada pertemuan rutin antara perangkat desa dengan anda? Mengenai apa? Apakah ada waktu yang ditetapkan untuk pertemuan tersebut?
9. Yang berjualan disini dari mana saja asal mereka? Kebanyakan dari mana?
10. Kalau dilihat meskipun tidak semuanya disini ada tempat untuk tempat barang-barang mereka, itu sewa atau milik pribadi?
11. Saat menjalankan tugas, ada hambatan apa tidak?
12. Apakah retribusi yang harus dibayar sama pada setiap bangunan yang ada? Dan ada retribusi apa saja di pasar ini?
13. Kapan terakhir kali ada renovasi dan penambahan jumlah bangunannya?
14. Berapa gaji anda? Siapa yang memberikan gaji tersebut?
15. Bagaimana untuk gaji petugas parkir disini? Dari desa atau bagaimana?

Pertanyaan untuk Petugas Parkir di Pasar Desa

1. Pasar desa ini kelola oleh siapa?
2. Apa saja tugas anda disini?
3. Anda bekerja sudah berapa tahun?
4. Apakah ada petugas parkir yang lainnya?
5. Dalam bekerja disini, anda mendapatkan gaji dari mana? Apakah dari pemerintah desa?
6. Apakah ada target yang harus di capai? Target tersebut terealisasi apa tidak?
7. Kapan penyerahan hasil parkir tersebut di serahkan?
8. Untuk bagian penarik retribusi toko-toko ini siapa yang bertugas?
9. Berapa biaya untuk parkir kendaraan di sini?
10. Dari mana asalnya anda dan juga para petugas di pasar ini?
11. Lalu dari mana anda mendapatkan gaji?
12. Pasar ini ramai saat hari apa saja?
13. Apa pekerjaan anda dan petugas lainnya selain menjadi petugas parkir?
14. Di pasar ini, pada jam berapa pasarannya mulai ramai?
15. Toko-toko yang ada disini dipakai oleh orang mana saja?

Pertanyaan untuk Para Pedagang di Pasar Desa

1. Sudah berapa lamakah anda berjualan disini? Jualan apa saja?
2. Bagaimana awalnya anda berjualan? Dan mendapatkan tempat jualan disini? Apakah proses untuk mendapat izin mudah? Berapa biaya yang harus dikeluarkan dulunya?
3. Anda berasal dari mana?
4. Apa pekerjaan anda selain berjualan di pasar? Lalu berjualannya setiap hari atau hanya waktu pasaran saja?

5. Sewaktu pasaran, hasil yang anda dapatkan sesuai dengan pengeluaran untuk berjualan apa tidak?
6. Adanya pasar desa ini apakah dapat mendukung keuangan di keluarga anda? Apakah manfaat adanya pasar ini bagi anda?
7. Apa saja yang paling di minati pembeli? Berapa keuntungan yang anda ambil tiap barang? Kira-kira setiap berjualan berapa barang yang terjual?
8. Saat sepi penghasilan anda berapa? Dan saat ramai juga berapa? Total penghasilannya.
9. Untuk tiap kali jualan, kira-kira barang yang terjual ada berapa potong?
10. Berapa retribusi yang harus anda bayarkan? Apakah anda merasa keberatan?
11. Paling ramai pasarnya pada waktu apa saja? Anda sendiri berjualan dengan siapa? Berapa gajinya?
12. Dimana anda mendapat barang-barang dagangan ini? Apakah sudah langganan?
13. Pernahkan anda kecewa dengan pembeli? Mungkin cara mereka menawar atau pas apa gitu?
14. Biasanya untuk memperbaiki tempat anda jualan ini, siapa yang membiayai? Anda sendiri atau pihak desa?
15. Selama berjualan apakah pihak desa pernah melakukan renovasi? Kapan?
16. Selain disini, dimana saja anda berjualan?
17. Jam berapa anda berangkat? Dan jam berapa pulang anda pulangny?
18. Mengenai kebersihan dan keamanannya, menurut anda bagaimana? Apakah sudah baik?
19. Apa harapan anda kedepannya terhadap keberlangsungan atau keberadaan pasar ini?

Pertanyaan untuk Para Pembeli di Pasar Desa

1. Dari manakah anda berasal?
2. Apa saja yang anda beli?
3. Dengan adanya pasar ini apakah membantu anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
4. Apa saja manfaat pasar ini bagi anda?
5. Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas pasar misalnya petugas parkir ataupun mantri pasarnya dan juga para penjualnya?
6. Dan bagaimanakah kualitas barang dagangannya?
7. Jika pasar desa ini tidak ada, anda akan belanja dimana?
8. Disini selain pasar kan juga ada toko swalayan, kenapa anda memilih berbelanja di pasar?

9. Selama anda tahu adanya pasar ini, apakah ada perbedaannya? Mungkin dari segi bangunannya atau pelayanannya? Bagaimana juga kebersihan di pasar ini?
10. Apakah pasarnya dari dulu memang sudah tertata/sudah dikelompokkan setiap jenis barangnya?
11. Apa saran anda terhadap keberlangsungan pasar ini?



Lampiran 6.19 Surat Izin Selesai Penelitian dari Kantor Desa Purwoharjo



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO
KEPALA DESA PURWOHARJO**

Sekretariat : Jln. Jendral Ahmad Yani No. 173. Telp. 397376 Banyuwangi.

Kode Pos.68483

e - mail : desa - purwoharjo. Yahoo.co ,id - www. Purwoharjo.desa.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ / 429.513.05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUSI AMURULLOH, Amd.Kep
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Purwoharjo

Dengan ini menerangkan :

Nama Lengkap : LILIS AL QURIANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 25-12-1994
NIK : 3510026512940003
Alamat : Dusun Sumberjambe Rt.02 Rw.04 Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi
Asal Sekolah : UNEJ – JEMBER
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dengan sebenarnya bahwa :

Orang tersebut di atas telah melakukan kegiatan dengan baik dalam bentuk PENELITIAN TENTANG PASAR DESA, di Desa Purwoharjo Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi dengan judul KONTRIBUSI DAN MANFAAT PASAR DESA (STUDI KASUS 3 PASAR DESA DI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI).

Surat keterangan ini buat dengan sebenarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan periksa seperlunya.

Purwoharjo, 16 April 2018
KEPALA DESA PURWOHARJO

FAUSI AMURULLOH, Amd.Kep

Lampiran 6.20 Surat Izin Selesai Penelitian dari Kantor Desa Karetan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO
KANTOR KEPALA DESA KARETAN
Jalan Grajagan Nomor 145 Telepon 393552

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 35 / 429.513.08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gimo Purwoko

Jabatan : Kepala Desa Purwoharjo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lengkap : LILIS AL QURIANI

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Desember 1994

Nim : 130910201009

Kampus : Universitas Negeri Jember

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar – benar Mahasiswi tersebut di atas pernah melakukan penelitian tentang Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karetan, 17 April 2018

KEPALA DESA KARETAN



GIMO PURWOKO

Lampiran 6.21 Surat Izin Selesai Penelitian dari Kantor Desa Grajagan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO
KEPALA DESA GRAJAGAN
Jalan Lapangan No. 001 Telp. (0333) 5599100 Grajagan. Kode Pos 68483
Purwoharjo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ / 429.513.01/2018

Kepala Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **LILIS AL QURIANI**
Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 25-12-1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Sumberjambe 2/4 Desa Temurejo
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi :

Judul Penelitian : Kontribusi dan Manfaat Pasar Desa (Studi Kasus 3 pasar desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)
Lokasi Penelitian : Pasar Desa Curahjati Desa Grajagan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui bersama dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Grajagan, 16 April 2018

Kepala Desa Grajagan



SUPRIYONO

Lampiran 6.22 Hasil Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Kantor Desa Purwoharjo



Kantor Desa Karetan



Kantor Desa Grajagan



Foto wawancara dengan Sekretaris Desa di Kantor Desa Purwoharjo



Foto wawancara dengan petugas pasar di Pasar Desa Purwoharjo



Foto wawancara dengan para penjual di Pasar Desa Purwoharjo



Foto wawancara dengan para pembeli di Pasar Desa Purwoharjo



Foto wawancara dengan Sekretaris Desa di Kantor Desa Karetan

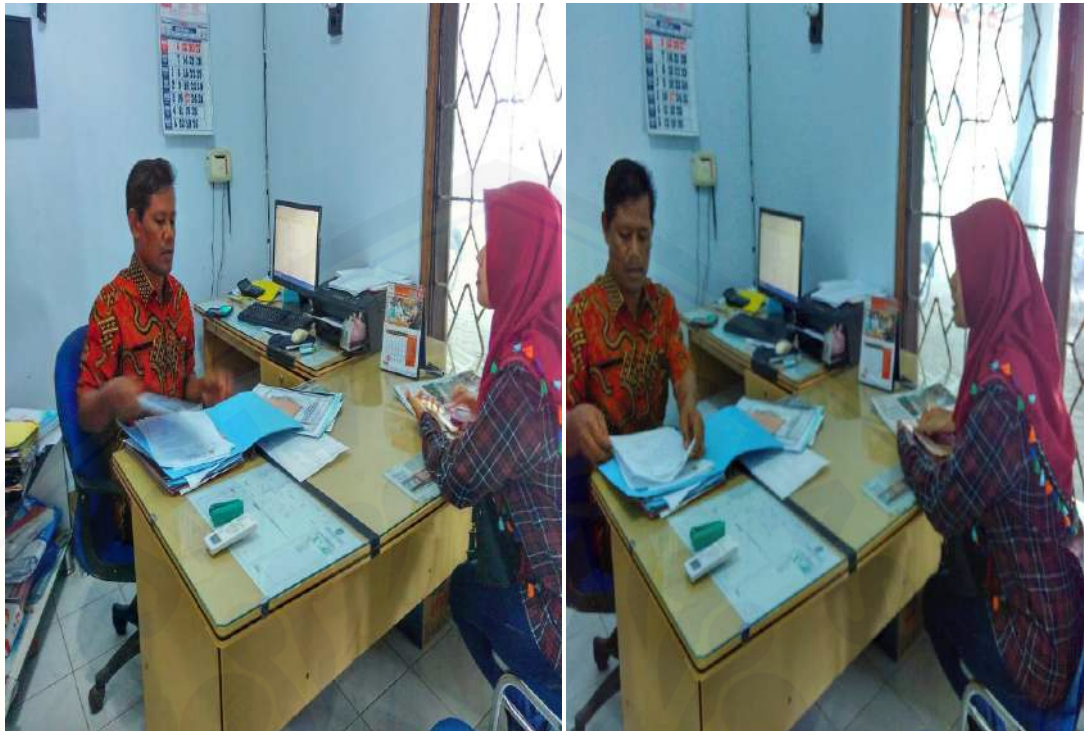


Foto wawancara dengan para petugas pasar di Pasar Desa Karetan



Foto wawancara dengan para penjual di Pasar Desa Karetan



Foto wawancara dengan para pembeli di Pasar Desa Karetan



Foto wawancara dengan Sekretaris Desa di Kantor Desa Grajagan



Foto wawancara dengan para petugas pasar di Pasar Desa Grajagan



Foto wawancara dengan para penjual di Pasar Desa Grajagan



Foto wawancara dengan para pembeli di Pasar Desa Grajagan



Bukti penarikan partisipasi pasar di tiga Pasar Desa Kecamatan Purwoharjo

Pasar Desa Purwoharjo



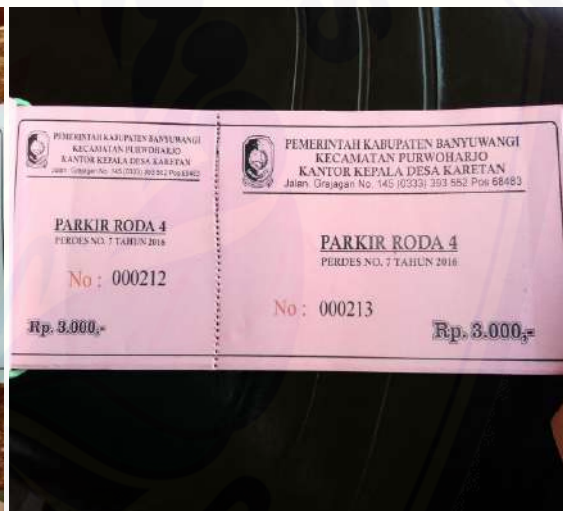
Pasar Desa Karetan



Pasar Desa Karetan



Pasar Desa Karetan



Pasar Desa Grajagan



Pasar Desa Grajagan

